

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD. Pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD dilaksanakan untuk menilai konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi pelaksanaan, mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah, serta mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disusun sebagai instrumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan laporan ini berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 032).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk menyajikan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menilai tingkat pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah;
2. Mengevaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah;
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan RKPD;
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Metode Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data kinerja fisik dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;
3. Analisis kesesuaian target dan realisasi indikator kinerja;
4. Evaluasi capaian berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas;
5. Sinkronisasi hasil evaluasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.5 Sistematika

Laporan ini disusun dalam empat bab, yaitu Pendahuluan, Capaian Kinerja, Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja, serta Penutup.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja utama (impact), capaian kinerja program (outcome), capaian kinerja output, serta capaian kinerja keuangan. Penyajian dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk seluruh Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.1 Capaian Kinerja Utama (Impact)

Kinerja makro pembangunan daerah diukur melalui indikator kinerja utama pembangunan daerah. Sebagaimana tertera didalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, indikator kinerja utama Pembangunan daerah provinsi NTT terdiri dari 25 indikator. Rincian selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,75-5,65	4,88	102,73	Target tercapai (Data Triwulan III 2025)
2	Tingkat Pengangguran terbuka	%	2,51-2,35	3,31	131,87	Target tidak tercapai (naik 0,29% dibanding Agustus 2024)
3	Pengeluaran per kapita	Rp 000	7.762	n.a	n.a	
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	%	19,35-18,85	18,60	98,67	Target tidak tercapai (menurun 0,42% dibanding September 2024)
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah	%	25,8	n.a	n.a	
6	Indeks Pembangunan Gender	%	94	93,81	99,79	Target tidak tercapai (Data tahun 2024, belum dirilis angka absolut IPG 2025)

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
7	Indeks Gini	Poin	0,337-0,33	0,315	95,45	Melebihi Target (Data September 2025). Menurun 0,001 poin dibanding September 2024 yang sebesar 0,3155
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	68,25	74,3	108,86	Melebihi Target (Data tahun 2023)
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,65-67	69,89	104,86	Melebihi Target
10	Rata-rata lama sekolah	Poin	7,93	8,22	103,65	Melebihi Target
11	Harapan lama sekolah	Poin	14,6	13,34	91,40	Target Tidak Tercapai (meningkat 0,11 dibanding tahun 2024)
12	Usia Harapan Hidup	Poin	68	72,16	106,12	Melebihi Target
13	Prevelensi Stunting	%	10-9,5	17,07		Data tahun 2024
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	100	67,99	67,99	Data tahun 2024
15	Rasio Konektivitas Provinsi	%	94			
16	Ratio Elektrifikasi	%	94	96,41	102,56	Melebihi Target (Data Triwulan II 2025)
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,95	75	101,42	Kategori cukup Baik (Melebihi target)
18	Indeks Resiko Bencana	Poin	138	132,81		Kategori sedang (Data tahun 2023)
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64-65	72,63	113,48	Melebihi Target (Data tahun 2024)
20	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	100	Target Tercapai
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat				
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,5	3,89	155,6	Melebihi Target (Data tahun 2024)

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	88,3	94,3	106,79	Melebihi Target (Data tahun 2024)
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90	87,75	97,5	Target tidak tercapai (Data tahun 2024)
25	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	82,5	78,50	95,15	Melebihi Target (Data tahun 2024)

Secara keseluruhan, beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah telah menunjukkan capaian yang baik dalam mengejar target RPD 2024–2026. Beberapa indikator kinerja mampu mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan seperti Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Skor Pola Pangan Harapan (SPPH), Rasio Elektrifikasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Indeks SPBE dan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. Tercapainya target indikator kinerja utama daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal birokrasi, kualitas perencanaan, komitmen kepemimpinan, dan dukungan eksternal seperti LSM/NGO, swasta, pemerintah pusat dan daerah lain, serta partisipasi Masyarakat. Sementara untuk data pengeluaran per kapita dan rasio PAD terhadap pendapatan daerah belum tersedia, namun target masing-masing ditetapkan sebesar Rp7.762.000 dan 25,8%.

Meski menunjukkan capaian yang baik, namun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target dan perlu menjadi perhatian yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan realisasi 3,31% dan belum mencapai target direntang 2,51-2,35%, tetapi angkanya masih berada dibawah nasional yang sebesar 4,85% pada Agustus 2025. Indikator lain yang belum mencapai target diantaranya Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender, Harapan Lama Sekolah, Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi. Meskipun belum mencapai target, namun kinerja dari beberapa indikator tersebut terbilang baik dengan capaian kinerja yang hampir mencapai 100%. Hanya indikator Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap yang perlu menjadi perhatian serius karena realisasinya hanya 67,99%, dan masih berada jauh dari target sebesar 100%. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat capaian kinerja utama daerah Provinsi NTT, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja indikator tersebut dalam mencapai target RPD 2024-2026, sekaligus mendorong kinerja pembangunan di daerah.

2.1.2 Capaian IKU Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah penjabaran operasional yang mendukung pencapaian IKU Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dan berfungsi untuk memastikan tujuan strategis daerah tercapai melalui program dan kegiatan terukur. Penyusunan IKU Perangkat Daerah Provinsi NTT dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan Indikator Utama Pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah dan kontribusinya terhadap kinerja pembangunan di daerah.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.39	13.34	99.63%	Capaian mendekati target, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan akses pendidikan berjalan sesuai arah Renstra, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi pada wilayah dengan kerentanan sosial dan geografis
2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8.14	8.88	109.09%	Capaian melampaui target, kondisi ini mencerminkan efektivitas program peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan,

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
						khususnya bagi penduduk usia dewasa.
3	Indeks kemajuan kebudayaan di NTT (%)	Indeks	54.89	57.13	104.08%	Capaian melebihi target, keberhasilan ini sejalan dengan sasaran strategis perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
4	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	76.42	64.17	83.97%	Capaian belum memenuhi target, diperlukan penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah (ATS), peningkatan akses pendidikan menengah, serta sinergi lintas sektor sesuai arah kebijakan Renstra.
5	Nilai Sakip Dinas	Nilai	82.5	42.46	51.47%	Capaian belum memenuhi target, hal ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola kinerja, konsistensi perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi.
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	86.32	71.79	83.17%	Capaian belum mencapai target, perlu optimalisasi strategi link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagaimana diamanatkan dalam Renstra.
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Predikat	BB			Menunggu Laporan Hasil Evaluasi dari Biro Organisasi

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
8	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	94.99	88.43	93.09%	Capaian mendekati target. Hal ini menunjukkan budaya kerja lulusan SMK cukup baik, namun penguatan soft skills dan karakter kerja masih perlu ditingkatkan sesuai arah kebijakan Renstra.
9	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	54.85	42.46	77.41%	Capaian belum memenuhi target, diperlukan peningkatan layanan pendidikan inklusif melalui penguatan sarana prasarana, pendidik khusus, dan dukungan kebijakan.
10	Persentase Dimensi Pendidikan dalam Pembangunan Kebudayaan	%	70.25		0.00%	Menunggu hasi rilis dari Kemendikbud
11	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	100	14	14.00%	Capaian belum memenuhi target, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pelatihan dan sertifikasi, serta belum optimalnya sinergi dengan lembaga sertifikasi dan dunia usaha/dunia industri.
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54.28	57.32	105.60%	Capaian melampaui target, kondisi ini menunjukkan efektivitas kebijakan peningkatan mutu pembelajaran literasi pada jenjang SMA
13	Rata-rata Kompetensi Literasi	Nilai	48.4	47.75	98.66%	Capaian mendekati target, diperlukan penguatan strategi

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	SMK berdasarkan Asesmen Nasional					pembelajaran literasi kontekstual sesuai karakteristik pendidikan vokasi.
14	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55.4	55.56	100.29%	Capaian telah memenuhi target, hal ini menunjukkan pelaksanaan layanan pembelajaran pada satuan pendidikan khusus berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
15	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61.21	61.21	100.00%	Capaian telah memenuhi target, capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan pembelajaran literasi pada pendidikan khusus jenjang pertama.
16	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45	45	100.00%	Capaian telah memenuhi target, capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan pembelajaran literasi pada pendidikan khusus jenjang menengah.
17	Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan	%	100	12.6	12.60%	Capaian belum memenuhi, diperlukan penguatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan perencanaan berbasis SPM dan dukungan sumber daya.
18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	Nilai	52.6	53.47	101.65%	Capaian melampaui target, hal ini menunjukkan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	berdasarkan Asesmen Nasional					peningkatan kualitas pembelajaran numerasi pada jenjang SMA.
19	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47.29	44.34	93.76%	Capaian belum memenuhi target, diperlukan penyesuaian strategi pembelajaran numerasi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan vokasi.
20	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	44.43	44.43	100.00%	Capaian telah memenuhi target, pelaksanaan pembelajaran numerasi pada pendidikan khusus berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan.
21	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	51.02	51.02	100.00%	Capaian telah memenuhi target, hal ini menunjukkan pembelajaran numerasi pada satuan pendidikan khusus jenjang SMP terlaksana secara optimal.
22	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45	52.5	116.67%	Capaian melampaui target, kondisi ini mencerminkan peningkatan mutu pembelajaran numerasi pada pendidikan khusus jenjang menengah.
23	Iklim keamanan SMA	Nilai	70.35	70.35	100.00%	Capaian telah memenuhi target, hal ini menunjukkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penguatan karakter

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
						dan budaya sekolah.
24	Iklim keamanan SMK	Nilai	69.78	67.32	96.47%	Capaian mendekati target, lingkungan belajar relatif aman dan kondusif, namun masih diperlukan penguatan pencegahan perundungan dan peningkatan budaya disiplin di satuan pendidikan.
25	Iklim keamanan SDLB	Nilai	68.9	68.9	100.00%	Capaian telah memenuhi target, hal ini menunjukkan lingkungan pendidikan khusus jenjang dasar berjalan aman dan mendukung proses pembelajaran.
26	Iklim keamanan SMPLB	Nilai	70.04	70.04	100.00%	Capaian telah memenuhi target, kondisi ini mencerminkan terlaksananya pengelolaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.
27	Iklim keamanan SMALB	Nilai	70.89	70.89	100.00%	Capaian telah memenuhi target, lingkungan pendidikan khusus jenjang menengah dinilai aman dan kondusif sesuai arah kebijakan Renstra.
28	Iklim kebinekaan SMA	Nilai	75.81	72.7	95.90%	Capaian mendekati target, diperlukan penguatan implementasi pendidikan karakter, toleransi, dan penguatan profil pelajar Pancasila.

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
29	Iklim kebinekaan SMK	Nilai	73.51	69.43	94.45%	Capaian mendekati target, implementasi nilai kebinekaan telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pendidikan karakter dan toleransi di satuan pendidikan vokasi.
30	Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	68.31	74.29	108.75%	Capaian melampaui target, hal ini menunjukkan lingkungan pendidikan khusus yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan.
31	Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	68.31	70.65	103.43%	Capaian melampaui target, kondisi ini mencerminkan keberhasilan pembinaan budaya sekolah yang menghargai keberagaman.
32	Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	68.31	72	105.40%	Capaian melampaui target, lingkungan pembelajaran dinilai kondusif dan inklusif sesuai arah kebijakan Renstra.
33	Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	59.17	58.02	98.06%	Capaian mendekati target, diperlukan penguatan kebijakan sekolah ramah anak dan inklusif untuk meningkatkan partisipasi dan kenyamanan seluruh peserta didik.
34	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	57.36	55.03	95.94%	Capaian mendekati target, perlu peningkatan praktik pendidikan inklusif dan penguatan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
						kapasitas pendidik sesuai arah Renstra.
35	Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	65.7	61.39	93.44%	Capaian mendekati target, masih diperlukan penguatan layanan pendukung dan sarana prasarana pendidikan khusus.
36	Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	65.7	68.9	104.87%	Capaian melampaui target, hal ini menunjukkan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan ramah bagi seluruh peserta didik.
37	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	70.89	65.68	92.65%	Capaian mendekati target, perlu peningkatan praktik pendidikan inklusif dan penguatan kapasitas pendidik sesuai arah Renstra.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mempunyai 37 indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra tahun 2024-2026. Sepanjang tahun 2025, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sudah cukup baik, hal tersebut digambarkan melalui pencapaian indicator-indikator kinerja yang realisasinya mencapai target, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut mendorong tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap sasaran Pembangunan daerah.

Meski memiliki capaian kinerja yang baik, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Ada beberapa indikator yang tercatat memiliki realisasi dibawah target, bahkan jauh dibawah target yaitu Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan (12,60%) dan Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat (14%). Hal tersebut perlu menjadi catatan dan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya

agar kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat dan memberikan kontribusi dalam mendukung kinerja Pembangunan daerah.

2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69	69,89	101,28	
2	Stunting	%	33,10	37,0	88,21	

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	100	69,73	69,73	Tidak Tercapai
2	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	80	41,27	25	Tidak Tercapai
3	Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	85	15,41	18,13	Tidak Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak	%	80	0	0	Tidak Tercapai karena Tidak tersedianya Anggaran
5	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	86,96	60,87	69,99	Tidak Tercapai
6	Ratio Rumah Layak Huni	Ratio	55	25	45,45	Tidak Tercapai
7	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	60	0	0	Tidak Tercapai karena Tidak tersedianya Anggaran

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase meningkatnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	Target Tercapai
2	Persentase meningkatnya Ketertiban Umum dan	%	100	100	100	Target Tercapai

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	perlindungan masyarakat (jumlah Perda dan perkara yang ditegakan)					
3	Persentase daerah rawan Kebakaran Setiap Tahun	%	100	-	-	

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen kebencanaan	%	25	0,00	0,00	Data realisasi belum tersedia
2	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana	%	30	0,00	0,00	Data realisasi belum tersedia
3	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	33,33	0,00	0,00	Data realisasi belum tersedia
4	Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	33,33	33,33	100	Target Tercapai
5	Persentase kabupaten kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100	100	100	Target Tercapai

6. Dinas Sosial Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Presentase PPKS yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	%	100	99,28	99,28	
2	Presentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	%	100	100	100	Target Tercapai

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	92	74.04	80.48	

2	Persentase Besar Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	77	37.97	49.71	
3	Persentase Perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	%	13.63	13.05	95.70	
4	Persentase Perusahaan Yang Melakukan Norma Kerja	%	67	13.05	19.48	
5	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	90	100	111.11	
6	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatan	%	90	105.88	117.65	
7	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	90	95.45	106.06	

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	97	100	103	
2	Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	95	100	105	
3	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	95	100	105	
4	Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	82	82	100	
5	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	18	44	244	
6	Peningkatan Cakupan Kabupaten /Kota Layak Anak	%	13,5	18	133	

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
----	----------------------	--------	--------	-----------	-------------	------------

1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Poin	80,02	78,60	98,22	1. Pencapaian IKLH merupakan tanggungjawab lintas sektor; 2. Aktivitas ekonomi yang mengabaikan aspek keberlanjutan.
---	---	------	-------	-------	-------	---

4. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	%	95.70	95.90	100.21	
2.	Cakupan Kepemilikan KIA	%	32.50	34,73	106.86	
3.	Presentasi aktivasi IKD	%	2.77	2.99	107.94	
4.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 Tahun	%	81.57	84.07	103.06	
5.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun	%	80	80,52	100.65	
6.	Presentasi Kepemilikan Akta Perkawinan	%	60	59.55	99.25	
7.	Jumlah Perjanjian Kerjasama penggunaan data kependudukan	Angka	2	3	150	

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Peningkatan BUMDes Aktif	Bumdes	40	51	127,5	51 Bumdes dimaksud merupakan intervensi kelompok masyarakat di desa dengan dukungan penganggaran dari dana desa.
2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	Unit	20	15	75	15 unit tersebut adalah 5 pencacah pakan ternak, 5 pencetak briket, 5 kompor briket. Pendanaan melalui sharing dana antara Provinsi dan Kabupaten Kota. Dinas. Provinsi menyediakan pelatih

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
						dan alat TTG ditanggung oleh Pemerintah Kab/Kota
3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	Lembaga	190	225	118,4	Dinas PMD Prov melakukan pelatihan dalam rangka agar kader posyandu dapat intervensi SPM namun tidak dilakukan penilaian terkait keaktifan layanan.
4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	Kabupaten/Kota	22	22	100	Laporan PKK disampaikan kemudian
5	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki Kode register	Desa	15	20	133,3	Kabupaten TTS
6	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	Desa	30	124	413,3	124 desa tertinggal menjadi berkembang
7	Terfasilitasinya Lembaga Adat Desa	Lembaga Adat Desa	15	0	0	Kendala rasionalisasi anggaran
8	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BPKAD, BPMD, Posyandu)	Desa	25	34	136	Laporan diterima dari desa, belum ada intervensi dinas PMD Prov.

6. Dinas Perhubungan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Peningkatan cakupan layanan	%	10	40,64	406,41	Melebihi target

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	angkutan umum (Target RKPD Murni)					Layanan yang dilakukan pada tahun n dikurangi layanan yang dilakukan pada tahun n-1 / layanan pada tahun n-1 * 100% untuk: penerbitan rekomendasi teknis, trayek angkutan umum yang dilayani, rehab terminal, perusahaan angkutan umum yang diaudit keselamatan LLAJ, Izin Andalalin, Pembangunan Fasilitas keselamatan jalan yang merupakan kewenangan Provinsi
2	Rasio Konektivitas (Target RKPD Perubahan)	Rasio	0,202	0,356	161,69	Melebihi target Formulasi IK1 mengarah kepada nilai AKDP sementara IK2 kepada nilai angkutan penyeberangan
3	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	10	12	120	Melebihi target
4	Cakupan operasi pembangunan/ pengembangan pelabuhan	%	33	33	100	Sesuai target

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor/Nilai Indeks	3,3 (Baik)	3,89 (Sangat Baik)	100	
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	82 (Menuju Informatif)	93,30 (Informatif)	113,78	
3	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	75	100	133,33	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
4	Indeks Keamanan Informasi	Level	49,00 (III+)	44,21 (II)	90,22	Ada penambahan indicator yang menghambat pengumpulan data dukung
5	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Jumlah	36	36	100	

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Jumlah Koperasi Aktif	%	82	87	106,09	Melebihi Target
2	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	%	3,5	4.54	129,71	Melebihi Target
3	Jumlah Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan	%	12	12,8	107, 26	Melebihi Target

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	4,69 Triliun	4,861 Triliun	103	Melebihi Target
2	Jumlah Perijinan Ynag diterbitkan tepat waktu	Ijin	5.000	5.676	113,5	Melebihi Target

10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	Orang	250	853	341	
2	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan	Medali	50	39	78	
		Cabor	11	11	100	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralimpik	Medali	25	12	48	
		Cabor	3	3	100	
4	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan dan kwarcab setiap Tahun	Organisasi	8	9	112,5	

11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	%	90	31.82	35.36	Realisasi tidak tercapai karena server di sebagian kabupaten/ Kota rusak dan tidak ada biaya pemeliharaan
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	75	72.98	97.30	
3	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun	%	100	100	100	
4	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100	95.25	95.25	
5	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip.	%	100	785.55	100	
6	Angka Pengawasan Kearsipan	%	70	60.15	85.92	

C. URUSAN PILIHAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1,1	0,74**	67,60	DKP T.A 2025 – Rp 9.740.817.656 (Total PAD NTT belum final)

2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Nilai	102	93,04**	91,21	Portal Satu Data KKP-RI (Angka valid -Bulan April)
3.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Nilai	102	105,08**	103,01	Portal Satu Data KKP-RI (Angka valid -Bulan April)
4.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/kapita/tahun	58	51,09**	88,08	Portal Satu Data KKP-RI (Angka valid -Bulan April)
5.	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	3,45	60,34	-47,64	DKP Provinsi NTT
6.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Ha)	Ha	790.420	832.785,8	105,36	SIDAKO KKP DKP Provinsi NTT

2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	7,77	7,71	99,2	Data realisasi pada triwulan 3 Tahun 2025
2.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp Juta	85.193,30	1.181.000		Nomenklatur IKU mengikuti IKU dalam Renstra Tahun 2025-2029

3. Dinas Peternakan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	1,80	2,18	121,11%	
2.	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	2,4	3,51	146,25	
3.	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	2,7	0,06	2,22	Target populasi ternak unggas terutama ayam broiler/pedaging disesuaikan dengan pemasukan DOC dari luar NTT
4.	Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	81	81	100	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
5.	Persentase ternak yang sehat	%	70	70	100	
6.	Unit usaha panga nasal ternak yang memenuhi standar	Jumlah	43	69	160,46	

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	76,50	79,34	103,71	Realisasi Melebihi Target
2.	Share PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB	%	12,74	27,57*	216,05	Capaian ini Adalah data sementara untuk sektor Pertanian secara keseluruhan dan belum dipilah untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	105,50	100,80	95,54	Realisasi sesuai Target

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase potensi sumber daya mineral yang terkelola	%	12 Ijin Usaha	12 Ijin Usaha	100	
2	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	5	3	60	
3	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT (Tahun 2019 = 41, Tahun 2024 = 59 Rektek)	%	2	0	0	Tidak ada Anggaran
4	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	32,92	19,27	58,54	Realisasi 2024
5	Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	%	33	0	0	Tidak ada di Renstra Perubahan
6	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate	%				Tidak ada di Renstra Perubahan

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,4	1,49	100 %	Data realisasi sampai dengan triwulan III
2.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,75	13,57	100%	Data realisasi sampai dengan triwulan III
3.	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	65%	-5,66	-8,71%	Covid dan data update BPS sampai dengan November

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Biro Umum

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah /wakil kepala daerah, Sekertaris Daerah, dan asisten	%	100	100	100	

b. Biro Hukum

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Capaian Peraturan Perundang Undangan	%	100%	149.9%	149.9%	
2	Peresentase Capaian Penegakan Hukum dan Pengelolaan HAM	%	100%	221.1%	221.1%	

c. Biro Organisasi

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Persentase perangkat daerah yang memiliki predikat RB “Istimewa” (kategori AA/nilai =80-90)	%	51,51	----	----	Perubahan regulasi : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
						2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka indikator ini tidak bisa dinilai sehingga penilaian mandiri Reformasi Birokrasi tidak dilakukan lagi.
2.	Level maturitas kelembagaan	Nilai	47	35,88	76,34	
3.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,81 (baik)	4,21 (sangat baik)	135,80	
4.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB tematik	%	30,30	56,10	185,15	
5.	Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A	%	18	51.28	284,67	

d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Cakupan kebijakan perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (makro 2 rekomendasi, mikro 1)	%	100%	100%	100%	
2	Cakupan kebijakan pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, sektor pertambangan, LH, dan sektor energi yang terkonsolidasi dengan baik.	Dokumen	2	4	200%	
3	Persentase pembinaan koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang	Dokumen	4	4	100%	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	terkonsolidasi dengan baik.					
4	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan	Dokumen	4 laporan dan 1 dokumen	13 laporan dan 1 dokumen		

e. Biro Pemerintahan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan dilaksanakan	%	100	100	100	
2	Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	
3	Cakupan kegiatan penataan urusan	%	100	100	100	
4	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	
5	Cakupan fasilitasi kegiatan pelayanan bidang kesejahteraan	%	100	100	100	

*SPM, dan kerja sama sudah Tercakup didalam indikator “cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan”

*Evaluasi dan perencanaan sudah memiliki indikator sendiri di 2025-2029

f. Biro Administrasi Pimpinan

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1.	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100	144,6	144,6	Sangat Baik
2.	Cakupan pemenuhan layanan keprotokolan	%	100	120,13	120,13	Sangat Baik
3.	Cakupan pemenuhan layanan perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha	%	100	100	100	Sangat Baik

g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	%	100	100	100 %	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
	(Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog)					
2	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Orang	10	8	80 %	
3	Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	%	100	100	100 %	
4	Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT	Laporan	39	39	100 %	

Note:

Kondisi IKU Biro PBJ Tahun 2025 berjumlah 4, yang didukung oleh 1 program, sehingga diusulkan untuk IKU Biro PJB menjadi 1: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang menjadi IKU Biro PBJ

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	96	96	

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	100	100	100	
2	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup	%	100	100	100	

	bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan					
3	Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	%	100	87.50	87.50	

2. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	%	100	100	100	Tercapai

3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	34,87	29.12	83.52	Realisasi PAD yang tidak mencapai target

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Formasi Jabatan Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi	%	85	97,06	114,18	
2	Persentase capaian kinerja 'Baik' ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	95	89	94	
3	Persentase penurunan Indisipliner ASN	%	90	100	111,11	

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Capaian Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) dan Program Pelatihan	Predikat Akreditasi	B	B	100	PKA & PKP B; LPPPBJ B.
2	Jumlah ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi	Orang	4.229	7.989	188,91	APBD, Fasilitasi, Non Budget

6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama di Kawasan Perbatasan	%	100	100	100	
2.	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100	100	100	
3.	Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	100	100	100	

7. Badan Penghubung Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Presentase peningkatan urusan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	90	90	100	Mencapai Target
2.	Presentase peningkatan cakupan layanan Pemerintah Daerah dan KL	%	90	100	111,11	Melebihi Target
3.	Presentase peningkatan kualitas pembinaan masyarakat	%	90	100	111,11	Melebihi Target
4.	Presentase peningkatan kualitas promosi daerah	%	90	100	111,11	Melebihi Target

Penjelasan :

- Berupa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung untuk menunjang kegiatan serta Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas, kegiatan Dasa Cita (Sekber AYO BANGUN NTT) terakomodir di program ini.
- Layanan Pemerintah Daerah dan KL berupa layanan Fasilitasi Kepentingan

Pemerintah Provinsi di Pemerintahan Pusat serta Melakukan Koordinasi dengan Kementerian.

3. Pembinaan kepada IKB 22 Kab/kota, tidak hanya IKB di Jabodetabek namun kepada IKB yang ada di seluruh Indonesia. Pembinaan berupa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh IKB diluar wilayah NTT berupa Edukasi, Kolaborasi dan penyelesaian masalah.
4. Promosi daerah bersifat fasilitasi pameran (penyelenggara dan berpartisipasi) dan bersifat hanya sebagai peserta undangan yang mempromosikan produk unggulan daerah. Kegiatan yang diikuti bisa di Jabodetabek maupun diluar Jabodetabek sesuai dengan arahan dan disposisi Gubernur NTT. Dampak dari promosi berupa kerjasama dengan UMKM untuk memasarkan produk unggulan, memperluas informasi produk unggulan yang dimiliki NTT sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat umum (seperti Kopi Flores, Jagung Titi, Kain tenun, Madu, Teh Kelor dll). Memperkenalkan produk unggulan NTT yang difasilitasi Badan Penghubung berupa NTT Mart dan Dapur NTT.

F. UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	68	76,06	111,85	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	86	89,48	104,05	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	%	86	79,95	92,97	
4	Cakupan SMA/SMK/ SLB se-Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	%	65	65,00	74,35	
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di Tingkat Provinsi	%	100	100	100	
6	Persentase Pemeriksaan Terhadap Program Unggulan	%	100	100	100	
7	Persentase Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	
8	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	92	92	
9	Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra	%	100	100	100	

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
10	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	92,02	75,63	82,19	
11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100	
12	Penilaian SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	
13	Persentase Perangkat Daerah Yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas	%	100	100	100	
14	Jumlah Aparat Pengawas Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	Orang	3	4	133,33	
15	Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjurusan dan Substantif	Orang	12	27	225	

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Presentase Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan , Lembaga Pendidikan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan.	%	80	100	125	
2	Presentase Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik.	%	81	39	48	
3	Presentase Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	75	75	100	
4	Presentase Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	79	79	100	
5	Presentase Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	%	75	75	100	

2.2 Capaian Kinerja Program (Outcome)

Capaian kinerja program untuk seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT disajikan sebagai berikut :

2.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	%	100	Masih menunggu LHE dari Biro Organisasi	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah (Kelompok Usia 16-18 tahun, Kelompok Usia 4-18 tahun dan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Sekolah Vokasi yang direvitalisasi dan Tersedianya Fasilitas Asrama yang Mendukung Pendidikan Vokasi	%	1. APS Kelompok Usia 16-18 tahun = 76,85 2. APS Kelompok Usia 4-16 tahun (Disabilitas) = 80	1. APS Kelompok Usia 16-18 tahun = 64,17 2. APS Kelompok Usia 4-16 tahun (Disabilitas) = 42,46	1. APS Kelompok Usia 16-18 tahun = 64,17 2. APS Kelompok Usia 4-16 tahun (Disabilitas) = 42,46
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	1	1	100
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikannya Bahasa dan sastra daerah	Bahasa	4	1 Bahasa dengan 10.000 Siswa	25.00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kelestarian Warisan Nilai Budaya dan Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Objek dan Orang	74 Objek dan 100 Orang	6060 Objek dan 1700 Orang	1700
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kesenian Tradisional	Orang/ Lembaga	100	2500	2500

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya dan Terlindunginya Situs dan Benda Cagar Budaya	Objek dan Orang	76 Objek dan 74 Orang Juru Pelihara	54 Objek dan 5 Orang Juru Pelihara (Berdasarkan SK Gubernur)	74,32
8	Program Pengelolaan Museum	Meningkatnya Tata Kelola Museum	Dokumen	1	1	100

2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT

No	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Persentase Realisasi pendapatan terhadap target	%	100	94.76	94.76
2	Persentase Realisasi penyerapan Anggaran APBD	%	100	81.45	81.45
3	Jumlah Kabupaten Kota yang menerapkan 4 tahapan Penerapan SPM Kesehatan	Jumlah	100	100	100
4	Presentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi satu sehat	%	100	100	100
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	98.41	98.41
7	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	96.92	96.92
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100
10	Persentase PBF Cabang dan Cabang PAK yang Diawasi dan Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	%	100	100	100

No	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
11	Persentase Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya	%	100	100	100
12	Presentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	55	95	100
13	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM Prioritas sesuai kelompok sasaran pada populasi usia > 15 tahun sebanyak > 25 %	Jumlah	9 kako	9	100
14	Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko masalah kesehatan jiwa pada populasi usia > 15 tahun sebanyak 25%	Jumlah	9 kako	10	100
15	Presentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	100
16	Presentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100	100
17	Presentase Jamaah Haji Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	%	100	100	100
18	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program imunisasi rutin lengkap	Jumlah	12 kako	0	0
19	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	128	118	107,81%
20	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	10	8	120,00%
21	Angka Kematian Balita	/1.000 KH	11	8	127,27%
22	Prevalensi Balita Stunting	%	33.10	37,0	88,21%
23	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan minimal 3 dari 6 indikator penyehatan lingkungan	%	70	18.18	25.97
24	Persentase kab/kota yang menerapkan kesehatan kerja dan olahraga	%	75	77.27	100
25	Persentase RT Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	55	53	96.36

No	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
26	Persentase Posyandu Aktif	%	15	31	206,67
27	Presentase Puskesmas dengan 9 (Sembilan) tenaga Kesehatan Standar	%	45	32	71.11
28	Presentase RS Tipe C dengan 7 Spesialis (4 Dasar dan 3 Penunjang).	%	65	90.91	100
29	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kompetensinya naik minimal 5 % dibandingkan tahun sebelumnya	jumlah	3150	4540	100
30	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pengawasan Binwas Mutu	Jumlah	22	16	72.72
31	Jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan	jumlah	2	2	100
32	Presentase peralatan laboratorium kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	%	100	0	0
33	Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang di tingkatkan kapastitasnya	jumlah	20	16	80
34	Presentase Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang sesuai SOP	%	100	100	100
35	Presentase pelayanan pemeriksaan Laboratorium	%	90	95	100
36	Jumlah Perjanjian Kerja Sama	Jumlah	10	17	100
37	Indeks Kepuasan Pasien	%	90	89.48	99.42
38	Persentasi indikator mutu yang mencapai target	%	90	72	100
39	Persentasi peningkatan standar KPS, HPK, PPI, TKRS, MFK, PMKP, MRMIK	%	100	100	100
40	Jumlah Dokter Pelayanan medik spesialis dasar yaitu Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi dan Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Jiwa Naimata.	Jumlah	10	0	0
41	Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan RS Jiwa Naimata yang dilatih	Jumlah	100	100	100

No	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
42	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100	82	82
43	Presentasi Kemandirian BLUD RSU	%	57	77	100
44	Presentase SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100	87	87

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	625,720	76,608	12.24
		Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	33.33	-	-
		Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	2000	56.95	2.85
		Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	40	20	50
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	%	37.74	37.74	100.00
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	15.41	15.41
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	%	60		-
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah	%	20		-
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan drainase	%	75		-
6	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan	Lokasi	2		-

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
		Infrastruktur Permukiman pada KSDP				
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	100		-
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100	100	100
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	%	33.33	-	-
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86.86	69.73	80.28
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	66.94	77.22	115.36
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	86.96	60.87	70.00
13	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100	-	-
		Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100	25	25
14	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	93	25	26.88
15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	18.18	9.09	50

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
16	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	33.33		-
17	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%	18.18		-

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	%	100		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100		

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen kebencanaan	%	25	0,00	0,00
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana	%	30	0,00	0,00
		Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	33,33	0,00	0,00
		Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	33,33	33,33	100,00
		Persentase kabupaten kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100	100	100,00

6. Dinas Sosial Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Meningkatkan penunjang urusan daerah provinsi	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Sosial/ Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Presentase Pemberdayaan Sosial	%	100	100	100
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Meningkatkan kualitas layanan penanganan warga negara migran	Presentase layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100
4	Program Rehabilitasi Sosial/ Meningkatkan Cakupan Rehabilitasi Sosial	Presentase Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Presentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100
6	Program Penanganan Bencana/ Meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi korban bencana	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana	%	100	100	100
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan/ Meningkatkan tatakelola taman makam pahlawan	Presentase tatakelola taman makam pahlawan	%	100	100	100

2.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Perencanaan tenaga kerja	Persentase provinsi dan kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				Tidak ada target dan realisasi
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	92	74.04	80.48

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Besar Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	77	37.97	49.71
4	Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	%	13.63	13.05	95.70
5	Program pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Melakukan Norma Kerja	%	67	13.05	19.48
6	Program perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	90	100	111.11
7	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatan	%	90	105.88	117.65
8	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	90	95.45	106.06

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	%	97	100	103
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	82	82	100
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	95	100	105
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	18	44	244

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	13,5	18	133
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	95	100	105

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	%	100	100	100	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	%	100	100	100	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi dan Persetujuan lingkungan/ rekomendasi kelayakan operasional yang diberikan	Dokumen	12	24	200	
4	Program Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,32	%	1,38	104,5	
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	10,99	-	-	Rasionalisasi anggaran
6	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,47	17,23	111,37	

4. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	%	97,42	95,90	97,96
		Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak	%	35	34,73	99,22
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3	2,99	99,6
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun	%	79,61	80,52	101,14
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 Tahun	%	82	84,07	102,52

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah desa persiapan yang memiliki kode register dan jumlah desa berkembang)	Desa	15	20	133,3
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Meningkatnya status desa minimal berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes aktif dan kerja sama desa dengan lembaga non pemerintahan	Dokumen	1	1	100
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan adat (Bumdes, PKK, Posyandu, dan Alat TTG)	PKK	22	22	100
			Posyandu	190	225	118,4
			Unit	20	15	75
			Bumdes	40	51	127,5

6. Dinas Perhubungan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan cakupan layanan angkutan umum	%	10	40,64	406,41
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,220	0,364	165,27
		Persentase Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	29,75	19,37	135,43
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	10	12	120
		Cakupan operasi pembangunan/ pengembangan pelabuhan	%	33	33	100
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,220	0,364	165,27
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	79	89,80	116,62

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	82	93,30	116,63
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,7	3,89	144,07
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Perangkat Daerah	34	36	105,88
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	75	100	133,33
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Level	III+	II+	90,22

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	%	82	87	106,09
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	%	3,5	4,54	129,71
3	Program Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	%	12	12,8	107,26
4	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM				

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi	%	10	10	100
2	Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	100	113	113
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM	%	67,86	67,86	100
5	Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan system informasi penanaman modal	%	95	95	100

10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun	Orang	250	853	341
2	Pengembangan Kapasitas Daya	Presentasi peningkatan perolehan medali	Medali	50	39	78

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Saing Keolahragaan	cabang olahraga prestasi dan Pendidikan	Cabor	11	11	100
		Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	Medali	25	12	48
			Cabor	3	3	100
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan dan kwarcab setiap Tahun	Organisasi	8	9	112,5

11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	%	90	31.82	35.36
		Persentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.	%	75	72.98	97.30
		Persentase koleksi daerah yang dihimpun	%	100	100	100
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarik an setiap tahun	%	60	60	100
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah	%	100	95.25	95.25
		Persentase Angka Pengawasan Kearsipan	%	70	60.15	85.92
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100	785.55	100

2.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
----	---------------------------	------------------------------	--------	----------------	-------------------	----------------

1.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	790.420	832.785,80	105,36
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	205.000	93.157**	45,44
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.749.600	1.266.183**	72,36
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	3,45	60,34	-47,64
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	58	51,09**	88,08

2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100	200	200	Target 1 destinasi wisata yang ditangani, kemudian yang ditangani adalah 2 destinasi wisata (Kampung seni dan Pantai Lasiana)
		Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	4,17	8,33	199,7	Target 1 kawasan strategis yang ditingkatkan, kemudian yang ditingkatkan adalah 2 kawasan
		Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	100	Pelayanan rekomendasi teknis untuk permohonan izin usaha pariwisata melalui aplikasi OSSRBA.
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (14 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	%	31,82	43,18	135,7	Ada kontribusi dari pelaksanaan tour de entete dengan pemanfaatan website TIC.
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	%	33,33	6,6	19,81	Dari target 100 produk ekraf realisasinya 20 produk ekraf yang berhasil difasilitasi dan didaftarkan untuk mendapatkan HKI, hal ini

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
							disebabkan karena belum lengkapnya kriteria produk ekraf, kurangnya sosialisasi.
		Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	%	33,33	0	0	Tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran DBH dari pusat.
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%	33,33	25	75	Target 33,33 diperoleh dari 40/120 lalu realisasi 25 diperoleh dari 30/120, untuk capaian 25/33.33. Pemindahan lokasi ke Bali mengakibatkan anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 30 tenaga kerja.
		Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%	33,33	0	0	Kegiatan diarahkan ke pelaku ekraf untuk menghasilkan produk unggulan di desa wisata (OVOP).

3. Dinas Peternakan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya persentase ternak besar (Sapi, kuda, kerbau), ternak kecil (Kambing, babi, domba), ternak unggas (Ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	%			
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya persentase prasarana peternakan yang memenuhi standar	%			
3	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya persentase ternak yang sehat	%			

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	25	5,66	22,64
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	24	65,08	271,17
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan	%	30	56,09	186,97
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produksi Padi	Ton	796.154	968.234,00*	125,88
		- Produksi Jagung	Ton	299.593	415.589,00*	138,71
		- Produksi Sorgum	Ton	2.086	1.704,50*	81,71
		- Produksi Kedelai	Ton	1.483	65,00*	4,3
		- Produksi Kacang Hijau	Ton	7.655	3.041,22*	39,72
		- Produksi Bawang Merah	Ton	12.820	9.266,80*	72,28
		- Produksi Cabe	Ton	13.783	13.131,40*	72,28
		- Produksi Jeruk	Ton	18.381	9.922,40*	53,98
		- Produksi Mangga	Ton	41.124	37.384,60*	90,91
		- Produksi Kelapa	Ton	73.179,95	62.558,31*	85,49
		- Produksi Kopi	Ton	29.076,20	24.958,00*	85,84
		- Produksi Kakao	Ton	23.177,97	21.228,00*	91,59
		- Produksi Jambu Mete	Ton	59.104,44	52.815,42*	89,36
		- Produksi Cengkeh	Ton	4.551,57	3.952,00*	86,83
		- Produksi Kelor (daun basah)	Ton	3.824,54	1.529,00*	39,98
		- Cakupan benih bersertifikat	%	100,00	100,00	100,00
		- Cakupan Penggunaan Pupuk	%	19,00	91,27	480,37
		- Rasio Ketersediaan Alsintan	%	14,20	6,30	44,37

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	80	100	125
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	75	90,35	120,47
7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	66.67	17,07	25,60
		Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	82.46	6,06	7,35
		Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	89	3,75	4,21
		Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	96.45	0,33	0,34

Keterangan: *) angka sementara

5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Aspek Kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT setiap Tahun	Jumlah	0	0	0
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Terciptanya pengeolaan Usaha Pertambangan yang baik dan benar	Dokumen	12	12	100

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tercapainya Konservasi Energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT	Unit	0	0	0
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Tercapainya rasio elektrifikasi	Unit	842	842	100

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Rata- rata Kenaikan Barang Pokok Per Tahun	%	3-5	8,41	59,45%	Target yang tertera adalah target inflasi, sementara realisasi adalah perhitungan rata-rata kenaikan harga barang pokok. Perhitungan capaian menggunakan perbandingan terbalik target maksimum per realisasi, karena semakin besar realisasi hasilnya semakin tidak baik.
2.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang memasarkan Produk Sesuai standar perlindungan Konsumen	%	63	58,36	92,64%	Merupakan indikator untuk bidang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga);
		Persentase Pelaku Usaha Yang Wajib Melakukan Pengujian/Kalibrasi.	%	25	94,29	100%	Merupakan indikator untuk UPTD PSMB (Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang).
3.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Produk Yang Dipasarkan	%	80	96,11	100%	
4.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	1,75	7,72	100%	Industri pengolahan yang dimaksud Adalah industry yang masuk dalam

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
							KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

2.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Biro Umum

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan terhadap KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, dan asisten	%	100	100	100

b. Biro Hukum

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100%	89%	89%
2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Peraturan Perundang-Undangan	%	100%	90%	90%

c. Biro Organisasi

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	95,54	95,54
2.	Program penataan organisasi	Persentase perangkat daerah pengampu yang telah Menyusun rencana aksi RB	%	100	100	100

d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Makro 2				

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Rekomendasi dan Mikro 1 Dokumen)				
		Cakupan kebijakan Pengelolaan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Sektor Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Sektor Energi yang terkonsolidasi dengan baik (2 Dokumen)				
2	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Presentase Pembinaan, Koordinasi, Dan Fasilitasi BUMD Dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik (4 Dokumen)				
3	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi pembangunan yang tertib	Presentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan (4 Laporan dan 1 Dokumen)				

e. Biro Pemerintahan

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan dilaksanakan	%	100	100	100
		Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100
		Cakupan kegiatan penataan urusan	%	100	100	100
		Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
3	Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi kegiatan pelayanan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	100

f. Biro Administrasi Pimpinan

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	121,57 %	121,57

g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Tingkat kematangan UKPBJ Provinsi	%	100	89,27	89,27
		Prosentase JF Pengelola PBJ	%	84		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	41	96,56	96,56
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	98,88	98,88
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	92,77	92,77
		Jumlah Laporan Pengembangan	Laporan	1	83,30	83,30

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
		Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	86,22	86,22
		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50	83,86	83,86
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3	85,11	85,11
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3	93,84	93,84

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Administrasi umum Sekretariat dan DPRD	%	100	100	100
		Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
		Persentase Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Capaian Ikhtisar Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Pembahasan Ranperda Sesuai Jadwal yang Telah Ditetapkan	%	100	82	82
		Persentase Pengawasan DPRD Terhadap Program atau Kegiatan Strategis Pemerintah	%	100	100	100
		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sesuai Masa Persidangan	%	100	100	100

2.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	97,82	97,82
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	100	92,70	92,70
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	100	94,73	94,73
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	%	100	99,99	99,99

2. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	80	80
		Meningkatnya sarana dan prasarana	%	100	90	90
		Tercapainya penyusunan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100	100	100
2	Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah	%	100	100	100
		Persentase pemanfaatan aset	%	100	70	70
		Persentase pemindahtanganan dan pengamanan barang milik daerah	%	100	80	80
3	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	30.5	30.03	98.46

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Kegiatan Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2	Program Kepegawaian Daerah	I. Persentase Formasi Jabatan Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi II. Persentase Capaian Kinerja 'Baik' ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT III. Persentase Penurunan Indisipliner ASN				
	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian		%	100	101	101
	Pengembangan Kompetensi ASN		%	100	100	100
	Mutasi dan Promosi ASN		%	100	88,29	88,29
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		%	100	100	100

**5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	%	1.289	1.819	141,12
		Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	%	2.860	6.063	211,99
		Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi	%	80	107	133,91

6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan/Persentase Usulan Rencana Aksi yang diusulkan ke BNPP dan MoU yang dihasilkan	%	100	100	100
		Persentase Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100	100	100
		Persentase Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	100	100	100

7. Badan Penghubung Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
----	---------------------------	------------------------------	--------	----------------	-------------------	----------------

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	85	89,03	104,74
2	Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya Pelayanan Penghubung	%	85	93,09	109,52

Peran dan Fungsi Badan Penghubung pada Sekretariat Bersama “AYO BANGUN NTT” adalah Koordinasi, Fasilitasi untuk Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan berbagai pemangku kepentingan mendorong investasi.

Penjelasan Sekber :

1. Target Sekber berupa 10 Lokus yang akan dijadwalkan oleh Gubernur NTT untuk didatangi (Provinsi NTB, Ambon, Merauke, Jayapura, Sorong, Gorontalo, Batam, Yogyakarta, Manokwari, Kendari dan Makassar). Fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh diaspora NTT yang dikunjungi oleh Gubernur NTT.
2. Identifikasi diaspora NTT yang tidak memiliki KTP yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti jumlah diaspora NTT diluar wilayah NTT sehingga mudah untuk dikoordinir.
3. Anggaran yang termasuk dalam sekber berupa makan/minum, sewa kendaraan, dll.
4. Badan Penghubung memfasilitasi seluruh Diaspora NTT untuk kontribusi pembangunan NTT.

2.2.6 UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi	%	100	100	100

2.2.7 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	100	125%

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	81	39	48.14%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	79	79	100%
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	79	79	100%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	75	75	100%

2.3 Capaian Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan menggambarkan tingkat realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja fisik dan outcome. Berikut uraian terkait kinerja keuangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT :

2.3.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	680.100.969.544	142.380.041.876	20,94
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	114.735.300	75.348.300	65,67

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	445.529.400	350.045.400	78,57%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	2.141.477.700	2.044.134.919	95,4
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	5.180.721.973	4.863.563.434	93,88
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	633.399.200	615.760.900	97,22
7	Program Pengelolaan Permuseuman	3.408.211.600	3.302.393.440	96,90
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.857.080.989.547	979.824.299.858	52,76

2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Penunjang urusan Pemerintahan daerah provinsi	330.136.162.793	257.731.361.035	78,08
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	169.151.076.163	151.691.963.251	89,68
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	24.984.855.425	17.612.583.384	70,49
4	Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	40.000.000	21.036.000	52,59
5	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	34.660.000	24.052.500	69,40

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44,652,850,909	35,537,079,540	79.59
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12,358,055,294	9,553,947,227	77.31
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	909,033,500	707,487,056	77.83
4	Program Penataan Bangunan Gedung	407,103,000	311,772,671	76.58
5	Program Penyelenggaraan Jalan	121,833,876,445	105,583,045,100	86.66
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	800,000,000	771,369,533	96.42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2,707,276,050	2,682,422,302	99.08

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Program Pengembangan Perumahan	1,252,873,420	1,213,937,450	96.89
	Program Kawasan Permukiman	305,000,000	255,172,472	83.66
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,857,363,368	2,630,367,457	92.06
UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,019,706,433	2,766,858,576	91.63
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,265,670,172	2,211,229,863	97.60

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.479.343.382	972.380.067	91,53
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	783.252.600	596.739.850	76,19
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2.500.000	-	-

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.972.332.882	5.174.144.069	86,64
2	Program Penanggulangan Bencana	6.038.452.911	5.705.028.293	94,48

6. Dinas Sosial Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	33.305.715.282	30.092.441.117	91,25
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.366.000.000	1.364.496.400	99,89
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	288.395.500	137.542.400	47,69
4	Program Rehabilitasi Sosial	17.410.628.164	15.640.507.191	89,83
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.722.427.420	5.701.477.724	99,63
6	Program Penanganan Bencana	839.571.000	825.518.520	98,33

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	205.007.000	182643.923	89,09

2.3.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.574.352.178	13.601.121.063	87.33
2	Program Perencanaan tenaga kerja	0	0	0
3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	0	0	0
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	554.800.000	179.827.000	32.41
5	Program hubungan industrial	10.630.628.180	10.567.995.100	99.41
6	Program pengawasan ketenagakerjaan	69.000.000	46.843.900	67.89
7	Program perencanaan kawasan transmigrasi	0	0	0
8	Program pembangunan kawasan transmigrasi	2.694.822.608	2.637.016.299	97.85
9	Program pengembangan kawasan transmigrasi	1.105.177.392	1.092.993.651	98.90

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	17.828.604.862	13.632.538.697	76,46%
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	215.026.700	179.086.700	83,29%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.045.300	100.945.755	50,46%
4	Program Perlindungan Perempuan	841.572.610	521.419.242	61,96%
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	101.062.600	6.750.000	6,68%
6	Program Pemenuhan Hak Anak	702.625.420	349.300.682	49,71%

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7	Program Perlindungan Khusus Anak	884.195.954	448.043.339	50,67%
8	Program Pengendalian penduduk	37.078.900	14.611.250	39,41%
9	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	318.276.948	231.263.998	72,66%
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	69.562.800	35.331.400	50,79

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	85.775.207.850	73.367.251.598	85,53	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	540.004.619	482.802.549	89,41	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.802.000	48.562.700	95,59	
4	Program Pengelolaan Hutan	419.038.293	333.878.000	79,68	
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1.850.000	0	0	Rasionalisasi Anggaran
6	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6.716.556.000	6.255.774.140	93,14	

4. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	3.814.340.382	3.126.854.311	81,98
2	Program Pendaftaran Penduduk	703.948.000	550.762.180	78,24
3	Program Pencatatan Sipil	1.008.875.000	951.141.042	94,28

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penataan Desa	4.609.000	4.609.000	100
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	21.004.500	12.194.300	58,06 (rasionalisasi anggaran)
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	15.554.679.710	12.412.250.935	79,80

6. Dinas Perhubungan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.151.162.675	17.699.894.706	87,84
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.401.484.186	6.261.177.532	97,81
3	Program Pengelolaan Pelayaran	6.010.099.100	5.869.347.790	97,66

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.049.033.644	7.618.080.698	84,18
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.748.092.922	5.856.213.433	86,78
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.703.598.291	5.514.967.750	96,69
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	177.562.200	35.852.441	20,19
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	171.575.700	69.364.475	40,42

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Nama Program	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.830.751.777	6.696.377.366	85,51
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.757.939.204	2.009.949.774	72,88
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	380.105.820	258.625.700	68,04

No	Nama Program	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
4	Program Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	801.848.230	579.676.000	72,29
5	Program Pengembangan UMKM	127.550.000	125.750.000	98,59

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260,590,380	9,848,800	3,79
2	Promosi Penanaman Modal	9,995,200	9,995,200	100
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	288,704,020	231,316,136	80,12
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	378,561,100	305,156,700	80,61
5	Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	17,272,800	17,237,200	99,79

10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.550.000.000	5.119.248.033	78,16
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	22.085.014.500	20.807.730.749	94,22
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.275.000.000	1.096.683.460	86,01

11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.720.019.672	7.280.692.863	83,49
2	Program Pembinaan Perpustakaan	3.860.928.692	3.286.859.572	85,13
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	95.724.300	57.230.800	59,79
4	Program Pengelolaan Arsip	204.661.700	195.212.000	95,38
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	59.515.900	58.079.500	97,59

2.3.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.941.238.138	17.340.216.858	86,96	Selisih lebih Gaji P3K
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.582.000	6.362.500	60.13	Selisih di sub kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut mendukung ekonomi biru
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	939.671.049	525.117.978	55.88	Pembangunan BAK Air pada PPI Oeba-PPP Tenau dialihkan ke T.A 2026
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	47.400.000	42.316.700	89,28	Selisih pada kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	129.977.500	81.757.700	62.90	Sisa pada Sub Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Kapal Perikanan (Dinas, KCD Wil II, UPTD Alor)
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.101.946.800	918.026.820	83,31	Lebih sisa anggaran insetif fiskal

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.101.226.166	8.886.755.907	87,97	Alokasi belanja gaji ASN dan kegiatan di administrasi umum ada yang tidak terserap
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	442.752.560	60.412.174	13,64	Tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
					anggaran DBH dari pusat.
3.	Program Pemasaran Pariwisata	6.554.034.360	4.314.828.871	65,83	1. Alokasi anggaran yang tidak terserap pada kegiatan tour de entete (selisih antara standar harga akomodasi dengan harga real di lapangan); 2. Tidak terlaksananya dukungan kegiatan dari pihak ketiga (pemilihan putri pariwisata, komodo travel mart)
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	194.709.600	15.200.000	7,80	Tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran DBH dari pusat.
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.950.000.000	3.306.100.159	83,68	Ada aktivitas di 3 lokasi yang tidak terlaksana
	TOTAL	21.242.722.686	16.583.297.111	78,06	

3. Dinas Peternakan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	27.531.592.356	21.823.326.399	79,26	Selisih lebih gaji PPPK
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.087.000.863	5.343.811.505	87,79	Ketidakmampuan pihak ke-3 menyediakan ayam KUB sesuai spesifikasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.127.500	22.045.500	99,63	Sisa lebih pengadaan barang/jasa
4	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.719.316.773	2.564.799.466	94,32	Sisa lebih pengadaan barang/jasa

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.889.041.131	44.419.445.603	80,93

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.947.574.620	1.519.430.410	78,02
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	82.278.000	78.116.760	94,94
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.000.000	1.625.300	81,27
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.184.905.505	7.744.923.155	94,62
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.452.376.350	1.028.334.710	70,80
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.889.670	51.263.000	95,13
8	Program Penyuluhan Pertanian	9.258.808.000	8.946.357.715	96,63

5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Aspek Kegeologian	260.874.050	229.691.826	88,05
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	434.142.840	380.707.800	87,69
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	520.539.710	472.876.310	90,84
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.097.765.860	2.037.167.933	97,11

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.036.370.000	1.996.062.051	98,02	
2	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	660.102.892	568.576.162	86,13	
3	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900	30.882.900	100	
4	Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.118.459.047	7.994.416.205	41,82	Realisasi kecil karena kegiatan tidak selesai dilaksanakan (NTT MART),

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
					target NTT MART 22 Kab/Kota realisasi 11 Kab/Kota.

2.3.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Biro Umum

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.527.473.764	42.727.901.362	84,45

*Komponen yang tidak terserap, perjalanan dinas pimpinan ke LN, sewa mobilitas udara, pengadaan X-Ray di ruang tunggu VIP Pemerintah Daerah, tidak dilaksanakan

b. Biro Hukum

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	443.987.820	395.317.845	89
2	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.235.500.180	1.117.014.200	90

c. Biro Organisasi

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	582.984.004	557.037.867	95,52
2.	Program penataan organisasi	1.155.715.095	1.064.984.021	92,14
	Total	1.738.699.099	1.622.021.888	93,29

d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Nama Program	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.580.300	56.541.400	99,93
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	145.258.000	143.358.000	98,69
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	119.357.900	118.295.28	99,11

e. Biro Pemerintahan

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.721.253	668.547.275	97,35
2	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.116.212.600	1.098.772.495	98,44
3	Kesejahteraan Rakyat	13.503.000.000	10.673.122.792	79,04

Note:

*Pencapaian proposal beasiswa yang tidak terserap (n-1), rata-rata mereka sudah selesai penulisan skripsi. 100 jutaan.

- *Beasiswa (mahasiswa dari orang tua tidak mampu):
- *Dana penelitian (general: S2 dan S3)
- Pengumuman bantuan beasiswa dan dana penelitian, kapan dan lewat channel mana?

*Bantuan sosial lembaga keagamaan yang tidak. (Kelengkapan berkas pencairan)

f. Biro Administrasi Pimpinan

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.468.367.960	Rp 3.445.552.213	99,34

g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.488.430.484	1.424.437.483	95,70
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.832.883.316	4.233.388.844	87,60

Note:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi: Komponen P3K Tahap 1 dibayar 1 bulan, sedangkan P3K Tahap II dibayarkan sampai September 2025 sehingga menimbulkan sisa yang tidak direalisasikan.
- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa: Kegiatan dari LKPP: Perjalanan dinas mengikuti kegiatan Bimtek terkait LPSE di LKPP Jakarta yang tidak direalisasikan, karena Bimtek yang dilaksanakan oleh LKPP dilakukan secara daring (online). Komponen Kegiatan Ujian kompetensi (Sertifikasi Fungsional Pengelola PBJ) untuk 4 orang, sedangkan LKPP akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan kuota minimal 1 kelas terdiri dari 30 orang, karena kuota minimal tidak mencukupi sehingga tidak bisa dilaksanakan.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.80.406.716.719	Rp.76.725.476.494	95,42

2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.92.459.638.300	Rp.88.910.693.988	96,16
---	--	-------------------	-------------------	-------

2.3.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.754.964.800	13.702.881.393	86,98
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.059.399.249	2.022.447.718	66,11
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.740.039.950	2.391.707.465	87,29
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.638.014.128	1.528.336.497	93,30

2. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	19.226.382.893	15.714.485.400	81,73	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 10.919.092.000 realisasi 7.540.016.741 atau 69,05% hal ini disebabkan karena asumsi perubahan harga beras Bulog pada TA. 2025 tidak terpenuhi. Seluruh Kewajiban pembayaran hak PNS dan PPPK atas gaji dan tunjangan telah direalisasikan.
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	%	784.573.474.584,00	631.839.499.216,00	80,83	Bergizi Gratis (MBG) dianggarkan sebesar Rp. 28.023.977.266 tidak terealisasi, hal ini

No	Nama Program/ Outcomes	Indikator Outcome Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	keterangan
		Pemerintahan Daerah					disebabkan karena belum ada regulasi/juknis yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan MBG yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sampai berakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program penunjang urusan perangkat daerah	91.982.177.258	66.683.942.939	72.49
2	Program Pengelolaan barang milik daerah	3.354.649.080	1.712.274.148	51.04
3	Program pengelolaan pendapatan daerah	14.640.981.716	12.885.555.342	88.01

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	4.498.868.971	3.739.933.172	83,13
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.985.523.923	8.874.383.029	88,87

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.280.954.954	10.319.440.162	84,03

6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Perbatasan	389.347.334	357.632.080	91,85

7. Badan Penghubung Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.861.520.278	9.671.009.966	89,03%
2	Program Pelayanan	1.145.292.000	1.066.157.170	93,09%

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Penghubung			

2.3.6 UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.371.491.813	10.874.731.764	95,63
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.323.686.988	4.964.935.590	93,26
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.735.142.068	2.276.260.143	83,22
	Jumlah	19.430.320.869	18.115.927.497	93,24

2.3.7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

No	Nama Program	Pagu 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.953.765.180	4.335.084.737	87.51
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.256.881.390	3.037.084.473	93.25
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.684.483.900	6.666.566.970	99.73
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	156.098.000	127.039.694	81.38
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	299.893.000	285.040.900	95.04
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.172.220.700	735.176.048	62.71

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA

Bab ini menyajikan faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025 **per Perangkat Daerah**, sebagai hasil analisis pengendalian dan evaluasi kinerja. Penyajian dilakukan secara sistematis dengan format **Masalah – Dampak – Solusi**, sesuai dengan prinsip evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong sangat krusial karena menjadi dasar yang objektif dalam pembuatan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja kedepan, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meminimalkan risiko kegagalan kebijakan.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu (kejuruan, literasi-numerasi, dan pendidikan inklusif)	Rendahnya capaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.	Peningkatan pelatihan guru berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.
Distribusi guru belum merata antar wilayah.	Kualitas lulusan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan dunia kerja.	Redistribusi guru dan pemenuhan formasi sesuai peta kebutuhan.
Kapasitas guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi masih terbatas.	Pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum optimal.	Penguatan komunitas belajar guru dan pendampingan berkelanjutan.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan regulasi pusat yang relatif cepat (kurikulum, asesmen, standar pendidikan)	Satuan pendidikan dan daerah tidak siap melaksanakan kebijakan secara optimal.	Penguatan sosialisasi dan pendampingan kebijakan secara berjenjang.

Masalah	Dampak	Solusi
Waktu transisi kebijakan yang terbatas.	Pelaksanaan program kurang seragam.	Penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi kebijakan daerah.
Petunjuk teknis pelaksanaan sering terbit mendekati waktu implementasi.	Capaian indikator kinerja belum maksimal.	Penyesuaian perencanaan daerah secara bertahap dan terukur.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Belum meratanya kompetensi aparatur dalam perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaporan dan evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang belum optimal sehingga mempengaruhi capaian indikator	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), dan pendampingan berkelanjutan
Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pemahaman teknis terhadap indikator kinerja dan sistem aplikasi	Proses input dan validasi data kinerja belum tepat waktu dan akurat	Penugasan SDM secara lebih proporsional serta penguatan peran admin dan penanggung jawab data kinerja
Mutasi dan rotasi pegawai	Menurunnya produktivitas karena waktu penyesuaian yang lama dan dapat meningkatkan risiko kesalahan kerja	Penguatan mekanisme serah terima tugas serta dokumentasi administrasi dan data kinerja yang lebih sistematis

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari wilayah kepulauan	Pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara merata dan membutuhkan waktu serta biaya lebih besar	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan koordinasi jarak jauh dengan kabupaten/kota
Keterbatasan akses infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi di beberapa wilayah	Pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan di lapangan mengalami keterlambatan	Penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan
Faktor sosial dan ekonomi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam program pendidikan belum optimal	Peningkatan sosialisasi program dan sinergi dengan pemangku kepentingan

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Terjalannya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.
- Sinergi lintas sektor dengan instansi vertikal, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta lembaga pelatihan dalam mendukung vokasi pendidikan.
- Koordinasi internal antarbidang dalam pemeliharaan mutu pembelajaran, pengelolaan Asesmen Nasional, serta pemantauan literasi dan numerasi.
- Kolaborasi dengan lembaga adat, komunitas budaya, dan pemangku kepentingan kebudayaan.
- Penguatan koordinasi kelembagaan dalam penerapan SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

b. Faktor Inovasi

- Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan mutu literasi dan numerasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan data pendidikan dan layanan inklusif.
- Inovasi pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan DUDI.
- Penguatan inovasi pelatihan iklim satuan pendidikan (keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas).
- Pengembangan integrasi pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan Indeks Kemajuan Kebudayaan.

c. Faktor Komitmen

- Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan.
- Konsistensi dukungan kebijakan dan penganggaran sektor pendidikan dan kebudayaan.
- Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
- Komitmen pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
- Dukungan pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja.

3.3 Ringkasan Analisis

Upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan memerlukan intervensi berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah. Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong

yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah yaitu :

1. Peningkatan pelatihan guru berbasis kebutuhan riil satuan Pendidikan
2. Redistribusi guru dan pemenuhan formasi sesuai peta kebutuhan
3. Penguatan komunitas belajar guru dan pendampingan berkelanjutan
4. Penguatan sosialisasi dan pendampingan kebijakan secara berjenjang
5. Penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi kebijakan daerah
6. Penyesuaian perencanaan daerah secara bertahap dan terukur
7. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), dan pendampingan berkelanjutan
8. Penugasan SDM secara lebih proporsional serta penguatan peran admin dan penanggung jawab data kinerja
9. Penguatan mekanisme serah terima tugas serta dokumentasi administrasi dan data kinerja yang lebih sistematis
10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan koordinasi jarak jauh dengan kabupaten/kota
11. Penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan
12. Peningkatan sosialisasi program dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Persentase Realisasi pendapatan terhadap target tidak tercapai disebabkan oleh: 1. Tidak tercapai target PAD di Labkesda NTT antara lain karena pengadaan reagen terlambat dan Laboratorium Klinik semakin banyak mengakibatkan tingginya persaingan tarif dan pelayanan; 2. Tidak tercapai target PAD di Latnakes NTT karena adanya efisiensi anggaran dari Pusat,	Mempengaruhi capaian target PAD untuk Dinas Kesehatan	Strategi Labkes untuk mencapai target PAD 2026: 1. Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium & Reagensia pada awal tahun sehingga pelayanan selalu tersedia 2. Pengusulan Perda Tarif agar semua parameter pelayanan di labkes sesuai standar 3. Melakukan PKS dengan stakeholder potensial seperti BPJS & MCU Pekerja Migran 4. Menjadikan Labkes sebagai BLUD

Masalah	Dampak	Solusi
Provinsi s/d kabupaten/kota sehingga jumlah pelatihan yang bisa dilaksanakan di berkurang. Metode pelaksanaan pelatihan pun Sebagian besar berubah dari full luring menjadi blended learning (daring luring). Sarana Prasarana juga banyak yang rusak dan butuh pemeliharaan (Kamar, AC Aula maupun Kamar, Kamar Mandi, Plafon)		5. Memperkuat Promosi Layanan Labkes dan Membuka Pelayanan Labkes Sore/malam Strategi Latnakes untuk mencapai target PAD 2026: 1. Menyusun kalender pelatihan tematik tahunan berdasarkan isu prioritas daerah. Menargetkan minimal 8 siklus pelatihan dalam setahun dengan segmentasi peserta Tenaga Profesi Kesehatan yang ada di daerah. Menyusun paket pelatihan berjenjang dengan tarif dan durasi berbeda. 2. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas dengan menyewakan ruang kelas, dan asrama kepada pihak ketiga. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi lain, organisasi profesi kesehatan, dan perguruan tinggi. Melakukan promosi melalui media sosial, surat edaran, dan forum koordinasi Kesehatan, website. 3. Mengusulkan perbaikan fasilitas, belanja modal (AC) dan pemeliharaan sarana prasarana.
Persentase Realisasi penyerapan Anggaran APBD tidak tercapai disebabkan oleh: 1. Pencatatan dan pelaporan masih berproses, BLUD RSUD Johannes belum selesai Rekonsiliasi; 2. Pelaksanaan Kegiatan mundur dan dimulai di Bulan Mei 2025 dikarenakan adanya pergeseran I untuk	Menurunnya akuntabilitas Dinas Kesehatan	1. Menyelesaikan pencatatan dan pelaporan tepat waktu; 2. Merincikan aktifitas DAU SG dan DAK Non Fisik di DPA murni 2026, sehingga awal tahun kegiatan sudah mulai bisa dilaksanakan.

Masalah	Dampak	Solusi
merincikan DAK Non Fisik dan DAU SG ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya karena Uang Persediaan terbatas. Ketika kegiatan menumpuk di akhir tahun, kas tidak mampu mencukupi permintaan pembayaran yang bersamaan; 3. Sebagian Besar Sisa Anggaran adalah antara lain SILPA Gaji ASN, Gaji Tenaga Kontrak, Kontribusi dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, BLUD RSUD Johannes.		
Persentase Puskesmas Terakreditasi tidak mencapai target dikarenakan ada 1 puskesmas yang belum keluar hasil akreditasinya, dan 3 puskesmas baru yang belum memenuhi syarat akreditasi.	Menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	Pendampingan dan pembinaan kepada puskesmas baru untuk persiapan akreditasi perdana
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi tidak mencapai target dikarenakan dari 69 RS (65 wajib akreditasi, 4 RS belum wajib karena RS pratama baru), 63 lulus akreditasi, 1 tidak lulus dan 1 persiapan akreditasi	Menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Pendampingan dan pembinaan kepada RS persiapan akreditasi perdana bagi RS Baru dan re akreditasi bagi yang tidak lulus
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program imunisasi rutin lengkap tidak mencapai target dikarenakan : 1. Indikator yang tercapai sesuai definisi operasional hanya 1 indikator; 2. Ketersediaan vaksin yang terbatas (menunggu drop dari	Terdapat anak, WUS, dan Ibu Hamil yang tidak memperoleh Imunisasi Baduta Lengkap (IBL), Imunisasi Antigen Baru, Imunisasi Anak Sekolah, serta status Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) ibu hamil (T2+).	1. Permintaan Vaksin stok opname ke pusat tiap bulan; 2. Permintaan realokasi vaksin antar provinsi, kab/kota, dan antar puskesmas.

Masalah	Dampak	Solusi
Pusat) dan masa berlaku vaksin yang singkat; 3. Pencatatan pelaporan vaksin belum akurat akibat SDM dan sistem;		
Prevalensi Balita Stunting masih tinggi karena masih menggunakan angka prevalensi stunting tahun 2024. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 baru akan dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada pertengahan tahun 2026.	Angka prevalensi stunting masih belum ada perubahan	1. Pengadaan PMT yang optimal pada balita gizi kurang; 2. Perlu advokasi rutin kepada kepala desa untuk mengalokasikan anggaran bagi balita & bumil KEK sesuai dengan Permendes No. 22 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan minimal 3 dari 6 indikator penyehatan lingkungan belum tercapai sesuai target dikarenakan di pertengahan tahun ada perubahan regulasi terkait indikator tersebut dari Kemenkes sehingga hanya 3 kabupaten yang sudah melaksanakan indikator tersebut.	Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak menerapkan indikator penyehatan lingkungan	Untuk perencanaan kedepan perlu memasukkan indikator dari Kemenkes sesuai dengan regulasi terbaru
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pengawasan Binwas Mutu tidak tercapai, dari target 22 kab/kota hanya dilaksanakan pada 16 kab/kota dikarenakan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan langsung ke Kab/Kota melalui perjalanan dinas. Perjalanan dinas ke 6 Kab tidak dapat dilaksanakan karena adanya penumpukan kegiatan di akhir tahun dan kas tidak mampu mencukupi permintaan pembayaran	Menurunnya standar kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota	Untuk Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan, pembinaan dilakukan secara daring namun kurang optimal karena tidak bisa pengawasan langsung. Pengawasan langsung terhadap SDMK ini sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas pelayanan Kesehatan, pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan beretika sehingga menjamin keamanan dan keselamatan pasien.

Masalah	Dampak	Solusi
yang bersamaan (sinkron dengan indicator persentase penyerapan APBD)		
Presentase peralatan laboratorium kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar tidak mencapai target karena adanya perubahan rencana kegiatan yang pada awalnya direncanakan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kota kupang namun karena tidak sesuai spesifikasi, perencanaan penganggaran diubah menjadi BPAFK Surabaya. DPA Perubahan terbut di Bulan November sehingga waktu tidak cukup untuk proses kalibrasi dilakukan	Menurunnya kualitas dan keakuratan pengukuran dalam pelayanan kesehatan	Pada Perencanaan dan Penganggaran TA 2026 sudah menggunakan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) di Surabaya
Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang di tingkatkan kapastitasnya tidak mencapai target dikarenakan adanya pergeseran anggaran.	Menurunnya kualitas pelayanan di Laboratorium Kesehatan	Akan dilaksanakan di tahun 2026
Jumlah Dokter Pelayanan medik spesialis dasar yaitu Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi dan Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik di RSKD Jiwa Naimata, indicator ini tidak tercapai karena peraturan BKN tidak boleh mengangkat pegawai selain ASN (PNS dan PPPK), dokter spesialis ASN belum ada yang tertarik mengabdikan di RSKD Jiwa Naimata.	Pelayanan kesehatan di RSKD Jiwa Naimata kurang maksimal	Penganggaran Insentif Dokter Spesialis lewat BLUD diharapkan dapat meningkatkan peluang adanya dokter spesialis yang mengabdikan pada RSKD Jiwa Naimata.

Masalah	Dampak	Solusi
Tidak tercapainya SPM Rumah Sakit di tahun 2025 yakni baru mencapai 79 indikator atau 82% dari 95 indikator SPM yang ada, disebabkan karena: 1. SOP yang ditetapkan belum secara konsisten dilaksanakan 2. Terdapat beberapa indikator yang tidak didukung fasilitas yang memadai	Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kurang maksimal	1. Dari 95 indikator akan diterbitkan SOP dan wajib dilaksanakan secara konsisten; 2. Akan memenuhi beberapa fasilitas agar memadai berdasarkan BLUD;
Presentase SDM RSUD Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya belum mencapai target dikarenakan : 1. Jumlah tenaga kesehatan sangat banyak; 2. Minimnya anggaran melakukan peningkatan SDM.	Menurunnya kualitas pelayanan di Rumah Sakit	Pelatihan secara daring, <i>in house training</i> oleh RSUD.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Pergeseran dan perubahan anggaran daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap perubahan harus melalui tahapan administratif dan persetujuan berjenjang, termasuk persetujuan DPRD, yang memakan waktu dan tidak dapat dilakukan secara cepat untuk merespons kebutuhan mendesak.	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	1. Meminimalisir ketidaksesuaian dan kesalahan pada penginputan penganggaran murni. 2. Mengusulkan standar harga yang tidak ada dalam SIPD
Adanya Perubahan Regulasi pada level Kementerian Kesehatan yang mengakibatkan perubahan perhitungan indikator.	Mempengaruhi Perhitungan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan	Indikator Kinerja mengikuti Rancangan Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang sudah selaras dari Pusat sampai Kab/Kota
Regulasi BKN yang tidak memungkinkan perekrutan Dokter Spesialis Kontrak pada RSKD Jiwa Naimata	Ketidaktersediaan dokter spesialis dasar dan penunjang medik di RSKD Jiwa Naimata	Menganggarkan insentif Dokter Spesialis dari anggaran BLUD

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM layanan Kesehatan di beberapa kab/kota	Kualitas dan kecepatan layanan belum merata	Melanjutkan program peningkatan kapasitas SDM, baik yang bersertifikat maupun tidak
Distribusi dan penyebaran tenaga Kesehatan yang belum sesuai kebutuhan	Terdapat beberapa fasilitas Kesehatan tidak ada tenaga kesehatan tertentu	Mendorong pemerintah kab/kota untuk memetakan dengan baik kebutuhan tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan
Tinggi beban kerja SDM Kesehatan dalam pelayanan .	Pelayanan kesehatan tidak maksimal pada masyarakat	Mendorong pemerintah kab/kota untuk menambah SDM kesehatan

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan dukungan anggaran daerah di beberapa kab/kota	Belum optimal pemanfaatan layanan kesehatan	Mengintegrasikan KIE melalui berbagai media
Adanya masyarakat yang tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan	Tingginya kasus kesakitan dan kematian	Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga lainnya

3.2 Ringkasan Analisis

Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 adalah 98,41% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks tersebut dihitung dari pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi yaitu Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi dan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa Provinsi. Untuk persentase penerima layanan 2 indikator tersebut tercapai 100%, sedangkan untuk mutu (Barang, Jasa dan SDM) yang tidak tercapai pada aspek sarana dan prasarana pada pra krisis Kesehatan yaitu Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana (peserta/Masyarakat) yang hanya sebesar 18,41%.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah yaitu:

1. Strategi Labkes untuk mencapai target PAD 2026:
 - a. Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium & Reagensia pada awal tahun sehingga pelayanan selalu tersedia
 - b. Pengusulan Perda Tarif agar semua parameter pelayanan di labkes sesuai standar
 - c. Melakukan PKS dengan stakeholder potensial seperti BPJS & MCU Pekerja Migran

- d. Menjadikan Labkes sebagai BLUD
- e. Memperkuat Promosi Layanan Labkes dan Membuka Pelayanan Labkes Sore/malam
2. Pendampingan dan pembinaan kepada puskesmas baru untuk persiapan akreditasi perdana
3. Perlu advokasi rutin kepada kepala desa untuk mengalokasikan anggaran bagi balita & bumil KEK sesuai dengan Permendes No. 22 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 202
4. Menganggarkan insentif Dokter Spesialis dari anggaran BLUD
5. Melanjutkan program peningkatan kapasitas SDM, baik yg bersertifikat maupun tidak
6. Mendorong pemerintah kab/kota untuk memetakan dgn baik kebutuhan tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan dan menambah SDM Kesehatan
7. Mengintegrasikan KIE melalui berbagai media
8. Memperkurat peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga lainnya.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Cipta Karya	Belum tersedia rencana induk untuk program sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) regional	Tidak dapat melaksanakan penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat di lokasi kewenangan provinsi	Penyusunan Rencana Induk Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), Rencana Induk Rencana Induk Pengelolaan Persampahan (RISPP), Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan/Master Plan Drainase
	Belum ada penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Kesulitan menentukan bangunan gedung mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan baru, rehabilitasi, atau peningkatan fungsi karena belum ditetapkan sebagai bangunan strategis daerah	Melakukan pendataan bangunan gedung milik provinsi melalui intervensi sub kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
	K/L/OPD yang mengajukan rekomendasi biaya pembangunan sering mepet waktunya dengan deadline pengajuan anggaran	Pemberian rekomendasi biaya pembangunan belum optimal karena belum dilakukan peninjauan lapangan secara langsung oleh tim teknis	Menjadikan hasil peninjauan lapangan (berita acara, dokumentasi, dan rekomendasi teknis) sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen rekomendasi biaya
UPTD SPAM	Belum adanya Kerjasama Pelayanan Air Minum antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab. kupang/ Kota Kupang	Penyelenggaraan pelayanan air minum lintas wilayah belum terintegrasi dan tidak memiliki dasar kerja sama yang jelas	Memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pelayanan air minum lintas wilayah
	UPTD SPAM belum memiliki Generator Set (Genset) untuk menghidupkan Pompa. Jika terjadi pemadaman Listrik di Tilog (Pengolahan) dan Tulun(WTP) maka UPTD SPAM tidak dapat mengoprasikan pompa tersebut.	Pelayanan air minum kepada Masyarakat menjadi terhambat	Perlu dilakukan pengadaan Generator Set (Genset) untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman listrik, makan operasional pompa dapat dilakukan menggunakan Genset
	UPTD SPAM Belum memiliki Reservoir Induk, sehingga Sistem Pelayanan UPTD SPAM merupakan Sistem Distribusi langsung (dari pipa 16" ke pipa ½")	Tingginya biaya operasional, khususnya biaya listrik, serta sering terjadinya kebocoran pada pipa distribusi utama menyebabkan pelayanan air minum belum dapat dilakukan secara kontinu 1x24 jam	Perlu membangun Reservoir Induk di wilayah Petuk sebesar 5.000 M3 sebagai penyeimbang Sistem Distribsui Air Minum curah sehingga pelayanan dapat dilakukan secara Gravitasi 1 x 24 Jam
Penataan Ruang	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyusunan Rencana Tata Ruang pada kabupaten/kota	Proses penyusunan dokumen RTRW/RDTR kabupaten/kota tidak optimal dan berpotensi tidak selaras dengan kebijakan tata ruang provinsi dan nasional	Penerapan mekanisme pendampingan bertahap sejak awal proses penyusunan dokumen melalui system daring dan luring
	Terbatasnya pemahaman SDM Bidang Penataan Ruang dalam melakukan	Kualitas pemberian bimbingan teknis kepada Kabupaten/ Kota dalam	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang penataan ruang

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
	bimbingan teknis penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	penyusunan RTRW tidak maksimal	
	Kurangnya dukungan anggaran untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah	Keterbatasan pengendalian menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTR sulit dicegah sejak dini	Menetapkan lokasi dan kegiatan pengendalian yang paling berdampak untuk memaksimalkan keterbatasan anggaran
	Tidak adanya dokumen teknis berupa RDTR pada Kawasan Strategis Provinsi	Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Strategis Provinsi tidak memiliki dasar operasional yang jelas	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Provinsi sebagai dokumen teknis pengendalian pemanfaatan ruang
Bina Konstruksi	Kualitas perencanaan teknis (DED) masih rendah dan kurang adaptif terhadap kondisi geografis NTT	Mutu pekerjaan konstruksi rendah dan tidak berumur panjang.	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kondisi lokal
	Keterbatasan alat berat dan teknologi konstruksi pada badan usaha lokal.	Terjadi keterlambatan pekerjaan dan pembengkakan biaya	Fasilitasi akses alat dan teknologi konstruksi bagi BUKJ lokal.
	Pengawasan teknis belum optimal, terutama di lokasi terpencil.	Rendahnya Mutu Pekerjaan Konstruksi dan Berdampak pada implikasi hukum	Penguatan pengawasan teknis melalui pendampingan dan pelibatan tenaga ahli daerah.
Perumahan dan Permukiman	Terdapat perbedaan data antara OPD teknis (PUPR, BPBD, Bappeda, Dukcapil) terkait lokasi, jumlah rumah terdampak, dan tingkat kerawanan	Identifikasi rumah terdampak dan kawasan rawan bencana menjadi tidak akurat, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam penentuan lokasi prioritas penanganan	Melaksanakan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian data spasial dengan kondisi aktual
	Belum tersusunnya perda RP3KP sebagai pedoman Bidang PKP	Perencanaan dan penganggaran program PKP tidak optimal, karena belum mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah-panjang yang ditetapkan melalui Perda	Menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Bina Marga	Target kemantapan jalan provinsi tidak tercapai karena efisiensi anggaran menyebabkan kebutuhan minimal pemeliharaan kemantapan jalan eksisting saja belum terpenuhi, sementara tuntutan peningkatan kemantapan jalan terus meningkat dan tidak linear dengan ketersediaan anggaran	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tidak mencapai target RKPD dan Renstra	Penajaman prioritas penanganan ruas berbasis fungsi pelayanan dasar dan ekonomi, serta penguatan usulan pendanaan melalui DAK, Inpres Jalan Daerah (IJD), dan sumber pendanaan lainnya
	Cuaca ekstrem dan kondisi geografis berat, antara lain longsoran dan kerusakan segmen Ikanfoti pada ruas Oelomin–Baun (Kab. Kupang) serta longsoran pada segmen Letelangga dan Nggelak ruas Ba’a–Batutua (Kab. Rote Ndao)	Penanganan kerusakan tidak dapat dilaksanakan karena biaya mobilisasi tinggi, material on site tidak efisien, dan keterbatasan anggaran	Penyusunan perencanaan teknis adaptif sesuai kondisi geografis, pengaturan jadwal mobilisasi yang realistis, serta penanganan bertahap sesuai kemampuan anggaran
	Karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan akses logistik ke lokasi pekerjaan	Biaya konstruksi tinggi dan waktu mobilisasi panjang sehingga volume penanganan terbatas	Optimalisasi perencanaan berbasis lokasi, penjadwalan pekerjaan sesuai musim, dan pemanfaatan penyedia serta material lokal
Sumber Daya Air	Sedimentasi pada Tampungan Embung dan Kerusakan bangunan utama	Kapasitas tampungan embung berkurang, Umur layanan embung menurun dan Distribusi air menjadi tidak optimal	Pengerukan sedimen secara berkala dan dilakukan Perencanaan rehabilitasi kerusakan bangunan utama
	Pertumbuhan Gulma dan Vegetasi Liar	Menghambat aliran air, Mempercepat sedimentasi dan Menurunkan kualitas air	Pembersihan gulma secara berkala, pengendalian dan Penanaman vegetasi penutup lereng yang sesuai
	Kurangnya anggaran untuk Kegiatan	Kondisi prasarana dan sarana	Alokasi anggaran OP secara berkelanjutan

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
	Operasi dan Pemeliharaan Rutin	infrastruktur menurun akibat keterbatasan pemeliharaan rutin	dan Pelatihan petugas OP
	Sedimentasi dan kerusakan pada Saluran dan Bangunan Irigasi	Kinerja embung menurun dan Biaya rehabilitasi menjadi lebih tinggi	Pengerukan dan pembersihan sedimen secara berkala
	Alokasi dana OP yang terbatas dan Ketergantungan pada anggaran pemerintah	Penurunan kapasitas aliran saluran, Distribusi air irigasi tidak merata dan Meningkatnya risiko luapan dan kerusakan saluran	Optimalisasi penggunaan anggaran OP, Pelibatan P3A dalam pemeliharaan rutin dan Pengusulan anggaran berbasis kebutuhan prioritas
	Dalam Pembangunan Sumur Bor terhambat Kondisi Geologi dan Hidrogeologi berupa Lapisan batuan keras (batuan beku/batuan padas)	Risiko kegagalan pengeboran dan tidak ditemukannya akuifer produktif	Melakukan survei hidrogeologi dan geolistrik ulang sebelum dilakukan pengeboran yang baru
	Sering terjadi kerusakan alat bor	kerusakan alat Menyebabkan keterlambatan pekerjaan	Menyiapkan alat bor sesuai spesifikasi geologi, Melakukan perawatan alat secara rutin, Melibatkan tenaga teknis berpengalaman
	Akses dan Kondisi Lokasi Pekerjaan yang sulit dicapai	Keterlambatan mobilisasi alat dan material serta biaya operasional meningkat	Penyesuaian jadwal kerja dengan kondisi lapangan
	Ketersediaan dan Kualitas Material yang tidak sesuai spesifikasi	Kualitas pekerjaan kurang	Pengawasan kualitas material di lapangan, bila perlu dilakukan pekerjaan ulang dengan material baru yang sesuai spesifikasi
	Data kondisi saluran dan bangunan tidak mutakhir serta Peta jaringan irigasi yang tidak sesuai kondisi eksisting	Desain rehabilitasi tidak tepat sasaran	Survei teknis detail dan inventarisasi jaringan, Pemutakhiran peta dan basis data irigasi, dan Verifikasi lapangan sebelum penetapan desain akhir

b. Faktor Regulasi

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Cipta Karya	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memberi Kewenangan utama penyelenggaraan bangunan gedung berada pada pemerintah kabupaten/kota	Pemerintah provinsi terbatas ruang intervensinya, khususnya untuk penataan bangunan gedung non-strategis.	Penguatan peran pembinaan dan fasilitasi teknis kepada kabupaten/kota
	Belum ada Perda/Keputusan Gubernur tentang daftar bangunan gedung strategis provinsi	Ketidakjelasan dasar hukum pelaksanaan program penataan bangunan gedung oleh provinsi	Penegasan ruang lingkup kewenangan provinsi melalui Penyusunan dan penetapan regulasi daerah sebagai dasar kewenangan provinsi
UPTD SPAM	Regulasi terkait dengan UPTD SPAM masih belum semua memahami karena UPTD SPAM mempunyai regulasi yang berkaitan dengan BLUD (Permendagri 79 Tahun 2018)	Masih adanya pemahaman tentang UPTD SPAM sama seperti UPTD pada umumnya (Permendagri 12 Tahun 2017)	Perlu disosialisasikan kepada semua stakeholder agar memiliki pemahaman yang sama tentang UPTD yang pengelolaan keuangannya menggunakan sistem BLUD
Penataan Ruang	Penerapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membatasi ruang penyusunan RDTR Kawasan Strategis Provinsi	Kewenangan penyusunan RDTR lebih difokuskan pada RDTR kabupaten/kota sebagai dasar perizinan berusaha	Penegasan peran RDTR Provinsi sebagai pedoman pengendalian ruang dan sinkronisasi lintas kabupaten/kota
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Peran provinsi lebih pada koordinasi dan pembinaan, bukan eksekusi langsung sehingga Provinsi kesulitan memastikan seluruh program lintas OPD dan lintas wilayah benar-benar selaras RTR	penguatan instrumen regulasi daerah, integrasi SPPR ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi peran provinsi melalui mekanisme rekomendasi teknis dan forum koordinasi lintas wilayah guna memastikan keselarasan program pembangunan dengan RTR.
Bina Konstruksi	Belum adanya Peraturan Daerah Jasa Konstruksi di Provinsi NTT yang terintegrasi dengan	Implementasi ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta	penyusunan Perda Jasa Konstruksi yang selaras dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru guna memperkuat peran

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
	Undang-undang Jasa Konstruksi yang terbaru	peraturan turunannya belum sepenuhnya teradopsi dalam kebijakan daerah	pemerintah provinsi dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan jasa konstruksi daerah
Perumahan dan Permukiman	Belum tersusunnya perda RP3KP sebagai pedoman Bidang PKP	Perencanaan dan penganggaran program PKP tidak optimal, karena belum mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah-panjang yang ditetapkan melalui Perda	Menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Bina Marga	Peraturan Gubernur terkait retribusi pemanfaatan utilitas jalan yang direncanakan masuk dalam Ranperda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum ditindaklanjuti	Potensi sumber pendanaan tambahan untuk pengadaan leger jalan, inventarisasi jalan provinsi, dan pengawasan perkembangan fisik jalan belum dapat dimanfaatkan	Percepatan penetapan regulasi retribusi utilitas jalan dan optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung pengelolaan jalan provinsi secara akurat dan mutakhir
Sumber Daya Air	Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Dimana Peran masyarakat (P3A/GP3A/IP3A) lebih sebagai mitra pendukung, bukan pelaksana utama	Respons terhadap kerusakan dan pemeliharaan jaringan irigasi lambat	Menguatkan kapasitas teknis dan manajerial P3A melalui bimbingan teknis, sertifikasi pengelola irigasi, dan pendampingan lapangan
	Permendagri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan APBD , dimana intervensi kegiatan O&P bersifat rutin dan sering bukan prioritas utama dibanding pembangunan fisik	Pemeliharaan jaringan irigasi dan embung tidak optimal	Menetapkan alokasi dana rutin minimal untuk O&P setiap tahun dalam APBD provinsi

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Cipta Karya	Keterbatasan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan sertifikasi
UPTD SPAM	Keterbatasan Personil perencana di UPTD SPAM	Perencanaan pengembangan yang terhambat.	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana
	Keterbatasan Tenaga Teknis khususnya bagian panel listrik dan pompa	Perbaiki : Bila terjadi kerusakan pada panel listrik dan pompa maka harus menggunakan Jasa Pihak Ketiga	Peningkatan Kapasitas dalam hal ini Pendidikan dan pelatihan SDM.
Penataan Ruang	Kurangnya pemahaman SDM aparatur Bidang Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam pengisian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aplikasi SiWASTEK.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi NTT tergolong sedang – rendah.	Melakukan Pendidikan dan pelatihan SDM dan pendampingan kepada Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Bina Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih terbatas	Produktivitas tenaga kerja rendah	Program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara masif
	Rendahnya minat tenaga muda pada sektor konstruksi	Kualitas hasil pekerjaan tidak konsisten.	Kerja sama dengan SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan.
	Kesenjangan kompetensi antara kebutuhan proyek dan kemampuan tenaga kerja lokal	Masuknya tenaga kerja dari luar daerah	Pengaturan persyaratan penggunaan tenaga kerja lokal
Perumahan dan Permukiman	Keterbatasan jumlah fungsional perencana	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana
Bina Marga	Sebagian SDM teknis belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang jalan dan jembatan	Pengendalian mutu pekerjaan belum optimal pada beberapa paket kegiatan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi kompetensi
	Proporsi jabatan Penata Kelola Jalan dan Jembatan yang kompeten belum ideal, misalnya hanya terdapat satu Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pengendalian teknis pada seluruh paket pekerjaan	Penambahan dan penguatan SDM fungsional jalan dan jembatan sesuai kebutuhan organisasi

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Sumber Daya Air	Keterbatasan Kapasitas ASN bidang SDA Manajerial dan Pengelolaan AIR irigasi	Proses pendampingan dan pembekalan pada P3A tidak Optimal	Melakukan pembekalan dari kementerian PUPR direktorat Sumber Daya Air. Membuat sertifikasi keahlian bagi P3A

d. Faktor Eksternal

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
Cipta Karya	Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
UPTD SPAM	Belum adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah terkait Aset Jaringan Distribusi Utama	Kurangnya informasi terkait Kepemilikan Aset Jaringan Distribusi Utama (JDU)	Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tentang Kepemilikan dan pengelolaan Aset
Penataan Ruang	Tidak semua pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan sosialisasi Perda RTRW Provinsi	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi NTT menjadi kurang maksimal	Menyampaikan hardcopy dan softcopy Perda RTRW Provinsi NTT kepada pemangku kepentingan serta penyampaian informasi tata ruang melalui media social (Youtube, Tiktok, Instagram dan Facebook)
	Belum lengkapnya dokumen administrasi sebagai salah satu persyaratan pembahasan FPR Provinsi	Keputusan dan rekomendasi FPR menjadi kurang efektif	Membuat SOP administrasi FPR, termasuk batas waktu pengumpulan dokumen dan persyaratan minimal
Bina Konstruksi	Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur pendukung.	Biaya konstruksi menjadi lebih mahal.	Optimalisasi pemanfaatan material lokal yang memenuhi standar.
	Fluktuasi harga material akibat biaya transportasi tinggi.	Risiko keterlambatan pekerjaan meningkat.	Perencanaan logistik proyek yang lebih matang.
	Ketergantungan pada pasokan material dari luar daerah	Efisiensi pelaksanaan proyek rendah.	Penguatan industri bahan bangunan lokal.
Perumahan dan Permukiman	Keterbatasan Koordinasi Lintas Sektoral	Data dan Informasi yang disampaikan	Perlu adanya Komunikasi yang

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
		tidak sesuai dan akurat	intens antara pimpinan OPD Terkait
Bina Marga	Paket-paket luncuran akhir tahun diberikan dengan jangka waktu pelaksanaan yang terbatas dan tidak seimbang dengan beban kerja fisik	Pelaksanaan pekerjaan kurang optimal dan berpotensi menurunkan kualitas hasil	Penjadwalan ulang paket pekerjaan dan pengendalian perencanaan waktu pelaksanaan yang lebih realistis
	Pelaksanaan survei kondisi jalan dilakukan pada akhir tahun anggaran yang bertepatan dengan musim hujan, khususnya pada ruas dengan kondisi geografis ekstrem dan sulit dijangkau (misalnya Kabupaten Kupang)	Data kondisi jalan kurang detail dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi eksisting sebagai dasar perencanaan	Penataan ulang jadwal survei kondisi jalan dengan mempertimbangkan musim dan alokasi waktu survei yang memadai untuk pengambilan data teknis secara detail
	Keterlambatan penandatanganan kontrak paket pekerjaan fisik	Waktu pelaksanaan berkurang dan berdampak pada capaian kinerja fisik dan keuangan	Percepatan proses administrasi pengadaan dan penguatan koordinasi lintas unit
Sumber Daya Air	Pada Indikator Luas Areal Irigasi Fungsional permasalahannya antara lain Cuaca ekstrem (hujan, banjir) dan Gangguan sosial (konflik lahan, sengketa akses) yang menghambat pekerjaan	Pengerjaan tertunda, Kualitas bangunan menurun dan Biaya membengkak	Antisipasi dan Penjadwalan proyek sesuai musim, Mediasi dan sosialisasi dengan masyarakat
	Pada Indikator Luas Areal Irigasi Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan kehadiran pemangku kepentingan permasalahannya antara lain Kondisi geologi sulit atau tidak sesuai prediksi survey geo listrik untuk pembangunan Sumur Bor, Faktor Cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaan Pekerjaan (Hujan, banjir)	Proyek tertunda, Sumur bor gagal atau rusak cepat sampai Kualitas air menurun	Survei geologi awal secara akurat dan Penjadwalan kegiatan sesuai musim
	Pada Indikator Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air	Kapasitas embung menurun, Air tidak tersedia optimal	Perencanaan penyimpanan air jangka panjang,

Bidang	Masalah	Dampak	Solusi
	Baku permasalahannya antara lain Musim kemarau panjang sehingga inflow rendah, Sedimentasi akibat hujan deras dan Gangguan masyarakat (pemanfaatan air tanpa izin)	untuk irigasi/pemanfaat lain, Konflik penggunaan air	Normalisasi dan pemeliharaan sedimentasi rutin, Edukasi masyarakat dan pengawasan partisipatif
	Pada Indikator Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Permasalahannya antara lain Curah hujan tinggi atau banjir menyebabkan kerusakan saluran, Pengrusakan jaringan irigasi oleh pihak eksternal, Gangguan lingkungan atau pembuangan limbah di saluran irigasi	Kebocoran dan kerusakan jaringan irigasi meningkat, Distribusi air terganggu, Produktivitas pertanian turun	Peningkatan tanggul dan perlindungan jaringan irigasi, Penegakan aturan penggunaan air dan Pengawasan lingkungan dan kebersihan saluran

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

• Penataan Ruang

1. Forum Penataan Ruang dalam Rangka Pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten berjalan efektif dan menghasilkan Berita Acara FPR;
2. Bimbingan dan supervisi percepatan penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota berjalan efektif;
3. Evaluasi pengisian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Kabupaten / Kota dimaksimalkan dengan konsultasi via daring;

• Bina Konstruksi

1. Penguatan forum koordinasi jasa konstruksi secara berkala;
2. Pemanfaatan sistem informasi bersama untuk pertukaran data dan informasi;

• Perumahan dan Permukiman

1. Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif;
2. Komunikasi yang efektif, kesamaan persepsi dan tujuan, struktur organisasi yang fleksibel;

• Bina Marga

1. Koordinasi antara Bidang Bina Marga dengan Ditjen Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dalam pengusulan Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk penanganan ruas jalan prioritas daerah 3T

2. Dukungan lintas sektor, antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam penanganan ruas jalan dan jembatan kewenangan provinsi
3. Koordinasi dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjangkau aspirasi masyarakat terkait kebutuhan penanganan dan pembangunan jalan serta jembatan prioritas
4. Forum lintas OPD berjalan efektif dalam pembahasan rencana pembangunan infrastruktur dan perencanaan anggaran Provinsi NTT

- **Sumber Daya Air**

1. Koordinasi antar Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi guna memastikan kegiatan fisik yang dilaksanakan diluar masa tanam atau saat air tidak dibutuhkan (masa bero), sehingga tidak mengganggu produksi pangan. Koordinasi dengan P3A dilakukan untuk menentukan titik kebocoran pada saluran atau pendangkalan akibat sedimen;
2. Koordinasi antara pemerintah, kontraktor dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sumur bor koordinasi dengan kontraktor guna menentukan titik lokasi sumur bor yang mempunyai potensi air tanah tinggi, sedangkan untuk pemerintah dan masyarakat dilakukan koordinasi untuk menentukan tata letak dan pembebasan lahan agar distribusi air digunakan secara adil;
3. Koordinasi dengan Badan Geologi atau ESDM dalam permintaan data peta Geologi untuk memastikan titik pengeboran berada pada zona yang memiliki potensi akuifer yang cukup dan tidak mengganggu sumur dangkal milik warga
4. Koordinasi antara operator embung dan Dinas PUPR dalam kegiatan OP dan Pemeliharaan Embung guna mengetahui kapan pintu air dibuka terutama pada musim kemarau panjang dan melakukan pembersihan disekitar embung guna mengurangi sedimen yang masuk ke tampungan embung
5. Koordinasi antara Dinas PUPR (Kegiatan e-PAKSI), Juru Pengairan, Pengamat Pengairan, Petugas Operasi Bendung dan Petugas Pintu Air dalam kegiatan OP dan Pemeliharaan Irigasi guna mengetahui kerusakan pintu air bangunan air dan saluran irigasi agar perbaikan bisa segera dianggarkan. Sedangkan dilakukan juga koordinasi antar pemerintah pusat dan kabupaten untuk memperjelas batas kewenangan daerah irigasi.

b. Faktor Inovasi

1. Melakukan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan serta masyarakat melalui media sosial baik face book, IG dan media cetak lainnya
2. Menciptakan atau membangun sistem informasi penataan ruang melalui website tata ruang
3. Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
4. Pengembangan website aduan masyarakat untuk pelaporan titik-titik kerusakan jalan dan jembatan sebagai bahan perencanaan responsif
5. Rencana pengembangan server khusus Bidang Bina Marga guna mempercepat pengelolaan dan pemanfaatan data kondisi jalan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
6. Faktor Inovasi dalam kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi berupa perencanaan berbasis GIS dan Drone Mapping agar perencanaan perbaikan lebih akurat dan mempersingkat waktu survey dan Inovasi berupa penggunaan satu peta digital yang sama (Single Map Policy) antara Dinas PUPR di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Dinas Pertanian untuk menentukan lokasi rehabilitasi berdasarkan data produktivitas lahan.
7. Faktor Inovasi dalam kegiatan pembangunan sumur bor berupa teknologi bor hemat energi dan ramah lingkungan guna mempercepat pembangunan tanpa merusak lingkungan dan koordinasi geo-database berupa integrasi data cekungan air tanah milik ESDM dengan peta kekeringan untuk menjamin titik bor memiliki potensi air yang berkelanjutan.
8. Faktor Inovasi dalam kegiatan OP dan Pemeliharaan Embung berupa monitoring digital pada embung untuk memantau tinggi muka air secara real-time, mengantisipasi kekeringan dan banjir serta mengatur distribusi air lebih cepat.
9. Faktor Inovasi dalam kegiatan OP dan Pemeliharaan Irigasi berupa monitoring digital pada bangunan irigasi untuk memantau debit aliran secara real-time dan deteksi kebocoran/pencurian air dan kerusakan saluran dari perubahan debit yang tidak normal.

c. Faktor Komitmen

1. Dukungan pimpinan daerah terhadap penyediaan air bersih untuk penurunan stunting
2. Dukungan kepala perangkat daerah dan kepala Balai PBPK NTT terkait bangunan gedung negara, air bersih, dan sanitasi
3. Dukungan Pemerintah Pusat dalam koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi NTT
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota dalam percepatan penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota

5. Integrasi program pengembangan jasa konstruksi dalam dokumen perencanaan daerah.
6. Dukungan pimpinan daerah terhadap pembangunan konektivitas wilayah sebagai prioritas pembangunan Provinsi NTT
7. Komitmen Bidang Bina Marga dalam pelaksanaan program prioritas, antara lain melalui penyusunan RKA berbasis matriks prioritas sehingga penanganan difokuskan pada ruas jalan dan jembatan yang paling dibutuhkan masyarakat
8. Komitmen koordinasi antara Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan sumur bor agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
9. Komitmen Bersama antara Dinas PUPR dan kelompok pengguna air dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan embung secara rutin dan terpadu sehingga dapat mengurangi sedimen.
10. Komitmen Bersama antara Dinas PUPR dan kelompok pengguna air dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi secara rutin dan terpadu sehingga dapat mengurangi kebocoran dan gagalnya produksi pangan

3.3 Ringkasan Analisis

Dinas PUPR memiliki 17 program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya alokasi anggaran, yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembangan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Perumahan, Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, serta Program Penetapan Tanah Ulayat. Diharapkan untuk tahun berikutnya agar anggaran dalam pelaksanaan program tersebut tetap direncanakan dan dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kinerja Dinas PUPR dan menjawab sasaran Pembangunan daerah

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan	Pada masyarakat /badan Hukum yang berkaitan dengan SPM	Perlu untuk mengalokasikan anggaran untuk merivisi

Masalah	Dampak	Solusi
Ketenteraman Masyarakat adalah tidak di anggarkan		SOP teknis untuk memenuhi Standar SPM
Sub kegiatan Penyedia Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah yakni Sudah di anggarkan pada DPA namun ada efesiensi anggaran	Pada masyarakat / badan Hukum atau Fasilitas Umum yang di radius 0.50	Satuan Polisi menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang terdampak di area Radius 0-50
Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yakni ➤ Pelaksanaan Uji Kompetensi yang di rencana 57 anggota sedangkan yang memenuhi uji Kompetensi 38 Orang ➤ Pelaksanaan kegiatan Diklat Dasar bagi anggota standar 30 orang sesuai standar BPSPDM sedangkan di DPA hanya 17 Orang ➤ Biaya Perjalanan Dinas Tim Pusat dan Honorarium tidak realisasikan sehingga anggaran di kembalikan ke Kas daerah ➤ Tidak anggaran untuk Sat Polpp prov NTT melakukan Pembinaan anggota linmas di kab/kota	Anggota Sat Polpp dan Anggota Linmas di kab Kota Sesuai Standar SPM	Satuan Polisi pamong Praja tetap menganggarkan kembali ➤ Uji kompetensi pejabat fungsional di tahun 2026 ➤ Satuan Polisi berkoordinasi mendapatkan data anggota linmas kab/kota

Masalah	Dampak	Solusi
Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah yakni anggaran perjalanan dinas Pegawai Bea Cukai kabupaten sisa di anggarkan di kembalikan ke kas daerah	Pada masyarakat yang melakukan Usaha dan badan usaha lainnya	Sat pol pp tetap berkoordinasi dengan pegawai bea Cukai sesuai wilayah
Sub kegiatan Penyusunan Dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yakni ketidktersediaan data informasi daerah , ketersediaan anggaran terbatas ,ketidak tersediaan biaya survei, keterbatasan tenaga Ahli , tidak ada anggaran untuk Forum diskusi Lintas sektor	Data masyarakat di kab/kota	Sat polpp Provinsi tetap berkoordinasi dengan kab /kota untuk mendapatkan data rawan kebakaran dan non kebakaran di kab/kota
Sub kegiatan Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran Dan Peta Rawan Kebakaran yakni ketidktersediaan data informasi daerah , ketersediaan anggaran terbatas ,ketidak tersediaan biaya survei, keterbatasan tenaga Ahli , tidak ada anggaran untuk Forum diskusi Lintas sektor	Data rawan kebakaran dan non kebakaran di kab /kota	Sat polpp Provinsi tetap berkoordinasi dengan kab /kota untuk mendapatkan data rawan kebakaran dan non kebakaran di kab/kota

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Satuan Polisi pamong Praja provinsi NTT sudah menganggarkan dalam Dokumen DPA namun, ketika efesiensi anggaran berpengaruh untuk tidak akomodir Sub kegiatan yang berdampak pada pelayanan standar minimal (SPM)	Peyananan masyarakat	Satuan polisi tetap melaksanakan sesuai fungsi tugas

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Peningkatan sumber daya aparatur	Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) Satpolpp dan anggota linmas	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan PKS internal dan sedangkan Anggota linmas berkoordinasi untuk mendapatkan data anggota linmas

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Masyarakat belum memahami fungsi tugas Satuan polisi pamong Praja	Pendapatan asli daerah	Satuan Polisi pamong Praja tetap melaksanakan sesuai fungsi tugas
Fungsi koordinasi masih lemah dalam berkoordinasi dengan Mitra atau stekholder lainnya	Pendapatan asli daerah	Satuan Polisi pamong Praja tetap melaksanakan sesuai fungsi tugas

3.2 Faktor Pendorong

- **Faktor Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Faktor Inovasi** : Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Faktor Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Merevisi SOP teknis terkait pemenuhan SPM
2. Menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang terdampak di area Radius 0-50
3. Mengalokasikan anggaran untuk Uji KOMPETENSI fungsional di tahun 2026
4. Berkoordinasi dengan kab /kota untuk mendapatkan data rawan kebakaran dan non kebakaran di kab/kota.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja	Penguatan sistem satu data daerah dan

Masalah	Dampak	Solusi
optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence based)	peningkatan koordinasi pengelolaan data bencana

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah petugas lapangan	Beban kerja tinggi dan menghambat pelayanan publik	Pembagian uraian tugas yang jelas serta pemberian pelatihan terkait pelaksanaan tugas di lapangan

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Inovasi** : Pemanfaatan aplikasi INATANA dalam pemantauan bencana)
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap Pembangunan berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.

3.3 Ringkasan Analisis Perangkat Daerah

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data bencana
2. Pembagian uraian tugas yang jelas serta pemberian pelatihan terkait pelaksanaan tugas di lapangan
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

6. Dinas Sosial Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
---------	--------	--------

Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral
---	---	--

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif dengan Bappeda

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan SDM (jumlah fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial)	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM pekerja sosial dan penyuluh sosial

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Inovasi** : Pemanfaatan Website Dinas Sosial
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah yaitu :

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral di bidang sosial untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada pekerja sosial dan penyuluh sosial.
5. **Peningkatan Kolaborasi:** Melakukan peningkatan kolaborasi dengan Lembaga non pemerintah (NGO/LSM)

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Belum terintegrasi bursa ketenagakerja	Data tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja tidak terupdate	Koordinasi dengan Kabupaten untuk update data
Tidak adanya anggaran di APBD untuk perencanaan transmigrasi	Dokumen kepemilikan lahan transmigrasi lambat diurus	Optimalkan dana APBN

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Kurangnya pengawas tenaga kerja	Tidak optimal pengawasan terhadap perusahaan	Optimalkan pengawas yang ada
Kurangnya fungsional pengantar kerja	Lambatnya penanganan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai prosedur	Optimalkan fungsional pengantar kerja yang ada

c. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Luas jangkauan pengawasan kabupaten/kota terbatas	Tidak semua perusahaan di kabupaten/kota yang terawasi	Koordinasi dengan kabupaten/kota

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Adanya dukungan APBN dan stakeholder terkait untuk sertifikasi kompetensi peserta.
- **Inovasi** : Adanya kerjasama dengan Satuan Pelayanan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah untuk tenaga kerja.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Perlu dioptimalkan aplikasi bursa tenaga kerja untuk update data penyerapan tenaga kerja

2. Perlu menambah formasi fungsional pengawas tenaga kerja dan pengantar kerja
3. Perlu dibangun gedung UPTD latihan kerja untuk optimalnya pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja
4. Perlu dibentuk UPTD pengawas tenaga kerja dan pengantar kerja di regional tertentu
5. Perlu dukungan APBD untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk program pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
6. Optimalkan kawasan transmigrasi yang sudah ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT juga sudah merespon Isu Gedsu yang telah dilaksanakan di kawasan transmigrasi untuk gender, lansia dan disabilitas

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Pelaksanaan sebagian kegiatan dilakukan secara daring (online) sehingga membatasi interaksi, diskusi mendalam, dan pendampingan teknis langsung kepada kabupaten/kota	Efektivitas transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas peserta belum optimal	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan secara luring untuk kegiatan strategis
Keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah kabupaten/kota, khususnya wilayah kepulauan dan daerah terpencil	Tidak seluruh sasaran dapat mengikuti kegiatan secara maksimal	Memperkuat materi pendukung (modul, rekaman video, bahan digital) yang dapat diakses ulang
Waktu pelaksanaan kegiatan (pelatihan/sosialisasi) relatif singkat dibandingkan kompleksitas materi	Implementasi hasil kegiatan di lapangan belum beragam	Menambah durasi dan frekuensi pendampingan teknis pascakegiatan

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perbedaan tingkat kesiapan regulasi daerah dalam pembentukan UPTD PPA di kabupaten/kota	Pembentukan UPTD PPA belum merata di seluruh kabupaten/kota	Memperkuat asistensi regulasi bersama Biro Organisasi dan Biro Hukum
Proses penyusunan dan penetapan Perkada/Perbup membutuhkan waktu relatif lama	Keterlambatan operasionalisasi layanan perlindungan	Mendorong percepatan proses administrasi dan koordinasi dengan Kementerian PPPA RI

Masalah	Dampak	Solusi
	perempuan di daerah tertentu	
Sebagian kabupaten masih menunggu pertimbangan teknis dari Kementerian PPPA RI	Outcome pemerataan akses layanan belum sepenuhnya tercapai	Menyusun roadmap pembentukan UPTD PPA berbasis tahapan kesiapan daerah
Keterlambatan diterbitkannya Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) oleh kementerian teknis menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK NF PPA	Pelaksanaan kegiatan DAK NF PPA tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana awal tahun anggaran	Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik dikejar dan dioptimalkan dalam waktu efektif kurang lebih 2 (dua) bulan agar target output dan outcome tetap dapat tercapai secara optimal

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM layanan di beberapa kabupaten/kota	Kualitas dan kecepatan layanan belum merata antar daerah	Melanjutkan program peningkatan kapasitas dan sertifikasi petugas layanan secara bertahap
Tingginya beban kerja aparatur yang menangani perlindungan perempuan dan anak	Hasil pelatihan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di lapangan	Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menambah dan mengalokasikan SDM khusus
Belum seluruh petugas layanan memiliki sertifikasi atau pelatihan teknis lanjutan	Ketergantungan pada SDM tertentu dalam penanganan kasus	Memperkuat jejaring lintas sektor dalam penanganan kasus

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan dukungan anggaran daerah di beberapa kabupaten/kota	Belum optimalnya pemanfaatan layanan perlindungan perempuan	Mengintensifkan kampanye KIE melalui berbagai media (cetak, digital, televisi, dan komunitas)
Masih kuatnya stigma sosial dan budaya enggan melapor pada kasus kekerasan	Rendahnya pelaporan kasus kekerasan di beberapa wilayah	Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan
Perbedaan tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terkait isu perlindungan perempuan	Efektivitas kampanye pencegahan belum merata	Mendorong integrasi program perlindungan perempuan dengan program lintas sektor

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Terjalannya koordinasi lintas OPD, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan (provinsi–kabupaten/kota)
- Dukungan aktif dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Kementerian PPPA RI, serta mitra strategis
- Forum rapat koordinasi menjadi sarana efektif penyamaan persepsi kebijakan

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan media digital (Zoom, YouTube, TVRI NTT) sebagai sarana edukasi public
- Penggunaan media KIE cetak dan visual di ruang publik strategis
- Pendekatan literasi, GEDSI, dan berbasis komunitas dalam pencegahan kekerasan

c. Faktor Komitmen

- Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong pembentukan dan penguatan UPTD PPA
- Komitmen lintas sektor dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan TPPO
- Konsistensi pelaksanaan program meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan teknis

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan secara luring untuk kegiatan strategis
2. Memperkuat materi pendukung (modul, rekaman video, bahan digital) yang dapat diakses ulang.
3. Menambah durasi dan frekuensi pendampingan teknis pascakegiatan.
4. Memperkuat asistensi regulasi bersama Biro Organisasi dan Biro Hukum.
5. Mendorong percepatan proses administrasi dan koordinasi dengan Kementerian PPPA RI.
6. Menyusun roadmap pembentukan UPTD PPA berbasis tahapan kesiapan daerah.

7. Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik dikejar dan dioptimalkan dalam waktu efektif kurang lebih 2 (dua) bulan agar target output dan outcome tetap dapat tercapai secara optimal.
8. Melanjutkan program peningkatan kapasitas dan sertifikasi petugas layanan secara bertahap.
9. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menambah dan mengalokasikan SDM khusus.
10. Memperkuat jejaring lintas sektor dalam penanganan kasus.
11. Mengintensifkan kampanye KIE melalui berbagai media (cetak, digital, televisi, dan komunitas).
12. Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan.
13. Mendorong integrasi program perlindungan perempuan dengan program lintas sektor.
14. Penambahan target PAD pada DP3AP2KB perlu mendapat dukungan sumber daya yang sesuai dan menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2027.

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah.	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>).	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral
Alokasi anggaran untuk pencapaian target Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA tidak memadai	Tidak terlaksananya Program Konservasi. Sumber. Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat.	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan.	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Bappeda.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana, polisi kehutanan,	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis.	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana, polisi

Masalah	Dampak	Solusi
penyuluh kehutanan dan pengawas lingkungan.		kehutanan, penyuluh kehutanan dan pengawas lingkungan.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan.	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif;
- Kemitraan dengan akademisi dan LSM.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando;
- Penggunaan SIPOPS (Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial) dan SiALAM (Sistem akses lahan Masyarakat).

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja;
- Penetapan skala prioritas yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional

4. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan Sarana Prasarana seperti alat perekaman mobile, VPN, Jaringan, dll	Pelayanan jemput bola untuk mencapai target kinerja menjadi terhambat	Dukungan Fasilitas Pelayanan Dari Pimpinan daerah dalam pemenuhan layanan adminduk
Keterbatasan Anggaran Dukcapil Kabupaten/Kota	Tidak bisa menyediakan sarana prasarana untuk melakukan pelayanan Jebol (jemput bola) ke lokasi lokasi terpencil	Dukungan anggaran untuk Dukcapil

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Dukcapil Provinsi masih memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak tegas	Dampak Terhadap Perencanaan dan Program: Provinsi sulit merancang program substantif karena tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, akhirnya program yang di susun selalu mengarah kepada program yang berulang setiap tahun (Bimtek,rapat,sosialisasi). Dampak Terhadap Pembinaan Kab/Kota: Provinsi tidak punya daya instruksi langsung instruksi hanya bersifat persuasif, imbauan, dan rekomendatif. Dampak terhadap Pengendalian dan Pengawasan: Sulit untuk memberikan intervensi serius kepada Kabupaten/Kota jika terjadi masalah dalam hal pelayanan adminduk	Perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Dukcapil dalam hal penegasan terhadap fungsi Dukcapil Provinsi.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Tidak adanya fungsional perencana, fungsional keuangan.	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Pemenuhan Kebutuhan Pegawai
Kompetensi petugas belum merata, baik dalam pemahaman regulasi administrasi kependudukan maupun dalam penguasaan teknologi informasi yang	Menurunkan tingkat kepuasan masyarakat serta menghambat tercapainya target kepemilikan dokumen	Peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pembaruan pemahaman

Masalah	Dampak	Solusi
digunakan dalam sistem pencatatan sipil	kependudukan secara menyeluruh	regulasi serta sistem informasi pencatatan sipil

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
NTT memiliki karakteristik wilayah kepulauan	Pembengkakan dana operasional seperti transportasi dan perjalanan dinas.	
Akses jalan yang sulit dijangkau	Sulit untuk mengakses masyarakat yang berada pada desa yang terpencil	Pemerintah bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan atau menjawab masalah tersebut.
Kondisi ekonomi masyarakat yang berada di Desa terpencil tidak memungkinkan untuk mereka datang ke kantor Dukcapil	Tidak memiliki dokumen kependudukan, yang harusnya dokumen ini penting untuk mereka bisa mendapatkan jaminan Kesehatan dan jaminan sosial yang merata.	Dukcapil melakukan layanan jemput bola

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Sinkronisasi kebijakan dengan Ditjen Dukcapil

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan data kependudukan lintas Perangkat Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Dukcapil Menjangkau

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap inovasi layanan dukcapil
- Komitmen serius antar OPD yang melakukan PKS dalam Pemanfaatan Data Kependudukan

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Optimalisasi Teknologi:** PKS pemanfaatan data agar sinkronisasi dengan DTKS
2. **Peningkatan SDM:** Pemenuhan Kebutuhan dan peningkatan kapasitas Pegawai

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah. Data Indeks Desa yang terpublish dan tidak <i>by request</i> untuk memudahkan analisis.	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Pembuatan buku data potensi desa.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat seperti alokasi anggaran untuk Koperasi Merah Putih karena mengganggu operasional Bumdes	Alokasi BLT Kemiskinan Ekstrem yang berkurang drastis karena alokasi Dana Desa yang direalokasi.	Penyesuaian Kebijakan bersama Pemerintah Desa

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana dan Fungsional Penggerak Sawadaya Masyarakat	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan, pegunungan, terisolir yang tersebar di 3,137 Desa	Aksesibilitas Data dan Informasi	-

3.2 Faktor Pendorong

- **Faktor Koordinasi** : Terlaksannya Forum Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah
- **Faktor Inovasi** : Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Faktor Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja melalui cascading indicator kinerja aktivitas harian

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Sinkronisasi antara mekanisme perencanaan penganggaran dengan formulasi indikator pengukur. Contohnya dasa cita tahun 1 tidak

- terukur dalam formulasi kinerja terbaru (masih menggunakan indikator renstra lama)
2. Terkait program unggulan OVOP, wajib melakukan evaluasi dampak untuk implementasi tahun 2026, dengan beberapa indikator misalnya berapa besar peningkatan pendapatan masyarakat yang menerima program OVOP pasca intervensi. Jika terdapat rasionalisasi anggaran untuk evaluasi dampak, Dinas PMD dapat melakukan sharing pendanaan atau kerjasama dengan Bapperida, Universitas dan LLDIKTI XV NTT. Hal ini penting untuk melihat tingkat kegagalan/ keberhasilan program OVOP serta memetakan potensi hambatan dan tantangan untuk perencanaan dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
 3. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
 4. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
 5. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
 6. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

6. Dinas Perhubungan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
- Keterbatasan anggaran khususnya pada aktivitas terkait pemeriksaan fisik di lapangan (memiliki kontribusi pada indikator kinerja perhubungan) - Keterbatasan alat-alat kelengkapan pemeriksaan teknis seperti alat ukur kegelapan kaca film, alat uji emisi, alat uji tekanan ban, alat meter	- Terjadinya keterlambatan pemberian rekomendasi teknis yang berdampak pada terhambatnya penerbitan sertifikat standar - Kurangnya pengawasan pada tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor - Rendahnya kualitas pemeriksaan fisik	- Perlunya komitmen penambahan alokasi anggaran seperti untuk mendukung rekomendasi teknis angkutan umum, Perusahaan Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi dll - Peningkatan koordinasi dengan UPTDP2TP dalam melakukan penilaian teknis di lapangan - Pengadaan dan pemutakhiran alat-alat kelengkapan pemeriksaan teknis seperti alat ukur kegelapan kaca film, alat uji emisi, alat uji tekanan ban, alat meter
Integrasi ijin lingkungan melalui aplikasi Amdalnet: Pengajuan Persetujuan Lingkungan (PL) kini dilakukan	- Menghambat pengembangan dan pendaftaran baru perusahaan angkutan umum	- Pendampingan kepada Pengusaha untuk pengisian format dan pemenuhan persyaratan di aplikasi AmdalNet melalui :

Masalah	Dampak	Solusi
melalui sistem Amdalnet yang terintegrasi penuh dengan OSS, menuntut pemahaman teknis baru dari pelaku usaha.	- Kurangnya potensi pemasukan PAD pajak kendaraan bermotor - Kurangnya potensi kehadiran investasi-investasi baru di daerah	1. Koordinasi dengan DLHK dengan pembentukan Tim Kerja 2. Sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum
Kompleksitas administrasi untuk Persetujuan Teknis (Pertek): Penambahan Pertek (air limbah, emisi, limbah B3, andalalin) sebagai komponen Persetujuan Lingkungan (PL) yaitu Persetujuan bagi usaha berdampak.	- Memperlambat pertumbuhan investasi - Menghambat pengembangan dan pendaftaran baru perusahaan angkutan umum	- Pembentukan Tim Reviu Kebijakan PP 28 Tahun 2025 untuk melakukan telaah (reviu) pada pasal-pasal yang memberatkan untuk kemudian diberikan kepada Presiden - Pembuatan surat pernyataan mandiri izin lingkungan dari Pemilik Perusahaan yang mengurus izin - Mengintensifkan pendampingan pada pengusaha untuk pemenuhan persyaratan izin lingkungan melalui pembentukan Tim Kerja
Kualitas layanan pelabuhan kewenangan provinsi belum optimal sesuai dengan standar minimal pelabuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana terbatasnya alokasi biaya untuk rehabilitasi pelabuhan sangat besar misalnya : 1. Terdapat kerusakan pada media penghubung dermaga dan kapal (<i>Movable Bridge</i>) sehingga kendaraan besar (diatas roda 6) tidak dapat melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan (Penyeberangan Aimere) 2. Keterbatasan fasilitas publik di pelabuhan dan ruang yang ramah GEDSI 3. Layanan fasilitas air bersih untuk pelayanan	- Kurangnya potensi pemasukan PAD retribusi jasa pelayanan dan jasa usaha kepelabuhanan hingga mencapai di atas 70% - Resiko korban jiwa cenderung tinggi akibat faktor keselamatan Pelabuhan menjadi rendah - Mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan yang berdampak pada terganggunya proses distribusi barang dan konektivitas pengguna jasa pelabuhan - Rendahnya kualitas pelayanan pelabuhan	- Konsistensi penganggaran untuk rehabilitasi berat Movable Bridge (MB) untuk perbaikan tahap 2 Pelabuhan berikut pembangunan rumah singgah pada pelabuhan Penyeberangan Aimere pada Tahun 2026 untuk dikawal TAPD sehingga tidak di refocusing - Penganggaran untuk fasilitas utama dan penunjang pelabuhan terutama ruang tunggu dan instalasi air bersih

Masalah	Dampak	Solusi
pelabuhan maupun dijual ke kapal belum memadai		
Rendahnya minat investasi sehingga trayek yang terlayani tidak mengalami perubahan	- Rendahnya capaian PAD - Nilai konektivitas daerah rendah - Adanya trayek angkutan penyeberangan yang tidak dilayani	- Skema kolaborasi investasi trayek kepada perusahaan-perusahaan angkutan pelayaran misalnya : 1. Subsidi berjangka 2. Mengusulkan subsidi layanan angkutan perintis penyeberangan 3. Program Tol Laut daerah
Minimnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam berlalu lintas yang aman, serta kondisi jalan yang kurang baik dan fasilitas keselamatan kurang memadai.	Tingkat kecelakaan lalu lintas cenderung tinggi hingga mengakibatkan korban jiwa (<i>sumber : lakalantas POLDA NTT</i>) akibat faktor <i>human error</i> seperti : melampaui batas kecepatan, lalai, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menjaga jarak aman	- Sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat - Penambahan fasilitas keselamatan di jalan untuk meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Implementasi PP 28 Tahun 2025 Pasal terkait Persetujuan Lingkungan (PL) yang cenderung memberatkan Perusahaan angkutan umum karena beban kriteria ijin lingkungan wajib dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha	- Memperlambat operasional usaha Perusahaan - Menghambat pengembangan dan pendaftaran baru perusahaan angkutan umum - Memperbanyak potensi lahirnya usaha angkutan umum ilegal	- Pembentukan Tim Reviu Kebijakan PP 28 Tahun 2025 untuk melakukan telaah (reviu) pada pasal-pasal yang memberatkan untuk kemudian diberikan kepada Presiden - Mekanisme Kembali pada aturan sebelumnya dimana pembuatan surat pernyataan mandiri izin lingkungan dari Pemilik Perusahaan yang mengurus ijin (PP 5 Tahun 2021) untuk mendapatkan proses NIB - Mengintensifkan pendampingan pada pengusaha untuk pemenuhan persyaratan ijin lingkungan melalui pembentukan Tim Kerja

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan sumber daya terkait :	Keterlambatan layanan bahkan ketiadaan tenaga	- Pengajuan anjab ke BKD terkait kebutuhan

Masalah	Dampak	Solusi
- Penguji Kendaraan Bermotor untuk melakukan pemeriksaan angkutan umum sebelum berangkat di Terminal - PPNS LLAJ untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan - Penilai Standar Pelayanan Minimal Sarana Angkutan Umum untuk penerbitan rekomendasi teknis - Penilai Andalalin untuk penerbitan rekomendasi Andalalin untuk proses penerbitan PBG, dll.	layanan seperti PPNS LLAJ	tenaga fungsional/keahlian perhubungan - Membangun PKS dengan BPSDM Perhubungan untuk fasilitasi diklat di daerah - Diklat teknis tenaga perhubungan - Optimalisasi pola pembibitan untuk kebutuhan daerah

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Kurangnya koordinasi lintas Instansi dengan Instansi vertikal	- Minimnya data central layanan transportasi dan mitigasi awal terhadap resiko kecelakaan transportasi - Kekurangan konsolidasi data kinerja lintas kewenangan	Pembentukan satu platform koordinasi perhubungan lintas kewenangan berupa satuan gugus tugas atau media informasi

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

1. Berkoordinasi dengan Dinas PMPTSP terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan untuk mendukung indikator peningkatan cakupan layanan angkutan umum.
2. Berkoordinasi dengan BPTD Kelas II Provinsi NTT terkait penjadwalan Kapal Angkutan Penyeberangan di Provinsi NTT untuk mendukung indikator peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut.
3. Berkoordinasi dengan OPD tematik yakni Badan Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam bentuk pengusulan program kegiatan di daerah perbatasan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui Program PERMATA. Hal ini dilakukan untuk mendukung indikator Peningkatan cakupan layanan angkutan umum melalui kegiatan Penyediaan layanan Angkutan Umum di wilayah Perbatasan dan indicator Persentase Kejadian Kecelakaan Transportasi melalui kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi pada wilayah-wilayah perbatasan.

b. Faktor Inovasi

1. SIPASK adalah platform digital yang dibuat untuk mempermudah proses perizinan angkutan sewa khusus (seperti taksi online/rental

berizin). Sistem ini menghadirkan layanan informasi dan panduan perizinan secara terintegrasi dan transparan. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu masyarakat dan operator angkutan dalam:

Mengetahui peraturan dan persyaratan angkutan sewa khusus, Memahami alur pendaftaran izin, Mendapat panduan upload berkas melalui OSS agar tidak gagal Melihat data kendaraan yang sudah berizin, Mengakses informasi resmi dan kontak layanan dari Dishub NTT. Meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses perizinan, sehingga pengurusan izin menjadi lebih jelas, tertib, dan mudah diakses secara online. Inovasi ini mendukung Indikator Peningkatan cakupan layanan angkutan umum

2. Sistem Informasi Monitoring GEDSI bertujuan untuk memaksimalkan Kualitas Pelayanan Transportasi Darat di Terminal Tipe B Oebobo dalam menjamin Aksesibilitas, Keselamatan, Kenyamanan, serta Rasa Keadilan bagi semua pengguna khususnya kelompok rentan pada pengelolaan Terminal Tipe B Oebobo. Inovasi ini mendukung Indikator Peningkatan cakupan layanan angkutan umum

c. Faktor Komitmen

1. Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, tujuan perjanjian kerja sama ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang teknis, monitoring dan evaluasi.
5. Penguatan Program berbasis tematik dan berkelanjutan.
6. Untuk Tahun 2026 dan selanjutnya agar konsisten pada indikator yang sudah dirumuskan di SIPD Pemutakhiran.
7. Optimalisasi inovasi system kerja untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dalam pencapaian target kinerja yang optimal.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas perangkat daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang realtif cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi	Sinskronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Bappeda

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Penignkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi:** Adanya forum lintas perangkat daerah dan lintas pemerintah yang berjalan efektif
- **Inovasi:** Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada portal Sasando
- **Komitmen:** Adanya dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Terdapat belanja aset yang tidak terealisasi	Kurangnya efektivitas pekerjaan	Mengoptimalkan aset kantor yang ada untuk memperlancar pekerjaan
Beberapa Kegiatan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi tidak terealisasi karena bersamaan dengan pelaksanaan Kegiatan Koperasi Merah Putih	Kurangnya pemahaman terhadap Perkoperasian	Pemanfaatan media sosial untuk mengakses materi pembelajaran lewat <i>canal</i> youtube klinik Digitalisasi Koperasi

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Tidak memiliki fungsional perencana	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Mengusulkan Formasi fungsional Perencana

c. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Faktor Koordinasi :** Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Faktor Inovasi :** Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Faktor Komitmen :** Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Efisiensi Belanja:** Mengoptimalkan aset kantor yang ada untuk memperlancar pekerjaan.
2. **Optimalisasi Teknologi:** Pemanfaatan media sosial untuk mengakses materi pembelajaran lewat *canal* youtube dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. **Peningkatan SDM:** Mengusulkan Formasi fungsional Perencana

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Anggaran survei tidak bisa dilaksanakan tepat lokasi kegiatan usaha	Ijin tidak bisa diterbitkan	Memastikan rincian belanja lebih fleksibel.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan Regulasi pada Tengah tahun berjalan	Tidak terlaksananya penyusunan perda	Memastikan penyusunan perda PTSP

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Koordinasi lintas perangkat daerah terjalin dengan baik
- **Inovasi** : Pemanfaatan GRAB untuk mendukung pelayanan perijinan, dan Pelayanan konsultasi gratis pengurusan ijin
- **Komitmen** : Pelayanan public yang diberikan kepada stakeholder sesuai SOP.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Memastikan rincian belanja lebih fleksibel.
2. Memastikan penyusunan perda PTSP.

10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan, serta keterbatasan waktu dan partisipasi peserta dalam beberapa kegiatan kepemudaan	Mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian target	Dilakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan monitoring dan evaluasi agar realisasi anggaran dan pencapaian sasaran program dapat lebih optimal.
Keterbatasan alokasi anggaran menjadi kendala dalam Pelaksanaan program dan kegiatan	Mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian target	Melakukan usulan anggaran melalui telaahan staff serta melakukan penyesuaian perencanaan program berdasarkan skala prioritas

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Belum adanya PERDA KEPEMUDAAN namun sudah ada UU Kepemudaan No 40 thn 2019 dan Pergub Rencana Aksi Daerah tahun 2024, PERDA Penyelenggaraan Olahraga No 3 thn 2019 yang perlu dievaluasi karena UU keolahragaan telah mengalami amandemen (UU No 11/2022 ttg Keolahragaan) dan PERGUB DOD	Belum optimalnya landasan hukum daerah dalam penyelenggaraan program kepemudaan secara terpadu dan berkelanjutan.-	Penyusunan Perda Kepemudaan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kebijakan kepemudaan daerah.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
belum meratanya sebaran peserta pada seluruh wilayah kabupaten/kota, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan	Penyerapan anggaran tidak maksimal.	Dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota, optimalisasi pemetaan sasaran pemuda, serta penyesuaian desain kegiatan agar lebih efektif dan efisien sehingga realisasi anggaran dan capaian pengembangan wirausaha muda dapat ditingkatkan.
Kelompok kreativitas pemuda dalam penyelesaian proposal bermasalah	mengakibatkan realisasi bansos tidak memenuhi target	Kelompok kreativitas pemuda harus menyelesaikan proposal dengan benar

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Manajemen dan Kewenangan Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang belum terstruktur dengan baik seperti: KNPI dengan organisasi kepemudaan lainnya dimana KNPI sebagai induk organisasi dalam melaksanakan urusan pembinaan	Belum optimalnya efektivitas pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.	Penerapan mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi organisasi kepemudaan secara berkelanjutan.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Pusat dan SKPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan tanpa adanya intervensi terhadap kewenangan daerah.

b. Faktor Inovasi

- Optimalisasi peran SDM pengelola data dalam mendukung akurasi dan ketepatan pelaporan.

c. Faktor Komitmen

- Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berdampak positif terhadap capaian realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan riil, termasuk pengusulan anggaran melalui telaahan staf agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
2. **Efisiensi Belanja:** Memperkuat basis data perencanaan sebagai dasar penentuan skala prioritas program dan kegiatan guna memastikan alokasi belanja tepat sasaran.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efisiensi belanja.
4. **Peningkatan SDM:** Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana kegiatan melalui pembinaan teknis agar mampu melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program secara tepat sasaran.

11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan Sarana dan prasarana, termasuk jaringan internet dan komputer untuk optimalisasi kearsipan dan layanan perpustakaan digital	Penurunan pengunjung dan kualitas pelayanan publik.	Penguatan sarana, prasarana dan jaringan internet.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan yang relatif cepat dan berubah.	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan.	Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah staff yang memiliki kompetensi teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan.	Beban kerja tidak seimbang dan pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan kurang maksimal	Peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat	Menurunnya Tingkat Kunjungan Perpustakaan dan layanan kearsipan	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi layanan perpustakaan dan kearsipan

3.2 Faktor Pendorong

- **Faktor Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif.
- **Faktor Inovasi** : Pemanfaatan Layanan Pinjam Buku Antar di Tempat (LAPBUKIT) dan Srikandi.
- **Faktor Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data**: Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).

2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral
Aktivasi PPI Hukung & PPI Kamala Putih Sumba Timur	Operasional Pelabuhan dan Retribusi PAD yang belum bisa dimaksimalkan	Persiapan operasional (SDM, Sarpras, regulasi)

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat,	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Bappeda
Tumpang tindih regulasi	Ketidakpastian Hukum, Hambatan Investasi dan konflik kewenangan.	Harmonisasi dan Sinkronisasi regulasi

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana dan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi keahlian khusus seperti syahbandar, Auditor CPIB, CBIB, SKP	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis, mengakibatkan pelayanan terhambat	1. Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana, Kerjasama sertifikasi /MoU dengan Kementerian terkait untuk penyelenggaraan sertifikasi. 2. Pemetaan Anjab/Abk di Dinas dan Kantor Cabang Dinas (Formasi dan rencana pemenuhan SDM),

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Inovasi** : Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.
5. **Aktivasi PPI Hukung (Lembata) & PPI Kamala Putih (Sumba Timur), dan penguatan PPI Tulandale (Rote Ndao).**

2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Masih terbatas/ kurang lengkap kuantitas dan kualitas data dari Dinas Pariwisata dan Ekraf 22 kabupaten /kota	Perencanaan aktivitas kegiatan yang dilakukan kabupaten membutuhkan waktu untuk klarifikasi dan verifikasi	Koordinasi dengan kabupaten/kota yang lebih optimal secara berkala untuk kebutuhan data (seperti rapat /koordinasi secara daring setiap bulan atau triwulan)

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Adanya perubahan kebijakan pimpinan terkait anggaran yang berpengaruh terhadap siklus perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Terjadinya perubahan program kegiatan dan rencana aktivitas pada saat tahun berjalan sehingga berdampak pada perubahan target kinerja dan capaiannya	Melakukan perencanaan yang matang pada awal tahun anggaran sehingga meminimalisir adanya perubahan aktivitas kegiatan
Belum tersedia Dokumen Riparnas	Belum bisa menyusun Dokumen Riparprov	Perencanaan pembangunan pariwisata mengacu pada dokumen perencanaan

		daerah (RPJMN, RPJPD, RPJMD)
--	--	------------------------------

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Kurangnya kapasitas kinerja SDM (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif).	Kualitas perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekraf tidak optimal.	Peningkatan kapasitas SDM secara berkala di bidang dan sekretariat.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakter wilayah kepulauan sehingga biaya transportasi mahal,	Alokasi anggaran untuk transportasi tinggi untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan di Flores dan Sumba.	Pengumpulan data yang baik untuk rencana aktivitas kegiatan di luar Kupang (data harga satuan seperti biaya transportasi dan akomodasi)
kebijakan penggunaan sumber dana DBH dari pusat dalam bentuk petunjuk teknis yang terlambat	Aktivitas kegiatan dari dana DBH baru dapat dilakukan pada triwulan 4 sehingga tidak optimal karena keterbatasan waktu	Kegiatan dana PAD dilakukan lebih awal (semester 1) khususnya yang dilakukan secara mandiri, agar tidak menumpuk di akhir tahun

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

Kolaborasi dengan beberapa pelaku /stake holder terkait untuk promosi Pariwisata dan Produk Ekraf NTT seperti Tour de NTT 2025, Exotic Run, dll

b. Faktor Inovasi

- Kegiatan ANTik Fest yang sudah digagas sejak tahun 2024 untuk promosi wisata NTT ke dunia dan mengenalkan produk ekraf UMKM setempat agar dapat terserap di pasaran untuk membangkitkan ekonomi lokal.
- Web site khusus untuk promosi wisata NTT (TIC) www.Touriminfo.nttprov.go.id

c. Faktor Komitmen

Komitmen Dinas Parekraf NTT terhadap Program Strategis DASA CITA Ayo Bangun NTT, melalui kegiatan promosi wisata NTT, pengembangan produk ekraf unggulan di Desa wisata dan Kegiatan ANTik FEst.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Koordinasi dengan kabupaten/kota yang lebih optimal secara berkala untuk kebutuhan data (seperti rapat /koordinasi secara daring setiap bulan atau triwulan)
2. **Efisiensi Belanja:** Kegiatan dana PAD dilakukan lebih awal (semester 1) khususnya yang dilakukan secara mandiri, agar tidak menumpuk di akhir tahun; Konsistensi pemanfaatan anggaran untuk menjawab Indikator yang sudah ditetapkan
3. **Optimalisasi Teknologi:** Web site khusus untuk promosi wisata NTT (TIC) *www. Touriminfo.nttprov.go.id*
4. **Peningkatan SDM:** Peningkatan kapasitas SDM secara berkala di bidang dan sekretariat.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sudah mengakomodir Isu GEDSI dalam Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Dinas Peternakan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sectoral dan belum optimalnya integrasi data lintas perangkat daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan system satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relative cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Bappeda

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Penempatan fungsional Wastukan dan Wasbitnak di kantor Dinas dan UPT	Pembagian tugas yang belum jelas antara jabatan fungsional dan tugas tambahan terkait pemungutan PAD di pintu-pintu masuk Pelabuhan pengeluaran dan pemasukan ternak, produk olahan asal ternak	1. Pembagian uraian tugas yang jelas serta pemberian pelatihan terkait pelaksanaan tugas di lapangan 2. Pemetaan Anjab/ABK di Dinas dan UPT

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Pihak ke-3 tidak mampu menyediakan ternak ayam KUB 100%	Jumlah ternak ayam yang telah diserahkan-terimakan kepada kelompok penerima Adalah 925 ekor dari 1.600 ekor (57,81%) atau terealisasi kepada 37 kelompok dari 64 kelompok yang seharusnya menerima	Bersurat ke Inspektur Daerah Provinsi NTT untuk melakukan reviu dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut
Tidak semua Dinas Peternakan Kabupaten mengajukan permohonan vaksin ASF. Dari 22 kabupaten hanya 10 kabupaten yang mengajukan permohonan vaksin ASF disebabkan vaksin ASF baru ada di akhir tahun, sehingga kesulitan untuk dilakukan vaksinasi ke ternak babi	Vaksin ASF masih banyak yang tidak terdistribusi ke kabupaten dan disimpan ke Dinas Peternakan Provinsi	Melakukan koordinasi ke kabupaten untuk tahun 2026 mengajukan permohonan vaksin ASF ke provinsi sehingga bisa segera dilakukan vaksinasi ke ternak babi di kabupaten.

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Forum lintas PD, mitra, kelompok peternak dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Inovasi** : Pemanfaatan aplikasi PUSAKA, identic PKH dan ISIKHNAS sehingga data selalu terupdate dan membantu dalam pengambilan kebijakan
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap pengembangan sub sektor.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral peternakan.
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan aplikasi untuk pengumpulan data, koordinasi dengan kabupaten dan pusat serta pengambilan kebijakan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional untuk Wastukan Wasbitnak.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada sistim budidaya pertanian	Berpengaruh pada produksi pertanian	Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat dalam penetapan indicator perhitungan daerah rawan pangan (Kecamatan)	Nilai indicator persentase daerah rentan pangan mengalami peningkatan	Penyesuaian regulasi

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional tertentu bidang pertanian.	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM fungsional tertentu bidang pertanian

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Topografi wilayah NTT yang berbukit	Pengembangan Kawasan pertanian mengalami kendala dalam penentuan Kawasan sedangkan pengembangan pertanian berdasarkan permentan 03 tahun 2025 tentang penetapan Kawasan pertanian, bahwa pengembangan pertanian berbasis Kawasan terutama untuk aneka kacang, umbi dan hortikultura	Optimalisasi lahan-lahan yang belum termanfaatkan

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Kolaborasi pentahelix
- **Inovasi** : Pemanfaatan brigade alsintan untuk memperpendek waktu budidaya tanaman
- **Komitmen** : Dukungan stakeholder terhadap pengembangan pertanian.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

5. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).

6. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
7. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
8. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang pertanian

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025	Tidak tersedianya peta Cekungan Air Tanah	Permohonan anggaran untuk pembuat Peta Cekungan Air Tanah
Belum melakukan sosialisasi terpadu ke semua pemegang IUP terkait opsen Pajak.	Maraknya Pertambangan Tanpa Izin di lapangan.	Permohonan Penambahan anggaran untuk sosialisasi..
Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.	Sebagian Kegiatan dan Anggaran terefisisensi.	Perencanaan yang baik
Keterbatasan Akses data DTSEN, keterbatasan sarana dan prasarana.	Lambat dalam proses verifikasi data sehingga beban kerja aparaturnya meningkat, kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.	Penguatan koordinasi antar instansi, pengadaan sarana dan prasarana

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan peraturan perpajakan dan kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah Daerah	Penyesuaian terhadap anggaran dan Kewenangan Daerah	Melakukan koordinasi Terkait peraturan dan kebijakan
Penetapan KEN di bulan September 2025	Penundaan Legalitas PERDA RUED Provinsi NTT	Melakukan Koordinasi dengan Kementerian ESDM RI
Perubahan data DTKS ke DTSEN.	Penyesuaian data perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan.	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Dinas ESDM.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
---------	--------	--------

SDM sudah memadai.	Tidak Masalah.	pengembangan kapasitas aparatur melalui BIMTEK/DIKLAT.
Tidak Masalah.	Tidak Masalah.	Tidak Masalah.
Keterbatasan kompetensi Pelaksana.	Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.	pengembangan kapasitas aparatur melalui BIMTEK/DIKLAT.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Masih Banyak Penambangan Tanpa Izin.	Kerusakan lingkungan.	Melakukan sosialisasi dan permohonan izin bagi Pelaku usaha.
Karakteristik wilayah Kepulauan.	Keterbatasan Jangkauan koordinasi Lapangan.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Karakteristik wilayah kepulauan dan pemukiman penduduk tersebar, Belum semua Desa dan Dusun berlistrik PLN.	Memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan.	Koordinasi dengan Lembaga terkait dalam mempercepat serta mempermudah proses pelaksanaan kegiatan.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Forum Lintas Dinas, Cabang Dinas ESDM, APH dan Pemerintah Kab/Kota;
- Forum Lintas Dinas dan Cabang Dinas ESDM dan Kementerian ESDM berjalan Efektif;
- Forum lintas PD dan lembaga berjalan efektif.

b. Faktor Inovasi

- Membuat Peta sebaran potensi MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan pembuat Pergub NPA (Nilai Perolehan Air Tanah);
- Pemanfaatan SIPD dan Dashboard Monitoring;
- Peningkatan koordinasi antar PD dan Lembaga.

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan Daerah, Dinas dan Cabang Dinas terhadap penambahan PAD Pemerintah Provinsi NTT;
- Dukungan pimpinan Daerah, Dinas dan Cabang Dinas terhadap Perencanaan berbasis kinerja;
- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Pembuatan Aplikasi Bidang.
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Ketersediaan data sektoral belum lengkap, tidak mutakhir, dan belum terintegrasi.	Perencanaan dan penetapan indikator kinerja kurang tepat sasaran.	Penguatan pendataan secara berkala dan pengembangan sistem basis data terintegrasi.
Minimnya fasilitas produksi, peralatan bersama, dan sentra industri yang memadai.	Produktivitas dan daya saing IKM rendah.	Fasilitasi pengembangan sentra IKM dan optimalisasi pemanfaatan sarana produksi bersama.
Banyak produk industri belum memenuhi standar mutu dan belum tersertifikasi.	Akses pasar terbatas dan daya saing produk rendah.	Fasilitasi penerapan standar industri dan pendampingan sertifikasi produk.
Data harga, stok, distribusi barang, dan pelaku usaha belum lengkap dan belum terbaru secara berkala.	Perumusan kebijakan perdagangan dan pengendalian harga kurang tepat sasaran.	Penguatan sistem pendataan perdagangan dan pemutakhiran data secara rutin.
Rantai distribusi panjang dan biaya logistik tinggi.	Harga barang di tingkat konsumen menjadi tinggi dan daya beli menurun.	Penguatan jejaring distribusi, pemangkasan rantai pasok, dan pengembangan pusat distribusi.
Keterbatasan alat dan sistem pengawasan harga, takaran, dan mutu barang.	Potensi pelanggaran perdagangan dan ketidakstabilan pasar.	Penguatan sistem monitoring perdagangan dan peningkatan kapasitas pengawasan.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Kebijakan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik IKM.	Program pembinaan dan pengembangan IKM kurang efektif.	Penyusunan regulasi daerah yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan pelaku industri.
Prosedur perizinan usaha industri masih dianggap rumit dan berlapis.	Minat investasi dan pengembangan industri menjadi terhambat.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan layanan perizinan terpadu.
Terdapat perbedaan ketentuan antara kebijakan pusat dan regulasi daerah terkait perdagangan dan ekspor.	Pelaksanaan fasilitasi perdagangan dan ekspor kurang optimal.	Harmonisasi regulasi melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina.
Adanya kegiatan baru diperubahan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Penyusunan kajian sebelum kegiatan dilaksanakan
Belum tersertifikasinya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk melaksanakan pelayanan	Melakukan akreditasi kelembagaan pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah aparatur pembina serta tenaga pendamping IKM/UMKM dan pelaku perdagangan.	Pelaksanaan program dan pengawasan tidak optimal.	Optimalisasi pembagian tugas, penguatan peran pendamping, dan kerja sama dengan pihak terkait.
Pelaku industri dan perdagangan masih terbatas pemahamannya tentang manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran.	Usaha sulit berkembang dan berkelanjutan.	Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan.
Ketidaktersediaan SDM yang tersertifikasi	Tidak dapat melaksanakan kegiatan pelayanan dengan optimal	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan sertifikasi
Ketidaksesuai kompetensi SDM dengan pelayanan yang diberikan di UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Terjadinya kesalahan teknis dan proses pelayanan yang dilakukan menjadi lambat	Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Ketidakstabilan ekonomi nasional dan global mempengaruhi daya beli dan aktivitas usaha	Penurunan produksi, penjualan, dan kinerja perdagangan.	Penetapan prioritas program dan penguatan efisiensi serta diversifikasi produk.
Pelaku industri dan perdagangan, khususnya IKM/UMKM, sulit mengakses pembiayaan.	Pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi terhambat.	Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan dengan lembaga keuangan.
Masuknya produk dari luar daerah dan luar negeri dengan harga dan kualitas bersaing.	Pangsa pasar produk lokal menurun.	Peningkatan kualitas, diferensiasi produk, dan promosi produk lokal.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
- Kemitraan dengan pelaku usaha dan asosiasi (KADIN)
- Kerjasama lintas wilayah

b. Faktor Inovasi

- Pengembangan produk industri dan perdagangan yang memanfaatkan keunggulan lokal meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- Pemanfaatan platform digital, e-commerce, dan promosi kreatif memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan.
- Model kerja sama baru dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperkuat ekosistem industri dan perdagangan.

c. Faktor Komitmen

- Upaya berkelanjutan untuk memperbaiki layanan perindustrian dan perdagangan meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat.
- Kesiediaan untuk bekerja sama dengan pelaku usaha, asosiasi, dan mitra strategis memperkuat efektivitas program.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*);
2. **Optimalisasi Teknologi:** Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk IKM.

3. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada UPTD PSMB dan Penyuluh Industri (juga menampung Isu Gedsi dalam pelatihan).

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Umum

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Belum optimalnya pelayanan terhadap pimpinan dan masyarakat	Administrasi penyelenggaraan pelayanan terhadap pimpinan/masyarakat belum efektif dan akuntabel	Memperbaiki Standar Pelayanan Publik yang terbaik dari Pemerintah

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Aturan yang berubah rubah	Sulitnya penyesuaian terhadap aturan yang berubah ubah	Perlunya format baku yang bisa menjadi pedoman selama beberapa tahun dalam proses pelaksanaan tupoksi masing-masing

*Asuransi Kesehatan: diarahkan untuk masuk Jasindo

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Latar belakang pendidikan PNS yang belum proporsional	Kapasitas Sumber Daya Aparatur pelayanan terhadap pimpinan dan masyarakat yang masih kurang	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM
Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di Biro Umum tidak optimal	Koordinasi dan tindaklanjut untuk Pemenuhan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dengan Biro Organisasi, BKD dan Bapperida.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Kondisi Ekonomi, Lingkungan, perkembangan teknologi yang meningkat pesat	Organisasi sulit beradaptasi dalam waktu yang singkat	Melakukan transformasi organisasi berbasis digital dan peningkatan kapasitas SDM agar organisasi mampu beradaptasi secara cepat dan efisien terhadap perubahan ekonomi, lingkungan, dan teknologi.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Koordinasi dan kerja sama yang cukup baik antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah turut mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan pimpinan dan administrasi perkantoran.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando.
- Pemanfaatan Layanan Si-Lontar Pada Website Biro Umum Pemprov NTT guna Upaya peningkatan PAD berbasis teknologi digital.

c. Faktor Komitmen

- Faktor komitmen aparatur dan pimpinan menjadi salah satu pendorong utama dalam pencapaian kinerja Biro Umum. Komitmen tersebut tercermin dari kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta upaya menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Perlu dilakukan penguatan pengelolaan data dan informasi secara lebih sistematis dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja.
2. **Efisiensi Belanja:** Diperlukan upaya peningkatan efisiensi belanja melalui penguatan perencanaan anggaran, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran agar setiap alokasi belanja memberikan dampak optimal terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Pemanfaatan Layanan Si-Lontar Pada Website Biro Umum Pemprov NTT guna Upaya peningkatan PAD berbasis teknologi digital.
4. **Peningkatan SDM:** Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi, serta penataan kebutuhan SDM agar lebih proporsional dan mampu menjawab tuntutan kinerja organisasi yang semakin kompleks.

b) Biro Hukum

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi : - Kemampuan SDM Legal Drafting di instansi teknis masih sangat minim; - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang tupoksi; - Masih rendahnya respon dari Perangkat daerah pemrakarsa dalam proses pembentukan produk hukum pengaturan; - Adanya perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur terlambat; - SDM Pengelola Website JDIH dengan latar belakang Pendidikan sarjana Komputer belum ada karena SDM yang tersedia hanya 1 (satu) orang dengan latar belakang Pendidikan D3 Komputer sehingga diperlukan penambahan Staf untuk mengoptimalkan penanganan Website JDIH; - perlu adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pembuatan Aplikasi JDIH Versi Android sebagai Inovasi Biro dalam pengembangan Website JDIH dan pelaksanaan Rapat Teknis JDIH sebagai	- Kurangnya kemampuan SDM Legal Drafting dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan dokumen hukum, sehingga dapat mempengaruhi keakuratan dan kekuatan hukum dokumen tersebut; - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan peraturan, sehingga target waktu tidak dapat dipenuhi; - Kurangnya respon dari Perangkat daerah pemrakarsa dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pembentukan produk hukum, sehingga target waktu tidak dapat dipenuhi; - Keterlambatan pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan, sehingga manfaat yang diharapkan tidak dapat dirasakan tepat waktu. - Kurangnya SDM dapat mempengaruhi kualitas pelayanan website JDIH, sehingga mungkin tidak dapat	- SDM perlu ditingkatkan; - Koordinasi dengan perangkat daerah pengusul perlu ditingkatkan; - Perlu penambahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perundang-undangan; - Perlunya mengikuti Bimtek dalam peningkatan kapasitas aparatur; dan - Perlu penambahan alat-alat pendukung yaitu komputer/laptop dan printer; - Memaksimalkan seluruh sarana ,prasarana, dan sumber daya ASN yang ada agar seluruh proses penyusunan dapat diselesaikan pada kesempatan pertama;

Masalah	Dampak	Solusi
bagian dari pembinaan terhadap 46 Anggota JDIH di Provinsi NTT.	memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna; • Tanpa dukungan anggaran, pengembangan Aplikasi JDIH Versi Android mungkin tidak dapat dilakukan tepat waktu, sehingga target pengembangan tidak dapat dipenuhi.	
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab./Kota : • Terbatasnya SDM dalam melakukan fasilitasi/evaluasi Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota; • Belum tertibnya Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan produk hukum yang telah ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.	• Terbatasnya SDM dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan, sehingga target waktu tidak dapat dipenuhi. • Keterlambatan penyampaian produk hukum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses klarifikasi, sehingga produk hukum tidak dapat diimplementasikan secara efektif.	• Melaksanakan rapat koordinasi bidang hukum tingkat provinsi NTT untuk mendapat solusi/kesepakatan dalam pelaksanaan fasilitasi/evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota; • Melakukan pemantauan pelaksanaan Perda Kabupaten /Kota di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.
3. Bagian Bantuan Hukum • Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan beracara di Pengadilan; • Proses sidang di Pengadilan yang berlarut-larut menghambat pemerintah dalam merespon setiap keluhan dan upaya pemerintah mengeksekusi program dan kegiatan	• Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan beracara dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses persidangan, sehingga target waktu tidak dapat dipenuhi; • Proses sidang yang berlarut-larut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga target waktu dan tujuan tidak dapat dipenuhi;	• Melaksanakan diklat/ pelatihan beracara di Pengadilan. • Melibatkan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan perkara di Pengadilan; • Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan juga untuk mengadministrasikan dengan baik semua

Masalah	Dampak	Solusi
pembangunan yang sudah direncanakan; - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk Tim Kuasa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT dalam penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh OPD Tingkat Provinsi ketika digugat di luar wilayah hukum PN Kelas IA Kupang (PN Jakarta Pusat, PN Oelamasi, PN Atambua dan PN pada Kabupaten Kota se- NTT); - Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan masalah-masalah kepegawaian sebelum penerbitan Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian; - Terdapat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Aksi HAM dan/atau capaian belum maksimal bahkan tidak memperoleh nilai atau nilai 0 pada beberapa aksi. - Tidak teralokasinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi proses atas	- Keterbatasan dukungan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus; - Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah kepegawaian, sehingga target waktu tidak dapat dipenuhi; - Kegagalan melaksanakan Aksi HAM dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hak asasi manusia di daerah tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. - Kurangnya anggaran dapat mempengaruhi efektivitas penanganan pengaduan, sehingga mungkin tidak dapat memberikan solusi yang tepat dan memuaskan bagi masyarakat.	dokumen Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Meningkatkan koordinasi dengan TAPD agar lebih fleksibel dalam penyusunan anggaran khususnya yang berkaitan dengan Pendanaan Penanganan Perkara di Pengadilan yang melibatkan OPD tingkat Provinsi; - Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan OPD terkait penerbitan Keputusan Gubernur/Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; - Melakukan rapat koordinasi untuk Kabupaten/Kota secara berkala; - Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan himbauan/upaya pelaksanaannya lebih intensif dengan perangkat daerah terkait dengan tetap berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham NTT; - Perangkat Daerah tingkat Provinsi NTT lebih proaktif menyiapkan laporan Aksi HAM lebih awal dari waktu yang ditetapkan.

Masalah	Dampak	Solusi
pengaduan Non Litigasi yang ada di Kab/Kota.		

c) Biro Organisasi

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan metode penilaian dengan menggunakan metode <i>Staging Area</i> , yaitu dimana jika ada salah satu variabel dengan nilai terendah maka penilaian menggunakan nilai terendah tersebut, sehingga nilai Level Maturitas Kelembagaan di tahun 2025 mengalami penurunan dari sebelumnya 45 menjadi 35,88 (Kategori Sedang)	Tingkat kematangan PD menurun dilihat dari tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi (11 variabel)	Penyampaian surat penegasan kepada Perangkat Daerah agar memenuhi evidence/bukti dukung sesuai dengan tingkatan pada variabel penilaian tingkat kematangan sebagai upaya peningkatan nilai tingkat kematangan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
1. Kebijakan Pelayanan: Standar Pelayanan Publik yang belum dilakukan peninjauan ulang, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang belum sesuai serta proses tindak lanjut hasil SKM yang belum selesai ditindaklanjuti. 2. Profesionalisme SDM: Aturan terkait dengan Kode Etik dan Perilaku serta Budaya Pelayanan yang tidak tersedia, belum tersedianya mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja, serta belum tersediannya penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. 3. Sarana Prasarana : Menjadi salah satu indikator yang masih harus di perbaiki, sarana prasarana yang harus di perbaiki antara lain : sarana prasarana tempat parkir kantor dengan banyak aspek yang harus di lengkapi contohnya fasilitas parkir roda dua terpisah dengan roda empat serta tempat penitipan helm, cctv dan petugas parkir dll, adapun sarana perasarana toilet kantor dengan harus melihat aspek yang di perbaiki seperti harus adanya	Kualitas pelayanan public menurun sehingga berpengaruh pada menurunnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	1. Melakukan koordinasi dengan Ombudsman untuk memberikan sosialisasi kepada ULE guna meningkatkan pemahaman terhadap Lembaga Ombudsman dan Mal Administrasi; 2. Melakukan koordinasi dengan 12 Perangkat Daerah sampel Provinsi terakit Hasil Penilaian PEKPPP Mandiri untuk membahas indikator penilaian dengan point rendah karena belum semua Perangkat Daerah sampel memperbaharui dokumen standar pelayanan, RTL survei kepuasan masyarakat dan kelengkapan sarana prasarana; 3. Melakukan koordinasi terkait penyusunan Rencana Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Forum Konsultasi Publik

Masalah	Dampak	Solusi
toilet wanita terpisah dengan toilet pria dan kelengkapan dalam toilet, adapun juga fasilitas sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, serta fasilitas yang memadai untuk layanan ruang tunggu seperti pendingin ruangan, TV, sistem antrian yang modrn dll. 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik: terkait dengan laporan serta tindak lanjut atas laporan yang di ajukan oleh masyarakat, aplikasi SP4N-Lapor yang selalu aktif menanggapi saran dan masukan masyarakat serta perbaikan pelayanan yang perlu di tingkatkan. 5. Inovasi: Inovasi yang harus terus di kembangkan oleh Perangkat Daerah guna untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat		karena belum semua Perangkat Daerah menyusun Rencana Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Forum Konsultasi Publik

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka indikator ini tidak bisa dinilai sehingga penilaian mandiri Reformasi Birokrasi tidak dilakukan lagi.	Penyesuaian dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dengan indicator kinerja sasaran.	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan koordinasi dengan Bapperida melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: 000.7.3/09/AP1 tanggal 21 Mei 2024.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Persentase PD yang menerapkan RB tematik: kolaborasi lintas perangkat daerah, penyelarasan indikator program dan kegiatan terhadap RB tematik dengan perencanaan daerah.
- Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A: koordinasi dan pendampingan unit perangkat daerah akan pentingnya pelaksanaan SAKIP
- Indeks Pelayanan Publik: koordinasi dan kolaborasi antara unit Lokasi evaluasi (ULE) yang ditunjuk Bersama tim evaluator provinsi, pendampingan secara berkala terhadap ULE yang dinilai.

b. Faktor Inovasi

- Persentase PD yang menerapkan RB tematik: Pemanfaatan portal RB nasional pada evaluasi pelaksanaan RB.
- Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A: pemanfaatan teknologi dalam hal perencanaan hingga evaluasi kinerja.
- Indeks Pelayanan Publik: pemanfaatan portal yang telah disediakan evaluasi.menpan.go.id

c. Faktor Komitmen

- Persentase PD yang menerapkan RB tematik: dukungan kepala daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja
- Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A: Komitmen kepala daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja
- Indeks Pelayanan Publik: dukungan kepala daerah dan pimpinan PD terhadap perbaikan pelayanan publik

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Melakukan koordinasi dengan Ombudsman untuk memberikan sosialisasi kepada ULE guna meningkatkan pemahaman terhadap Lembaga Ombudsman dan Mal Administrasi;
2. Melakukan koordinasi dengan 12 Perangkat Daerah sampel Provinsi terakit Hasil Penilaian PEKPPP Mandiri untuk membahas indikator penilaian dengan point rendah karena belum semua Perangkat Daerah sampel memperbaharui dokumen standar pelayanan, RTL survei kepuasan masyarakat dan kelengkapan sarana prasarana;
3. Melakukan koordinasi terkait penyusunan Rencana Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Forum Konsultasi Publik karena belum semua Perangkat Daerah menyusun Rencana Tindak

Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Forum Konsultasi Publik

4. Sinkronisasi regulasi secara berkala dan koordinasi dengan Bapperida melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: 000.7.3/09/AP1 tanggal 21 Mei 2024.

d) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
1. Belum Optimalnya Pelayanan Komunikasi Efektif Yaitu Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, HLM dan FGD dan FGD Tingkat Daerah terkait pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di 22 Kab/kota 2. Belum Optimalnya Pelayanan Penyaluran BBM di Daerah terutama melalui pelayanan SPBU Daerah Terpencil 3. Belum Optimalnya Sosialisasi Penyaluran dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang Tepat Sasaran 4. Belum Optimalnya Monitoring Dan Evaluasi Pada Ekonomi – Makro Terkait Penyaluran BBM, Pengendalian Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi dan – Ekonomi Makro Terkait Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi Serta Pemanfaatan SIKP	1. Dalam pengambilan keputusan /kebijakan pimpinan karena berbagai isu pengendalian inflasi kurang update 2. Mengganggu seluruh aspek kehidupan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 3. Mempengaruhi rendahnya penyerapan modal usaha berupa KUR/UMi 4. Kurangnya /belum optimalnya Monev mempengaruhi komunikasi di tingkat Kabupaten/Kota terkait Peran Pemda sebagai wakil pemerintah pusat mengkoordinir sumber daya yang ada dalam pengendalian inflasi, Penyaluran BBM dan penyerapan KUR/UMi yang kesemuannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.	1. Mendorong Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, High Level Meeting, FGD, dapat dilaksanakan dengan baik, kontinu dalam menggali berbagai permasalahan/kendala dalam upaya pengendalian inflasi yang selaras dan terukur dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Mendorong fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat /Pemda serta OPD terkait agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan 3. Mendorong pelaksanaan evaluasi penyaluran KUR/UMi dengan Bank / lembaga nonbank serta OPD yang ada binaan UMKM agar dapat meningkatkan peran dalam memaksimalkan penyerapan KUR/UMi sebagai modal usaha bagi pelaku usaha di berbagai sektor usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 4. Mendukung/mendorong pelaksanaan monev pengendalian inflasi, penyaluran BBM, penyerapan KUR/UMi yang berimbang agar dapat mengetahui berbagai kondisi di lapangan serta adanya pemecahan masalah meminimalisir gejolak di masyarakat

Masalah	Dampak	Solusi
BAGIAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA (SDA)		
1. Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Sumber Daya Alam Unggulan 2. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi SDA Energi Dan Air 3. Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi SDA dan Perlindungana Sumber Daya Hati	1. Belum tercukupinya kebutuhan khususnya komoditi pangan sehingga harus “import” dari luar daerah 2. Belum tercapainya Ratio Elektrifikasi 100% di NTT 3. Belum tercapainya index Kualitas udara yang sesuai standart	1. Pemanfaatan areal/lahan tidur, pendampingan kelompok tani, optimalisasi pengelolaan pertanian, hilirisasi di sektor pertanian peternakan perikanan 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan melibatkan kerjasama investor dan stakeholder 3. Kebijakan daerah yang mengatur tata Kelola lingkungan hidup yang baik
BAGIAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN KOORDINASI BLUD		
1. Kurangnya pemahaman esensi BLUD; 2. Faktor koordinasi internal/antar instansi: 3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM; 4. Faktor regulasi dan dokumen persyaratan administratif: kendala penetapan payung hukum/perkada untuk menetapkan BLUD, ketidaklengkapan dokumen persyaratan administratif; 5. Metode pembinaan yang belum terstruktur sebagai akibat dari belum adanya perumusan kebijakan pembinaan dan supervisi BLUD yang belum terprogram, terukur dan berkelanjutan;	1. Terhambatnya proses transformasi BLUD dalam hal penerapan BLUD menjadi lambat. 2. Penerapan pola keuangan belum maksimal sehingga BLUD kesulitan menerapkan prinsip bisnis yang sehat dan felksibilitas keuanga ; 3. Kinerja pelayanan rendah sebagai akibat dari BLUD belum mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; 4. minimya sinergi dalam pemahaman tata kelola menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan yang berpotensi menimbulkan temuan;	1. memperkuat sinergi antar instansi terkait 2. Penyelarasan regulasi yang mendukung fleksibilitas operasional BLUD; 3. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek yang intensif, penyusunan komitmen bersama, perbaikan tata kelola serta pendampingan secara langsung oleh Biro PAP kepada SKPD yang akan menjadi BLUD; 4. mengimplementasikan sistem e-BLUD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD
BAGIAN PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN KOORDINASI BUMD		
1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan Pada BUMD Karena SDM yang memahami Akusisi Perusahaan (Mengevaluasi Laporan Keuangan Perusahaan) Pada Biro	1. Rendahnya kinerja BUMD; 2. Minimya kontribusi terhadap PAD; 3. BUMD menjadi beban anggaran sebagai akibat dari BUMD	1. Optimalisasi sinergi lintas sektor melalui rapat koordinasi rutin; 2. Peningkatan peran OPD sebagai fasilitator dan klien misalnya dalam hal

Masalah	Dampak	Solusi
Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Sangat Terbatas 2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Terkait Tarif Minum di Kab/Kota Karena Keterbatasan SDM yang Memiliki Keahlian Dalam Menghitung Tarif Air Minum Batas Atas dan Batas Bawah 3. Kolaborasi dan Sinergi Antar perangkat Daerah Terkait Dukungan Kepada BUMD Belum Optimal.	merugi dan tidak produktif sehingga memerlukan pneyertaan modal; 4. Pelayanan publik tidak optimal 5. Ketergantungan terhadap tenaga ahli dari pusat terkait perhitungan tarif batas ats dan batas bawa air minum; 6. Ketidakmampuan menghadapi kompetisi dengan pihak swasta; 7. Terhambatnya pengembangan usaha	pengadaan barang/jasa atau pengelolaan aset; 3. Penerapan Good Coporate Governance dan menerapkan teknologi informasi; 4. Pelatihan dan penguatan SDM BUMD; 5. Pelatihan dan sertifikasi manajemen air minum; 6. Optimalisasi peran Perpamsi dalam memberikan panduan pembinaan
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
1. Cakupan Monev Pembangunan Wilayah yang masih sangat terbatas 2. Ketidaksinkronnya kegiatan pembangunan provinsi dan Kabupaten /Kota dan Balai /Balai Kementerian	1. Ketimpangan Pengambilan Kebijakan, Ketimpangan Pembangunan tidak terdeteksi dini dan efektivitas dan efisiensi pembangunan rendah. 2. Rendahnya efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan pembangunan wilayah serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.	1. Perluasan wilayah Pantauan, penguatan data dan SDM serta pemanfaatan hasil monev sebagai dasar pengambilan kebijakan agar pembangunan lebih merata, efektif dan berkelanjutan. 2. Penguatan peran provinsi sebagai coordinator, integrasi perencanaan-penganggaran, serta monev terpadu lintas level.

b. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
1. Dinamika Pergantian Pejabat Daerah (Mutasi): Seringnya perubahan pejabat di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan pemahaman dan komitmen terhadap kebijakan BLUD tidak berkesinambungan 2. Kurangnya Pemahaman Terhadap Konsep BLUD: Masih terdapat salah persepsi di kalangan eksternal (seperti	1. Biro Perekonomian harus memulai kembali sosialisasi dan pendampingan dari nol. Pejabat baru mungkin belum memahami konsep fleksibilitas BLUD, sehingga pengambilan keputusan terkait BLUD sering lambat.	1. Percepatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 2. Mengaktifkan Tim Pembina BLUD yang melibatkan Biro Perekonomian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),

Masalah	Dampak	Solusi
DPRD atau satuan kerja lainnya) yang menganggap BLUD sama dengan BUMD atau menganggap fleksibilitas keuangan sebagai penyalahgunaan wewenang. 3. Ketakutan Berhadapan dengan Pemeriksa (Auditor): Adanya rasa takut dari pengelola BLUD dan Biro Perekonomian dalam mengambil keputusan atau menerapkan fleksibilitas (seperti pengadaan barang/jasa sendiri) karena takut disalahkan oleh pemeriksa eksternal, meskipun regulasi sudah memperbolehkan. 4. Fragmentasi Birokrasi dan Ego Sektoral: Adanya perbedaan penafsiran aturan antara Biro Perekonomian, Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), dan OPD teknis (Rumah Sakit/Puskesmas) yang menghambat koordinasi dan sinkronisasi. 5. Ketidakjelasan Regulasi Teknis di Daerah: Keterlambatan atau kerumitan dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi dasar operasional fleksibilitas BLUD 6. Kurangnya literasi terkait akses permodalan pada lembaga keuangan 7. Belum fokusnya program dan kegiatan pemerintah daerah pada kemitraan badan usaha 8. Belum optimalnya pembinaan pemda terhadap BUMD 9. Belum Optimalnya Pembinaan Pemda Terhadap SDM BUMD terkait Akusisi Keuangan Perusahaan Daerah a. Kolaborasi dan Sinergi Antar perangkat Daerah Terkait Dukungan Ke BUMD Belum Optimal 10. Kurangnya komitmen tim anggaran atas kegiatan monev pelaksanaan APBD dan APBN a. Frekuensi Rapat Evaluasi yang masih minim atau rendah	2. kesulitan dalam sinkronisasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD dengan APBD, yang menghambat fleksibilitas BLUD dalam penggunaan dana operasional, terutama pada tahap awal pembentukan 3. BLUD kehilangan esensinya karena pengelola takut mengambil keputusan yang fleksibel, seperti pengadaan barang/jasa sendiri atau penggunaan pendapatan fungsional secara langsung. 4. Fleksibilitas keuangan dan pengadaan yang seharusnya menjadi keunggulan BLUD (berdasarkan Permendagri 79/2018) menjadi tidak berjalan maksimal, memaksa BLUD kembali ke cara konvensional yang lambat. 5. kerumitan dan keterlambatan penyusunan Perkada membuat BLUD beroperasi layaknya SKPD biasa, sehingga tujuan peningkatan efisiensi layanan melalui fleksibilitas tidak tercapai. 6. Tumpang Tindih Aturan dan Ketidakpastian Hukum 7. kombinasi permodalan yang lemah dan SDM yang kurang profesional menghambat BUMD untuk mencapai tujuannya sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber	Biro Organisasi, Biro hukum dan Inspektorat untuk penyamaan persepsi. 3. solusi Politis dan Dukungan Pimpinan 4. memfasilitasi sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan peraturan pusat (UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2017) untuk menghindari interpretasi hukum yang berbeda 5. Mendorong penerapan <i>Fit and Proper Test</i> yang transparan dan profesional dalam pemilihan pengurus BUMD untuk mengurangi nepotisme dan intervensi politik, sesuai prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) 6. Membentuk <i>holding company</i> atau melakukan restrukturisasi vertikal/horisontal untuk BUMD yang memiliki bidang usaha sejenis, sehingga tidak bergantung pada APBD dan meningkatkan efisiensi 7. Mendorong BUMD melakukan inovasi produk dan teknologi agar mampu bersaing dengan pihak swasta. 8. Membangun sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan

Masalah	Dampak	Solusi
b. Penyampaian Laporan APBD/APBN yang belum tepat waktu	Pendapatan Asli Daerah (PAD). 8. BUMD tidak dapat berkontribusi dengan optimal pada pelayanan publik maupun berkontribusi terhadap BUMD 9. menyebabkan BUMD gagal mencapai fungsi ganda sebagai entitas bisnis yang profit oriented sekaligus penyedia layanan publik yang efisien.	kinerja BUMD secara <i>real-time</i> kepada Biro Perekonomian, guna mempermudah pengawasan dan pembinaan.

3.2 Faktor Pendorong

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa: Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing.
3. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal
4. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Mendorong Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, High Level Meeting, FGD
2. Mendorong pelaksanaan evaluasi penyaluran KUR/UMi dengan Bank / lembaga nonbank serta OPD yang ada binaan UMKM agar dapat meningkatkan peran dalam memaksimalkan penyerapan KUR/Umi
3. Penyelarasan regulasi yang mendukung fleksibilitas operasional BLUD
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek yang intensif, penyusunan komitmen bersama, perbaikan tata kelola serta pendampingan secara langsung oleh Biro PAP kepada SKPD yang akan menjadi BLUD

5. mengimplementasikan sistem e-BLUD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD
6. Mengaktifkan Tim Pembina BLUD yang melibatkan Biro Perekonomian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Organisasi, Biro hukum dan Inspektorat untuk penyamaan persepsi
7. Mendorong penerapan *Fit and Proper Test* yang transparan dan profesional dalam pemilihan pengurus BUMD untuk mengurangi nepotisme dan intervensi politik, sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
8. Membentuk *holding company* atau melakukan restrukturisasi vertikal/horisontal untuk BUMD yang memiliki bidang usaha sejenis, sehingga tidak bergantung pada APBD dan meningkatkan efisiensi
9. Membangun sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan kinerja BUMD secara *real-time* kepada Biro Perekonomian, guna mempermudah pengawasan dan pembinaan.

e) Biro Pemerintahan

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence based)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat antara lain usulan tentang bantuan sosial dan hibah belum dilaksanakan secara optimal	Proposal permohonan hibah dan bansos diterima di Biro Pemerintahan pada saat tahun berjalan, sehingga proses verifikasi baru dilakukan saat tahun berjalan	Data-data tentang bantuan sosial dan hibah dimasukkan dalam perubahan Renja
Penetapan anggaran dalam KUA PPAS lebih rendah dari usulan dalam Renja	Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan akan dilakukan efisiensi berdasarkan prioritas	Efisiensi berdasarkan prioritas

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Tidak adanya PNS fungsional Perencana di Biro Pemerintahan, pelaksanaan tugas perencanaan dilakukan oleh pelaksana	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencanaan

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat antara lain usulan tentang bantuan sosial dan hibah belum dilaksanakan secara optimal	Proposal permohonan hibah dan bansos diterima di Biro Pemerintahan pada saat tahun berjalan, sehingga proses verifikasi baru dilakukan saat tahun berjalan	Data-data tentang bantuan sosial dan hibah dimasukkan dalam perubahan Renja

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

f) Biro Administrasi Pimpinan

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
1. Tingginya Intensitas Kegiatan Gubernur dan Wakil	10. Perubahan yang terjadi secara	1. Memperkuat koordinasi internal

Masalah	Dampak	Solusi
Gubernur di awal kepemimpinan/masa jabatan baik dalam bentuk kunjungan kerja, rapat koordinasi, pertemuan lintas sektor maupun kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung meningkatkan kebutuhan layanan administrasi, keprotokolan, dokumentasi & publikasi yang harus difasilitasi oleh Biro Administrasi Pimpinan khususnya bagian materi dan komunikasi pimpinan & bagian protokol 2. Belum optimalnya penyampaian data perencanaan dan kepegawaian dari seluruh biro	cepat berpotensi mempengaruhi optimalisasi dukungan pelayanan kepada pimpinan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan agenda pimpinan. 11. Dokumen perencanaan maupun dokumen evaluasi kinerja dan pelaporan belum sepenuhnya tepat waktu dan komprehensif	antar bagian dan unit terkait di Biro Administrasi Pimpinan untuk memastikan penyiapan materi, dokumentasi, publikasi, dan fasilitasi kegiatan pimpinan berjalan selaras, tepat waktu, dan sesuai prioritas agenda. 2. Penguatan koordinasi lintas biro dan standarisasi mekanisme pelaporan

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Penyesuaian sistem kerja implementasi Pergub No. 45 dan 69 Tahun 2023 yang belum seluruhnya dipahami dan dilaksanakan oleh biro-biro	Proses kerja yang belum sepenuhnya berjalan sesuai pengaturan dalam Pergub SOTK dan Pergub Sistem Kerja, terutama dalam pembentukan dan pelaksanaan tim kerja.	Melakukan penguatan pemahaman dan implementasi Pergub SOTK dan Pergub Sistem Kerja dengan FGD/sosialisasi teknis, penegasan peran dan tanggung jawab unit kerja, serta pembentukan dan pengoperasian tim kerja secara konsisten sesuai ketentuan regulasi.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
1. Pada Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, beban kerja tinggi terutama dipengaruhi oleh tuntutan penyiapan materi pimpinan yang harus akurat, kontekstual, dan disesuaikan dengan dinamika isu strategis daerah. Proses ini seringkali berlangsung dalam waktu yang terbatas dan memerlukan koordinasi cepat dengan	1. Berpotensi mempengaruhi optimalisasi penyiapan materi pimpinan, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas substansi dan efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, apabila tidak didukung dengan pengelolaan beban	i. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait manajemen komunikasi publik, dan dokumentasi & publikasi kegiatan pimpinan, sehingga setiap ASN mampu merespons kebutuhan pimpinan dengan cepat dan akurat.

Masalah	Dampak	Solusi
perangkat daerah terkait, sehingga menuntut kesiapsiagaan SDM. 2. Intensitas publikasi dan dokumentasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tinggi 3. Pada Bagian Protokol intensitas fasilitasi acara Gubernur dan Wakil Gubernur yang tinggi mempengaruhi beban kerja dari Tim Protokol 4. Belum ada Jabatan Fungsional Perencana di Biro Administrasi Pimpinan	kerja dan mekanisme kerja yang memadai. 2. Berpotensi mempengaruhi pelayanan tim dokumentasi dan publikasi karena faktor kelelahan. 3. Berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pelayanan tim protokol karena faktor kelelahan. 4. Pelaksanaan tugas-tugas perencanaan belum optimal	ii. Pengaturan distribusi tugas, penambahan dan penguatan SDM aparatur yang profesional melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait publikasi dan dokumentasi ii. Pengaturan distribusi tugas, penambahan serta penguatan SDM aparatur yang professional melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait manajemen keprotokolan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan. iv. Koordinasi dan tindaklanjut dalam upaya pemenuhan Jabatan Fungsional Perencana dengan BKD dan Bapperida.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Intensitas koordinasi lintas daerah dalam mendukung agenda pimpinan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

Terbangunnya koordinasi yang baik antar Bagian dalam Biro Administrasi Pimpinan serta dengan perangkat daerah lain mendukung kelancaran layanan administrasi perencanaan dan kepegawaian setda, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan.

b. Faktor Inovasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan surat, jadwal pimpinan, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan kinerja meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

c. Faktor Komitmen

Dukungan dan komitmen pimpinan daerah serta pimpinan biro dalam menjaga kualitas layanan administrasi dan keprotokolan menjadi faktor utama pencapaian kinerja yang melampaui target.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan disiplin dan kualitas pelaporan data perencanaan, kepegawaian, dan kinerja dari seluruh biro.
2. **Efisiensi Belanja:** Mempertahankan keselarasan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja yang telah menunjukkan kategori efisien.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Memperluas pemanfaatan sistem informasi untuk koordinasi, dokumentasi, dan monitoring kinerja.
4. **Peningkatan SDM:** Melaksanakan pelatihan teknis khususnya di bidang perencanaan dan kepegawaian, komunikasi dan publikasi, keprotokolan, serta pemenuhan Fungsional Perencana di Biro Administrasi Pimpinan.

g) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi	Keterangan
Belum optimalnya integrasi data pengadaan barang/jasa tingkat Provinsi Lintas Perangkat Daerah	Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya dilakukan secara optimal	Penguatan sistem pengadaan berbasis satu data pengadaan Provinsi melalui Tim Kerja dan peningkatan koordinasi per Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan data pengadaan Provinsi	- Komponen ITKP (komponen sistem informasi, nilai ITKP 2024: 72, sedangkan target 2025: 74, target 2026: 76): pencatatan paket yang non tender/ Pengadaan langsung/ swakelola dilaksanakan diluar sistem (seharusnya dilakukan pencatatan di E-Kontrak) oleh PPK Perangkat Daerah. - Paket pelaksanaan kegiatan konstruksi (komponen pembinaan dan pengawasan ada di Biro PBJ) dan laporan yang diberikan dari PD tidak terlalu optimal, sehingga Ketika monitoring lapangan baru dilakukan perhitungan ulang dan hasilnya tidak banyak yang sesuai

Masalah	Dampak	Solusi	Keterangan
			dengan progress dilapangan.
Kekurangan dana untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lapangan	Pelaksanaan monitoring pengadaan barang/jasa apabila dilakukan selama 3 (tiga) hari dampaknya pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.	Usulan untuk menambah alokasi pembiayaan pelaksanaan monitoring menjadi 5 (lima) hari	- Rekomendasi untuk pengaturan internal Biro PBJ untuk membagi jumlah hari berdasarkan pagu yang ada. - Diusulkan sesuai kebutuhan dan urgensi untuk dibahas bersama di TAPD.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan regulasi pengadaan barang/jasa terkait insentif Pokja Pemilihan dan honorarium PPK	~ Insentif Pokja Pemilihan tidak sesuai dengan resiko beban kerja ~ PPK tidak memperoleh honorarium	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum, dan Biro PBJ untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai insentif Pokja Pemilihan dan honorarium PPK

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional pengelola PBJ	Hanya 21 orang JF PPBJ yang melaksanakan proses pemilihan tender, tender dini, seleksi dan penunjukkan langsung diatas 200 juta dari total kebutuhan 30 orang JF PPBJ. Berpengaruh kepada penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Penyusunan segera Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ kedalam Aplikasi SiRenaksi Pengangkatan kedalam JF PPBJ sesuai pasal 12 PerMenPan RB No. 1 Tahun 2023 dengan mekanisme: Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpasing dan penyetaraan
Keterbatasan jumlah PPK yang memiliki sertifikat kompetensi tipe C, dan B serta Pejabat Pengadaan yang memiliki kompetensi Level-2	Masih menggunakan PPK dan PP dari Biro PBJ Berpengaruh kepada penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Penyusunan segera Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ kedalam Aplikasi SiRenaksi Meningkatkan kompetensi staf melalui sertifikasi kompetensi berbasis MOOC (online)

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah yang memiliki jarak tempuh yang jauh dan kondisi yang sulit dijangkau	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Catatan:

- Komponen ITKP ada 3 komponen (Sistem Informasi, SDM dan Kelembagaan).
- Tahun 2026 (IKU1: ITKP, IKU2: Pengadaan Dalam Negeri, dan IKU3: Pencegahan Korupsi area Pengadaan).

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Tim Kerja, Forum Clearing House, Klinik Pengadaan, Forum Pengadaan,

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD, Sirup, Amel, Blackbox LKPP, SPSE NTT, platform digital e-purchasing, SiRenaksi, SIUKPBJ

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), Instruksi Gubernur, MoU

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum, dan Biro PBJ untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai insentif Pokja Pemilihan dan honorarium PPK
2. Penyusunan segera Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ kedalam Aplikasi SiRenaksi
3. Meningkatkan kompetensi staf melalui sertifikasi kompetensi berbasis MOOC (online).

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan akses data dalam pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya ruang monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan dan sub kegiatan	Peningkatan koordinasi antar bagian dalam pengelolaan data capaian kinerja

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat (Inpres nomor 1 tahun 2025)	Perubahan target dan indikator kinerja dokumen sesuai regulasi serta perencanaan yang berubah dan tidak konsistensi dengan rancangan awal	Penyesuaian target dan indikator kinerja serta Sinkronisasi regulasi secara berkala

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana dan pelaksana kegiatan di bagian-bagian	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis oleh pelaksana dan penanggungjawab kegiatan	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan Kebijakan Regional, Dinamika Politik dan Agenda DPRD yang insidental serta Tuntutan (laporan) Publik (Masyarakat)	Keterlambatan dalam fasilitasi kegiatan serta Agenda yang berubah	Penyesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan dari koordinasi teknis kegiatan serta perubahan agenda/jadwal kegiatan

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Koordinasi dengan pemerintah berjalan harmonis dan efektif;
- Koordinasi dengan DPRD sebagai salah satu stakeholder kegiatan dilakukan secara intensif.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan aplikasi BadeKat sebagai sarana pelaporan serta penyampaian aspirasi masyarakat dalam menghadapi tuntutan akan kinerja DPRD.

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan DPRD serta anggota DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berbasis kinerja dan pelaporan

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data kinerja untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).

2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan aplikasi untuk mengatasi tuntutan stakeholder (Masyarakat) akan kinerja
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Belum seluruh proses administrasi perkantoran terintegrasi dalam sistem digital	Terjadi keterlambatan pada sebagian layanan administrasi sehingga kualitas pelayanan belum optimal	Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi perkantoran terintegrasi dan optimalisasi digitalisasi layanan
Keterbatasan sarana prasarana pendukung administrasi dan teknologi informasi	Efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran belum maksimal	Penguatan dukungan sarana prasarana dan peningkatan kualitas jaringan teknologi informasi
Penyesuaian kebijakan nasional dan daerah pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Konsistensi penjabaran program RPD ke dalam dokumen perencanaan lainnya belum sepenuhnya tercapai	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan secara berkelanjutan
Pemahaman teknis perencanaan yang belum merata pada seluruh perangkat daerah	Terjadi perbedaan interpretasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM perencana melalui bimbingan teknis dan pendampingan
Perbedaan kualitas dan kesiapan dokumen perencanaan antar perangkat daerah	Kesesuaian dan keselarasan dokumen perencanaan membutuhkan waktu penyesuaian lebih lama	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sejak tahap awal perencanaan
Koordinasi lintas bidang pembangunan belum optimal	Sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor belum sepenuhnya selaras	Meningkatkan intensitas koordinasi lintas bidang dan forum perencanaan terpadu
Tindak lanjut dan implementasi rekomendasi hasil riset membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam kebijakan belum sepenuhnya optimal	Mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi riset melalui koordinasi lintas perangkat daerah
Keterbatasan dukungan sumber daya penelitian dan inovasi	Cakupan dan jumlah rekomendasi riset yang	Optimalisasi alokasi sumber daya serta penguatan kolaborasi

Masalah	Dampak	Solusi
	dihasilkan masih terbatas	dengan perguruan tinggi dan lembaga riset

b. Faktor Regulasi

Masalah (Regulasi)	Dampak	Solusi (Regulasi)
Perubahan dan penyesuaian ketentuan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Prosedur pelayanan administrasi perkantoran memerlukan penyesuaian	Penyesuaian dan pembaruan SOP pelayanan administrasi sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya
Sinkronisasi regulasi pengelolaan keuangan dan administrasi daerah, antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belum sepenuhnya optimal	Implementasi kebijakan administrasi dan dukungan program belum seragam	Harmonisasi regulasi internal perangkat daerah dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019
Perubahan kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah, antara lain Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Substansi dokumen perencanaan daerah memerlukan penyesuaian	Penyesuaian dokumen perencanaan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuatakhirannya	Konsistensi penjabaran RPD ke RKPD, Renstra, dan Renja belum sepenuhnya optimal	Penyelarasan dokumen perencanaan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Penerapan sistem perencanaan berbasis SIPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Proses sinkronisasi dan input data perencanaan memerlukan waktu penyesuaian	Optimalisasi penerapan SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
Perbedaan penafsiran terhadap regulasi perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian dan sinkronisasi dokumen perencanaan lintas perangkat daerah belum optimal	Penyamaan persepsi dan asistensi penerapan regulasi perencanaan
Regulasi pemanfaatan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah belum sepenuhnya optimal	Hasil inovasi daerah belum maksimal dimanfaatkan dalam kebijakan	Penguatan penerapan PP Nomor 38 Tahun 2017 dalam perumusan kebijakan daerah
Ketentuan kelitbangan dan pemanfaatan hasil riset daerah, antara lain Permendagri Nomor 104 Tahun 2018	Hasil riset belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan	Penguatan pemanfaatan hasil riset sesuai Permendagri Nomor 104 Tahun 2018
Belum tersusunnya pedoman teknis daerah	Implementasi inovasi dan rekomendasi	Penyusunan pedoman teknis daerah sebagai

Masalah (Regulasi)	Dampak	Solusi (Regulasi)
sebagai tindak lanjut regulasi inovasi dan kelitbangan	riset memerlukan waktu penyesuaian	turunan PP 38 Tahun 2017 dan regulasi terkait

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah (Regulasi)	Dampak	Solusi (Regulasi)
Jumlah pegawai sebanyak 175 orang belum sepenuhnya sebanding dengan distribusi beban kerja dan kompleksitas tugas	Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tertentu belum optimal	Penataan distribusi pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan prioritas program
Kompetensi teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja belum merata pada seluruh pegawai	Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja belum seragam	Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan
Pemahaman pegawai terhadap regulasi perencanaan dan administrasi pemerintahan belum optimal	Terjadi perbedaan penerapan ketentuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Penguatan sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis kepada pegawai
Tingkat rotasi dan mutasi pegawai	Keberlanjutan pelaksanaan program dan pengelolaan pengetahuan kerja terganggu	Penguatan mekanisme alih pengetahuan, dokumentasi kerja, dan pembinaan internal
Penguasaan teknologi informasi pendukung perencanaan dan administrasi belum merata	Pemanfaatan sistem informasi belum optimal	Peningkatan literasi digital dan pelatihan penggunaan aplikasi pendukung
Beban kerja pegawai perencanaan dan analisis relatif tinggi	Proses perencanaan dan evaluasi memerlukan waktu lebih lama	Optimalisasi kerja tim dan penguatan pembagian tugas sesuai fungsi
Budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi belum sepenuhnya merata	Optimalisasi capaian kinerja dan inovasi belum maksimal	Penguatan budaya kerja kinerja dan inovasi melalui pembinaan dan motivasi
Jumlah pegawai sebanyak 175 orang belum sepenuhnya sebanding dengan distribusi beban kerja dan kompleksitas tugas	Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tertentu belum optimal	Penataan distribusi pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan prioritas program
Kompetensi teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja belum merata pada seluruh pegawai	Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja belum seragam	Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan

d. Faktor Eksternal

Masalah (Regulasi)	Dampak	Solusi (Regulasi)
Perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada prioritas pembangunan daerah	Penyesuaian program dan kegiatan daerah memerlukan waktu	Melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran secara adaptif
Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat	Target dan pelaksanaan program pembangunan memerlukan penyesuaian	Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi sosial ekonomi
Koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal belum sepenuhnya optimal	Sinkronisasi program lintas sektor belum maksimal	Peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan
Ketersediaan dan kualitas data dari instansi eksternal belum sepenuhnya optimal	Proses perencanaan dan evaluasi kinerja memerlukan penyesuaian	Penguatan koordinasi penyediaan dan pemutakhiran data dengan instansi terkait
Perubahan kondisi ekonomi makro	Daya dukung anggaran dan pelaksanaan program terpengaruh	Optimalisasi prioritas program dan efisiensi penggunaan anggaran
Kondisi geografis dan karakteristik wilayah	Pelaksanaan kegiatan lapangan memerlukan waktu dan biaya tambahan	Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi wilayah
Dinamika politik dan kebijakan daerah	Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program memerlukan penyesuaian	Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif;
- Koordinasi yang baik memfasilitasi sinkronisasi perencanaan, percepatan pengambilan keputusan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando;
- Inovasi ini mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja;
- Komitmen pimpinan mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan program, serta pencapaian target kinerja yang tinggi.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi perkantoran terintegrasi dan optimalisasi digitalisasi layanan
2. Penguatan dukungan sarana prasarana dan peningkatan kualitas jaringan teknologi informasi
3. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan secara berkelanjutan
4. Peningkatan kapasitas SDM perencana melalui bimbingan teknis dan pendampingan
5. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sejak tahap awal perencanaan
6. Meningkatkan intensitas koordinasi lintas bidang dan forum perencanaan terpadu
7. Mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi riset melalui koordinasi lintas perangkat daerah
8. Optimalisasi alokasi sumber daya serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset
9. Penyesuaian dan pembaruan SOP pelayanan administrasi sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya
10. Harmonisasi regulasi internal perangkat daerah dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019
11. Penyesuaian dan penyelarasan dokumen perencanaan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
12. Optimalisasi penerapan SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
13. Penyamaan persepsi dan asistensi penerapan regulasi perencanaan
14. Penguatan pemanfaatan hasil riset sesuai Permendagri Nomor 104 Tahun 2018
15. Penyusunan pedoman teknis daerah sebagai turunan PP 38 Tahun 2017 dan regulasi terkait
16. Penataan distribusi pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan prioritas program
17. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan
18. Penguatan sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis kepada pegawai
19. Penguatan mekanisme alih pengetahuan, dokumentasi kerja, dan pembinaan internal

20. Peningkatan literasi digital dan pelatihan penggunaan aplikasi pendukung
21. Optimalisasi kerja tim dan penguatan pembagian tugas sesuai fungsi
22. Penguatan budaya kerja kinerja dan inovasi melalui pembinaan dan motivasi
23. Melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran secara adaptif
24. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi sosial ekonomi
25. Peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan
26. Penguatan koordinasi penyediaan dan pemutakhiran data dengan instansi terkait
27. Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi wilayah
28. Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan.

2. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan dan gangguan sistem informasi keuangan. Sistem/aplikasi keuangan (SIPD, atau aplikasi pendukung lainnya) sering mengalami error, down, atau lambat.	Terhambatnya Proses Penginputan dan Pengolahan Data Keuangan	Meningkatkan Koordinasi dengan Pengelola Sistem/ Aplikasi (Pusat/Daerah) untuk percepatan penanganan gangguan teknis

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Kebijakan dan regulasi di bidang keuangan daerah (Permendagri, PMK, PP) kerap mengalami perubahan, sehingga membutuhkan penyesuaian cepat pada perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Perubahan regulasi yang cepat menyebabkan dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD) perlu sering disesuaikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan.	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perubahan Permendagri, PMK, dan PP serta menyusun ringkasan kebijakan untuk internal perangkat daerah

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga IT secara internal	Aplikasi keuangan sering terkendala karena tidak ada penanganan teknis cepat.	1. Penambahan tenaga IT 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan IT dasar dan lanjutan bagi pegawai yang ada dan mengoptimalkan

		peran Pranata Komputer atau pegawai beralatar belakang IT untuk fokus menangani sistem dan aplikasi.
--	--	--

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Perbedaan pemahaman, keterlambatan penyampaian data, serta kurangnya komitmen dari perangkat daerah lain dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah	Data yang terlambat disampaikan berdampak pada keterlambatan konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan daerah	1. Menyusun SOP, timeline, serta format baku penyampaian data yang wajib dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah 2. melakukan sosialisasi atau bimtek pengelolaan keuangan perangkat daerah

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Melakukan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan SIPD

c. Faktor Komitmen

- Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk pengelolaan keuangan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan realisasi anggaran tercapai sesuai target yang ditetapkan.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan.
4. **Peningkatan SDM:** Penambahan tenaga IT dan peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan IT dasar dan lanjutan bagi pegawai yang ada dan mengoptimalkan peran Pranata Komputer atau pegawai beralatar belakang IT untuk fokus menangani sistem dan aplikasi.

3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Tidak terbayarkan insentif bagi pegawai yang disebabkan oleh rendahnya pencapaian PAD yang bersumber dari pajak	Realisasi belanja untuk program penunjang urusan perangkat daerah tidak mencapai target	Optimalisasi penagihan melalui door to door, tilang, samsat keliling, samsat corner, pembayaran pajak secara online
Survei standar harga ke 21 kabupaten untuk penyusunan buku standar harga yang seharusnya dilaksanakan pada awal tahun oleh tim BPAD Provinsi tidak terlaksana sesuai rencana.	Tidak terlaksananya survei tersebut menyebabkan realisasi belanja pengelolaan barang milik daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.	Disarankan agar survei standar harga di 21 kabupaten dilaksanakan oleh UPTD masing-masing
Pelaksanaan kegiatan Pensertifikatan dengan pihak ketiga (BPN) hanya dilakukan selama 6 bulan sehingga pembayaran honor hanya 6 bulan	Realisasi belanja pengelolaan barang milik daerah tidak mencapai target.	Komitmen pelaksanaan kegiatan oleh para pihak secara tepat waktu
Pelaksanaan kegiatan dengan pihak ketiga (BPN) hanya dilakukan selama 6 bulan mengakibatkan sertifikat tanah yang diterbitkan tidak mencapai target	Potensi PAD yang bersumber dari penyewaan aset tanah tidak maksimal	Komitmen pelaksanaan kegiatan oleh para pihak secara tepat waktu
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyitaan rokok ilegal melalui kerja sama dengan Bea Cukai di 22 kabupaten/kota tidak dilaksanakan secara penuh atau 100 persen, sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana sesuai dengan target wilayah dan jadwal yang ditetapkan.	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut berdampak pada realisasi belanja pengelolaan pendapatan daerah yang tidak mencapai target,	Memetakan dan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta penindakan rokok ilegal sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 143 Tahun 2023 agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor mengakibatkan sebagian besar penerimaan pajak yang seharusnya menjadi kewenangan BPAD harus dibagikan kepada kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku	Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan yang diterima BPAD menjadi lebih kecil karena sebesar 66% dialokasikan kepada kabupaten/kota, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan di tingkat provinsi tidak dapat dioptimalkan.	Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait penetapan besaran opsen pajak, serta mendorong kabupaten/kota untuk memaksimalkan penerapan PKS sebesar 2,5% sebagai upaya bersama dalam meningkatkan penerimaan PAD.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Jumlah fungsional penilai aset pemerintah sangat terbatas	Banyak aset pemerintah yang belum dapat dikerjasamakan karena belum dinilai	Menambah tenaga fungsional penilai aset pemerintah untuk mempercepat proses penilaian dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
1 orang ASN yang sudah mengikuti bimtek penilai aset di Kemedagri pada tahun 2024 belum menerima sertifikat dari Kemenkeu sehingga belum melakukan fungsi sebagai penilai aset	Banyak aset pemerintah yang belum dapat dikerjasamakan karena belum dinilai	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna percepatan penerbitan sertifikat penilai aset agar ASN yang bersangkutan dapat segera melaksanakan tugas penilaian aset.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Kabupaten/kota belum semua mengalokasikan anggaran untuk memungut pajak kendaraan bermotor	Capaian pajak kendaraan bermotor belum mencapai target	Berkoordinasi dengan bapenda kabupaten/kota untuk komit melaksanakan kesepakatan didalam PKS

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Keberadaan 22 UPT pendapatan daerah memudahkan koordinasi sampai tingkat desa

b. Faktor Inovasi

- Aplikasi Pro NTT memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor
- Kerjasama dengan BPN Provinsi NTT untuk percepatan sertifikasi aset
- Kerjasama dengan kejaksa terkait penertiban aset

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pemerintah daerah 22 kabupaten/kota dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Melakukan optimalisasi penagihan pajak melalui penagihan door to door, penerapan tilang, penyediaan layanan Samsat keliling dan Samsat corner, serta pengembangan sistem pembayaran pajak secara online.
2. Disarankan agar survei standar harga di 21 kabupaten dilaksanakan oleh UPTD masing-masing
3. komitmen pelaksanaan kegiatan oleh para pihak secara tepat waktu
4. Menambah tenaga fungsional penilai aset pemerintah untuk mempercepat proses penilaian dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat penilai aset pemerintah.
6. Berkoordinasi dengan Bapenda kabupaten/kota untuk memastikan komitmen pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Proses penilaian kompetensi dan seleksi jabatan membutuhkan waktu yang cukup panjang serta bergantung pada rekomendasi instansi pusat. Selain itu, proses administrasi kepegawaian masih menghadapi kendala teknis berupa belum optimalnya pemutakhiran data ASN pada aplikasi MyASN dan	Pelaksanaan pelantikan jabatan dan penyelesaian layanan kenaikan pangkat serta pensiun tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan berdampak pada keterlambatan pencapaian target kinerja.	Tetap melaksanakan seleksi dan penilaian kompetensi, meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat, serta menghimbau ASN untuk melakukan pemutakhiran data MyASN secara berkala.

Masalah	Dampak	Solusi
penandatanganan SK yang masih dilakukan secara manual.		

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Adanya ketentuan khusus menjelang dan pasca pergantian kepala daerah terkait izin seleksi dan rekomendasi pelantikan.	Proses pengisian jabatan tertentu, termasuk JPTP hasil pemetaan dan pelantikan Sekretaris Daerah, belum dapat dilaksanakan.	Melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan serta koordinasi intensif dengan instansi yang berwenang.

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Masih kurangnya pemahaman sebagian pejabat yang berwenang di Perangkat Daerah terkait proses pembinaan dan penegakan disiplin PNS sesuai ketentuan.	Pengawasan dan penegakan disiplin ASN di lingkungan Perangkat Daerah belum berjalan optimal.	Menyampaikan secara berjenjang kepada Perangkat Daerah mengenai pembinaan PNS indisipliner sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Ketergantungan pada instansi eksternal, khususnya dalam penyelesaian administrasi SLKS di Kantor Setmilpres Presiden.	Penyelesaian administrasi SLKS belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	Melakukan koordinasi dengan pengelola SLKS di Kantor Setmilpres Presiden untuk penyesuaian jadwal penyelesaian.

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Terjalannya koordinasi yang berkelanjutan antara BKD Provinsi NTT dengan instansi pusat dan Perangkat Daerah.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan media komunikasi seperti grup WhatsApp dan pesan pribadi dalam penyampaian informasi kepegawaian.
- Penyampaian informasi atau sosialisasi program dan kegiatan BKD Provinsi NTT melalui media sosial (Instagram, Facebook, Youtube dan website BKD Provinsi NTT).

c. Faktor Komitmen

- Komitmen BKD Provinsi NTT dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan sistem kepegawaian serta tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Tetap melaksanakan seleksi dan penilaian kompetensi, meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat, serta menghimbau ASN untuk melakukan pemutakhiran data MyASN secara berkala
2. Melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan serta koordinasi intensif dengan instansi yang berwenang
3. Menyampaikan secara berjenjang kepada Perangkat Daerah mengenai pembinaan PNS indisipliner sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
4. Melakukan koordinasi dengan pengelola SLKS di Kantor Setmilpres Presiden untuk penyesuaian jadwal penyelesaian.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Internet tidak stabil	Penyelenggaraan pelatihan secara Blended dan Full e-Learning tidak dapat berjalan dengan optimal	Berkoordinasi dengan Diskominfo NTT untuk penambahan kuota internet.
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pelatihan kurang memadai	PAD tidak capai target	Berkoordinasi dengan Gubernur NTT melalui Sekda dan TAPD untuk menyediakan anggaran pemeliharaan.

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat	Penyesuaian kurikulum penyelenggaraan pelatihan yang memerlukan waktu dan berdampak pada waktu pelaksanaan pelatihan dan penganggaran	1. Sinkronisasi internal dan eksternal (Gubernur NTT melalui Sekda & TAPD) 2. Pembentukan Tim Kerja terkait pembentukan produk hukum

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah kualitas SDM (pengelola, penyelenggara, pengajar) yang kompeten dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan	1. Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan belum berjalan dengan optimal 2. Pengelola, penyelenggara, pengajar belum tersertifikasi sehingga tidak dapat terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan	1. Berkoordinasi dengan LAN-RI untuk mengikuti pelatihan bagi SDM. 2. Pengelola, penyelenggara, pengajar wajib mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh LAN-RI

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan khususnya bagi peserta pelatihan	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Berkoordinasi pengelola kepegawaian di daerah agar memusatkan tempat pelatihan di wilayah yang terjangkau internet

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Forum koordinasi pengelola kepegawaian lintas pemerintah berjalan efektif

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan Si-Pijar dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

c. Faktor Komitmen

- Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja.
- Dukungan kebijakan Lan-RI dalam pelaksanaan pelatihan

d. Faktor Eksternal

- Kebijakan Pemerintah terkait Jam Pelajaran (JP) untuk ASN pertahun minimal 20 JP untuk PNS dan 22 JP untuk PKKK.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Diskominfo Provinsi NTT untuk penambahan kuota internet.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Gubernur NTT melalui Sekda dan TAPD untuk menyediakan anggaran pemeliharaan.
3. Sinkronisasi internal dan eksternal (Gubernur NTT melalui Sekda & TAPD).
4. Berkoordinasi dengan LAN-RI untuk mengikuti pelatihan bagi SDM.

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat	Penyesuaian dokumen perencanaan memerlukan waktu dan berdampak pada konsistensi pelaksanaan	Sinkronisasi regulasi secara berkala dan penguatan fungsi koordinatif Bappeda

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana.	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Karakteristik wilayah kepulauan	Keterbatasan jangkauan koordinasi lapangan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.2 Faktor Pendorong

- **Faktor Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Faktor Inovasi** : Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Faktor Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).

2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

7. Badan Penghubung Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan Data Base tentang Diaspora NTT diluar wilayah NTT	Sulitnya membangun komunikasi dan jejaring yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan komunitas diaspora NTT di luar daerah, baik untuk kepentingan sosial, budaya, ekonomi, maupun promosi daerah	Penyusunan Database Terpadu Diaspora NTT, melalui Kunjungan Silaturahmi ke IKB-IKB
Keterbatasan Data Diaspora NTT yang belum memiliki KTP	• Hambatan dalam Akses Layanan Administrasi Kependudukan • Terbatasnya Akses Terhadap Pelayanan Publik • Tidak Tercatat dalam Sistem Data Kependudukan Nasional • Kendala dalam Mobilitas dan Legalitas Domisili • Hambatan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Politik • Sulitnya Pemerintah Daerah Melakukan Pendataan dan Perlindungan	• Koordinasi Dukcapil setiap provinsi • Penguatan koordinasi lintas daerah dan lintas instansi
Kurangnya informasi dari daerah terkait potensi-potensi daerah yang dimiliki setiap kab/kota	• Hambatan dalam promosi investasi dan kerja sama • Terbatasnya Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM • Tidak optimalnya penyampaian informasi potensi daerah kepada pihak eksternal • Keterbatasan informasi menyebabkan perencanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya mencerminkan potensi	• Membuat database potensi daerah terintegrasi di tingkat provinsi yang bersumber dari kabupaten/kota dan diperbarui secara berkala • Meningkatkan koordinasi dan Komunikasi Antar Pemerintah Daerah

Masalah	Dampak	Solusi
	unggulan daerah	
Kurang optimalnya koordinasi SKPD di Provinsi NTT dan Pemerintah Kab/Kota (yang merupakan pemangku kepentingan) dengan Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta dalam menjalankan fungsi fasilitasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	• Fungsi Fasilitasi Antar Lembaga Tidak Berjalan Maksimal • Terhambatnya Proses Koordinasi dan Konsultasi di Tingkat Pusat • Kurang Efektifnya Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor	Koordinasi, komunikasi dan menjalin Kerjasama yang baik dengan mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan kegiatan

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Regulasi terkait retribusi penjualan produk unggulan daerah Badan Penghubung tidak tercantum di Perda	Menjadi temuan BPK karena tidak ada dasar hukum penerimaan	Bekerjasama dengan UMKM dan bagi keuntungan

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Kompetensi SDM Aparatur kurang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi	Beban kerja tinggi, pelaksanaan tugas tidak optimal dan tumpang tindih pekerjaan	Memaksimalkan SDM yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
Kurang lengkapnya berkas dan informasi yang diberikan oleh pihak Kabupaten/kota	Fungsi fasilitasi tingkat pusat terhambat	Optimalisasi komunikasi dengan pihak kabupaten/ kota
Banyak Hotel dan Penginapan yang lebih menarik minat pegawai daerah (dengan tarif yang setara wisma NTT) pada saat bertugas di Jakarta dibandingkan dengan penginapan Wisma NTT	Kurangnya kunjungan tamu yang menginap di Wisma NTT	Pemeliharaan Gedung dan bangunan secara bertahap dan menyesuaikan dengan dana yang tersedia

Masalah	Dampak	Solusi
Tarif wisma NTT belum sesuai dengan SBM	Belum optimalnya pendapatan	Mengajukan kenaikan tarif

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Koordinasi dan komunikasi dengan Diaspora NTT terkait masalah sosial yang dihadapi berjalan dengan baik;
- Koordinasi terkait even-even seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Swasta dan pihak lain memberikan kesempatan Badan Penghubung Provinsi NTT untuk ikut serta;
- Lancarnya Koordinasi, komunikasi dan menjalin Kerjasama yang baik dengan mitra kerja.

b. Faktor Inovasi

- Pemanfaatan sosial media Badan Penghubung untuk penyebarluasan informasi kegiatan dan promosi sarana dan prasarana wisma NTT yang disewakan;
- Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando;
- Kerjasama dengan pihak ketiga (TIC dan Angkasa Pura) yang berkelanjutan dalam kegiatan promosi seni budaya dan produk unggulan daerah.

c. Faktor Komitmen

- Adanya komitmen pimpinan terhadap eksistensi Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Penyusunan Database Diaspora NTT, potensi-potensi daerah yang dimiliki setiap kab/kota secara berkala karena data bersifat dinamis dan pembuatan aplikasi untuk pendataan.
2. **Penguatan Regulasi :** Mengajukan kajian terhadap regulasi retribusi penjualan produk unggulan
3. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang teknologi informasi, protokoler, resepsionis dan pelayanan publik serta penambahan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi.
4. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
5. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan.
6. Terkait fasilitasi kontribusi Diaspora NTT bagi pembangunan daerah,

perlu dikembangkan mekanisme yang secara aktif melibatkan diaspora NTT untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, baik melalui forum daring maupun luring. Fasilitasi ini mencakup kegiatan sharing dengan diaspora NTT yang berhasil melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pelajar dan angkatan kerja NTT agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai peluang pendidikan dan kerja internasional, sebagai alternatif selain tujuan migrasi kerja tradisional seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat NTT.

F. UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) belum seluruhnya optimal	1. Jika analisis APIP lemah, rekomendasinya bisa tidak tepat sasaran, sulit diterapkan, atau tidak memberikan perbaikan nyata bagi organisasi. 2. APIP jadi kurang mampu mendeteksi dini penyimpangan, kesalahan administrasi, atau potensi kecurangan. Akibatnya, masalah baru diketahui setelah membesar atau bahkan setelah diaudit pihak eksternal.	Penguatan empat aspek utama: 1. Peningkatan kompetensi SDM APIP (pelatihan teknis, PKS, Sertifikat pengawau yang relevan), 2. peningkatan anggaran dan sarana kerja, 3. penguatan independensi regulasi, serta 4. Penerapan pengawau berbasis risiko (Risk Based Audit)
Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal belum optimal	1. Permasalahan berulang terus terjadi Temuan yang sama muncul kembali dari tahun ke tahun karena akar masalah tidak diselesaikan secara tuntas. 2. Kerugian negara/daerah berpotensi tidak pulih (Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam tindak lanjut bisa menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak maksimal atau	1. Penguatan komitmen pimpinan 2. Sistem pemantauan tindak lanjut yang terintegrasi 3. Peningkatan Peran APIP sebagai fasilitator dan pengawal tindak lanjut 4. Penguatan koordinasi internal

Masalah	Dampak	Solusi
	bahkan hilang kesempatan pemulihannya) 3. Menurunnya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan (Masyarakat melihat bahwa hasil pemeriksaan tidak direspons secara serius, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah menurun)	
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di PD Pemerintah Provinsi NTT belum optimal	1. Risiko penyimpangan dan kesalahan meningkat Lemahnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta aktivitas pengendalian menyebabkan potensi kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian prosedur, dan penyimpangan pengelolaan keuangan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara dini). 2. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan menurun Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan belum sepenuhnya berbasis risiko, sehingga penggunaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan hasil yang optimal. 3. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menurun Lemahnya SPIP berdampak pada rendahnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja PD	1. Penguatan Lingkungan Pengendalian & SDM 2. Identifikasi & Analisis Risiko 3. Penguatan Aktivitas Pengendalian 4. Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi 5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
Kewenangan pembinaan dan pengawasan belum seluruhnya dilaksanakan	1. Rendahnya Akuntabilitas dan Kinerja 2. Penyimpangan Anggaran 3. Ketidaksinkronan Kebijakan 4. Lemahnya Kapasitas Pemda 5. Kurangnya Koordinasi	1. Penguatan Regulasi dan Mekanisme 2. Koordinasi Antar lembaga 3. Penerapan Sanksi Tegas 4. Optimalisasi Peran Gubernur 5. Pengawasan Melekat

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Dualisme pembinaan fungsional	Mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan inefisiensi birokrasi, yang menghambat pembangunan infrastruktur dan perizinan	berfokus pada integrasi, penyatuan komando, dan kepastian hukum
Pergeseran paradigma pengawasan	Berubah dari <i>watchdog</i> (mencari kesalahan) menjadi mitra strategis (<i>strategic partner</i>) yang fokus pada pencegahan, konsultasi, dan <i>quality assurance</i> . Dampaknya meliputi peningkatan efisiensi, manajemen risiko proaktif, perbaikan kinerja organisasi, dan penguatan tata kelola yang lebih bersih.	melibatkan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan budaya kerja
Ketidakpatuhan Obyek Pemeriksaan	Kerugian keuangan negara/daerah senilai triliunan rupiah, potensi sanksi hukum/denda, penurunan reputasi, serta menghambat perbaikan sistem pengendalian internal.	tindakan tegas, edukasi, dan perbaikan sistem.
Kebutuhan sinkronisasi regulasi	Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi birokrasi, kepastian berusaha, serta terciptanya produk hukum yang harmonis, konsisten, dan operasional. Sebaliknya, kurangnya sinkronisasi menyebabkan kekacauan hukum dan menghambat pelayanan publik	penguatan dialog teknis pusat-daerah, penggunaan teknologi seperti aplikasi <i>e-harmonisasi</i> untuk penyelarasan digital, serta pembentukan lembaga legislasi khusus

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan SDM dan Kompetensi	lambatnya penyusunan laporan, tingginya risiko kesalahan pencatatan, serta pengawasan internal yang tidak optimal	pelatihan berkelanjutan (teknis/teknologi), pemanfaatan teknologi digital untuk supervisi jarak jauh, penerapan metode pendampingan (<i>coaching/mentoring</i>), optimalisasi kolaborasi/ forum pengawas, serta penyesuaian beban kerja (prioritisasi supervisi)

d. Faktor Eksternal

Masalah	Dampak	Solusi
PD belum menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat	terhambatnya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja, risiko temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya, serta potensi penurunan kualitas pelayanan publik	pendekatan administratif, teknis, dan hukum
PD belum secara optimal melakukan SPI	kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, peningkatan risiko temuan BPK, dan potensi kecurangan (fraud)	penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin, pemenuhan tenaga ahli, dan pemberian insentif khusus
Manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal	kerentanan tinggi terhadap kerugian finansial, kegagalan operasional, dan kerusakan reputasi	Solusi efektif melibatkan penerapan empat strategi: penghindaran, mitigasi (pengurangan), transfer/berbagi (asuransi), dan penerimaan risiko

3.2 Faktor Pendorong

a. Faktor Koordinasi

- Adanya Rapat Koordinasi Nasional dan Daerah untuk Penguatan dan penyamaan persepsi Pengawasan APIP dengan pimpinan daerah diantaranya sbb:
 - Arahan dan dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan pengawasan.
 - Penyelarasan prioritas pengawasan APIP dengan arah kebijakan daerah.
 - Penyampaian hasil pengawasan secara langsung dan berkala kepada pimpinan.
- Adanya Koordinasi APIP yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) yang diawasinya
 - Komunikasi yang terbuka sejak tahap perencanaan hingga tindak lanjut.
 - Kesepahaman bahwa pengawasan APIP bersifat preventif dan konsultatif.
 - Penetapan PIC tindak lanjut di setiap PD untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi.
- Adanya Koordinasi APIP dengan BPKP
 - Pendampingan penerapan SPIP dan manajemen risiko.
 - Penyelarasan metodologi audit dan reviu.
 - Peningkatan kapabilitas APIP melalui bimbingan teknis dan asistensi.

b. Faktor Inovasi

1. Inovasi Pengawasan Berbasis Risiko dan Data
 - a. Penerapan risk-based auditing secara konsisten.
 - b. Pemanfaatan data analytics untuk mengidentifikasi anomali dan area berisiko tinggi.
 - c. Penggunaan dashboard risiko sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan.
2. Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Pengembangan aplikasi pengawasan internal (e-audit, e-reviu, e-monitoring).
 - b. Digitalisasi kertas kerja audit (KKA elektronik).
 - c. Pemanfaatan sistem pelaporan dan tindak lanjut berbasis online.
3. Inovasi dalam Monitoring Tindak Lanjut
 - a. Penerapan monitoring real-time status tindak lanjut rekomendasi.
 - b. Penilaian kinerja PD berbasis tingkat penyelesaian tindak lanjut.
 - c. Sistem eskalasi otomatis kepada pimpinan atas rekomendasi yang tertunda.
4. Inovasi Metode Pengawasan
 - a. Perubahan pendekatan dari detektif ke preventif dan konsultatif.
 - b. Pelaksanaan early warning system atas potensi penyimpangan.
 - c. Reviu tematik dan audit fokus (quick audit) pada isu strategis.

c. Faktor Komitmen

1. Komitmen Pimpinan Daerah
 - a. Dukungan nyata kepala daerah dan Sekda terhadap independensi APIP.
 - b. Penetapan pengawasan APIP sebagai instrumen strategis pengendalian risiko.
 - c. Penyediaan anggaran dan sumber daya yang memadai bagi APIP.
2. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah
 - a. Kesiadaan PD menjadi objek pengawasan secara terbuka dan kooperatif.
 - b. Penunjukan penanggung jawab (PIC) tindak lanjut hasil pengawasan.
 - c. Integrasi rekomendasi APIP dalam perbaikan tata kelola dan kinerja PD.
3. Komitmen Manajemen terhadap Tindak Lanjut
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (action plan) atas rekomendasi APIP.
 - b. Penyelesaian tindak lanjut tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Evaluasi berkala atas kendala tindak lanjut dan penyelesaiannya.
4. Komitmen APIP itu sendiri
 - a. Integritas, objektivitas, dan profesionalisme auditor APIP.

- b. Konsistensi penerapan standar pengawasan internal pemerintah.
 - c. Keberanian menyampaikan temuan secara independen dan konstruktif
5. Komitmen terhadap Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Dukungan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi auditor.
 - b. Penetapan target level kapabilitas APIP yang jelas.
 - c. Implementasi rencana peningkatan kapabilitas secara terukur.
 6. Komitmen terhadap Budaya Pengendalian
 - a. Penegakan nilai integritas dan kepatuhan di lingkungan PD.
 - b. Kesadaran bersama bahwa pengawasan APIP bersifat preventif dan perbaikan, bukan semata penindakan.
 - c. Keteladanan pimpinan dalam kepatuhan terhadap aturan.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. Penguatan empat aspek utama:
 - a. Peningkatan kompetensi SDM APIP (pelatihan teknis, PKS, Sertifikat pengawau yang relevan),
 - b. peningkatan anggaran dan sarana kerja,
 - c. penguatan independensi regulasi, serta
 - d. Penerapan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Audit)
2. Penguatan komitmen pimpinan, Sistem pemantauan tindak lanjut yang terintegrasi, Peningkatan Peran APIP sebagai fasilitator dan pengawal tindak lanjut, Penguatan koordinasi internal
3. Penguatan Lingkungan Pengendalian & SDM, Penguatan Aktivitas Pengendalian
4. Melibatkan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan budaya kerja
5. Penguatan dialog teknis pusat-daerah, penggunaan teknologi seperti aplikasi e-harmonisasi untuk penyelarasan digital, serta pembentukan lembaga legislasi khusus
6. Pelatihan berkelanjutan (teknis/teknologi), pemanfaatan teknologi digital untuk supervisi jarak jauh, penerapan metode pendampingan (coaching/mentoring), optimalisasi kolaborasi/forum pengawas, serta penyesuaian beban kerja (prioritisasi supervisi)
7. Penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin, pemenuhan tenaga ahli, dan pemberian insentif khusus
8. Penguatan manajemen risiko melalui penerapan empat strategi: penghindaran, mitigasi (pengurangan), transfer/berbagi (asuransi), dan penerimaan risiko.

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

3.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Teknis

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan kualitas data sektoral dan belum optimalnya integrasi data lintas Perangkat Daerah	Analisis perencanaan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	Penguatan sistem satu data daerah dan peningkatan koordinasi pengelolaan data sektoral

b. Faktor Regulasi

Masalah	Dampak	Solusi
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 72 2025	Terlambatnya Pencairan Honor Forkopimda	Penyesuaian pergeseran anggaran sesuai Perpres 72 tahun 2025

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah fungsional perencana.	Beban kerja tinggi dan keterbatasan pendalaman analisis	Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM perencana

3.2 Faktor Pendorong

- **Koordinasi** : Forum lintas PD dan lintas pemerintah berjalan efektif
- **Inovasi** : Pemanfaatan SIPD dan dashboard monitoring pada Portal Sasando
- **Komitmen** : Dukungan pimpinan daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja.

3.3 Ringkasan Analisis

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, direkomendasikan langkah-langkah strategis bagi Perangkat Daerah:

1. **Penguatan Data:** Meningkatkan kualitas data sektoral untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).
2. **Efisiensi Belanja:** Memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada program prioritas.
3. **Optimalisasi Teknologi:** Mendorong pemanfaatan SPBE untuk mengatasi hambatan geografis wilayah kepulauan.
4. **Peningkatan SDM:** Melakukan pelatihan teknis/fungsional khususnya pada bidang monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Capaian kinerja menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal.

Kinerja pembangunan daerah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dasar, distribusi sumber daya manusia, serta dinamika kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat. Namun demikian, melalui penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah, inovasi pelaksanaan program, serta komitmen pimpinan dan aparatur, berbagai tantangan tersebut dapat dikelola secara bertahap.

4.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja**

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti melalui penguatan sistem satu data daerah serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- 2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah**

Mengarahkan alokasi anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta memastikan kesesuaian antara capaian fisik dan realisasi keuangan.

3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten/kota guna mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pada sektor-sektor strategis dan lintas kewenangan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melakukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis dan fungsional, khususnya pada bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

6. Penguatan Pendekatan Kewilayahan

Mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan dan daerah terpencil guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun selanjutnya.